

**PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT
DALAM KONTEKS KETERKAITAN DESA-KOTA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**EDY MULYADI
L4D 005 106**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT DALAM
KONTEKS KETERKAITAN DESA-KOTA**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

EDY MULYADI
L4D005106

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 21 Maret 2007

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 21 Maret 2007

Pembimbing II

Pembimbing I

M. Mukti Ali, SE, MSi, MT

Dra. Bitta Pigawati, MT

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 21 Maret 2007

EDY MULYADI
L4D 005 106

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia

(Surat Ar-Rahmaan, 77-78)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Lilis Sri Mulyawati dan Dhea Rifa Rahmah Edyawati,
Keluarga Besar Bapak H. E. Kasmiun dan Ibunda N. Djuarsih,
Keluarga Besar Bapak H. Armadjaja (Alm) dan Ibu Hj. Ayunah,
terimakasih atas doa restunya yang mengalir deras di setiap
hembusan nafas dan ayunan langkah kehidupan.

ABSTRAK

Wilayah Bogor Barat, secara geografis dan fungsional memiliki keterkaitan dengan wilayah atau kota di sekitarnya yang tercakup dalam pengembangan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), namun demikian dalam perkembangannya belum sepenuhnya mendukung pengembangan wilayah terutama dalam pengembangan sektor pertanian yang menjadi basis kegiatan wilayahnya. Infrastruktur transportasi juga masih mengandalkan jalur utama (Kota Bogor – Rangkasbitung) yang menghubungkan wilayah Bogor Barat dengan wilayah lainnya, sementara transportasi ke lokasi-lokasi produksi masih menjadi kendala. Akibatnya kegiatan wilayah masih terkonsentrasi di wilayah sekitar jalur utama, sementara kota-kota kecil lainnya sebagai pendorong kegiatan pertanian masih belum berkembang.

Dari permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan tujuan merumuskan arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat dalam konteks keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*), dengan sasaran menganalisis keterkaitan ekonomi wilayah, menganalisis keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi dan menganalisis sistem kota. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan *skalogram*. Kemudian dirumuskan arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat dengan menggunakan analisis *SWOT*.

Keterkaitan ekonomi wilayah ditinjau dari pola pasar, aliran bahan baku dan setengah jadi, aliran modal, aliran belanja, dan keterkaitan produksi. Keterkaitan transportasi khususnya jaringan jalan dan pelayanannya serta sistem kota dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki oleh desa kota di masing-masing wilayah. Hasil analisis menunjukkan wilayah Bogor Barat memiliki keterkaitan dengan Kota Bogor, terutama dalam pola pasar, aliran komoditi meskipun lebih cenderung ke Kota Jakarta, dan aliran pedagang dan pembeli, sedangkan aliran modal khususnya di pertanian masih rendah juga aliran produksi yang melihat hubungan sektor pertanian dan industri pengolahan masih belum berkembang. Kedua wilayah dilayani oleh jaringan jalan propinsi dan pelayanan angkutan, yang menghubungkan keduanya. Secara internal pelayanan transportasi terkonsentrasi menuju ke jalan utama khususnya ke Kota Leuwiliang. Hirarki kota wilayah Bogor Barat terdiri dari Kota Leuwiliang sebagai kota orde I, Kota Parung Panjang sebagai orde II, Kota Jasinga, Tenjo dan Rumpin sebagai orde III dan kota-kota lainnya sebagai orde IV. Kota-kota orde I dan II merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah yang memiliki orientasi ke Kota Bogor (Kota Leuwiliang) Jakarta dan Tangerang (Kota Parung Panjang), sedangkan orde III dan IV sebagai sentra produksi. .

Keterkaitan wilayah terhadap arahan pengembangan ekonomi wilayah diarahkan pada pengembangan lahan dan komoditas pertanian, penguatan petani, perluasan jaringan pemasaran, pengembangan kota-kota kecil dan prasarana transportasi serta keterkaitan antar sektor.

Kata Kunci : keterkaitan desa-kota, pengembangan ekonomi wilayah.

ABSTRACT

Bogor Barat region has geographically and functionally linkages with other regions that including in the Development of Jabodetabek Region (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), but that condition has not fully supported yet to regional development especially in developing agriculture sector as basis activity. Transportation infrastructure also still based on main road to connect Bogor Barat region to others, meanwhile to production centers, it is still be obstacle. Therefore all activities still concentrate to the road nearby, and the agriculture has not developed yet. Based on that condition, needed development efforts by rural-urban linkages approach that regard Bogor Barat as agriculture region and Bogor town as urban area. Linkages is mean something that include flow and interaction between rural and urban.

Therefore, the reasearch was done to learn economic development of Bogor Barat region by analysing region economic linkages related to food agriculture sector and agriculture processing, physic and transportation service and urban system. Implication of linkages directed to regional economic development. The methods used descriptive, scalogram and SWOT analysis.

Regional economic linkages consist of market patern, raw material and intermediate good flow, capital flow, shopping flow and production linkages. Transportation linkages particularly road network and its service and urban system base on population number and facilities (numbers and kinds) desa-kota in each small town. The result show that Bogor Barat region has linkages in market patern, commodities flow, nevertheles flow tend to Jakarta and shoping flow (sellers and buyers), while capital and production linkages has not developed yet. Both of region serviced by province road and public transport to Bogor Town beside it passed Bogor Barat region from the region nearby (Pandegelang region). Urban hierarchy consist of hierarchy I is Leuwiliang, hierarchy II is Parung Panjang, hierarchy III are Jasinga, Tenjo and Rumpin, and the others town as hierarchy IV that has function as rural center.

Implication of regional linkages to regional economic development directed to increase agriculture and farmes capacity, to wide market of region production, to develope small town and transportation system, production centre and inter sector linkages.

Keywords : rural-urban linkages, regional economic development.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Tesis **Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat dalam Konteks Keterkaitan Desa-Kota** dapat diselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. Bitta Pigawati, MT selaku Pembimbing I dan Bapak M. Mukti Ali, SE, MSi, MT selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, wawasan dan arahnya dalam penyusunan Tesis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.
2. Bapak Dr. Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA, sebagai Kepala PUSBIKTEK BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum.
3. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.
4. Bapak Ir. Djoko Sugiyono, M.Eng. Sc, sebagai Kepala Balai Peningkatan Keahlian Pengembangan Wilayah dan Teknik Konstruksi Semarang beserta staf yang telah memberikan bantuan fasilitasnya selama pendidikan.
5. Bapak R. Mulyo Hendarto, SE, MSP selaku Penguji I dan Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto SU, selaku Penguji II atas saran-saran dan masukannya bagi penyempurnaan penyusunan Tesis.
6. Bapak Hasto Agung S. S.ST, MT dan Ibu Ir. Retno Widjayanti, MT, yang selalu memberikan motivasi melalui kegiatan evaluasinya.
7. Seluruh staf pengajar di Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Juga kepada staf administrasi dan perpustakaan yang telah membantu kelancaran administrasi pendidikan.
8. Bapak Drs. Ridwan MM selaku Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor dan Bapak Ir. Koesparmanto Ch, MM selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya, tempat penulis bekerja, yang telah memberikan kesempatan tugas belajar dan perhatian serta bantuannya.
9. Masyarakat di Wilayah Bogor Barat yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan Tesis ini dengan meluangkan waktu dan berbagi pengalaman dan pengetahuan.
10. Ibu Ir. Indarti Komala Dewi, MSi dan Ir. Janthy Trilusianthy Hidayat, MSi di Jurusan Teknik Planologi Universitas Pakuan, Bogor atas dorongan dan bantuannya.
11. Rekan-rekan Angkatan "Bolodemang 2005" atas kerjasamanya yang luar biasa dalam berbagai suka dan hampir tanpa duka.
12. Sangat istimewa terima kasih kepada isteriku Ir. Lilis Sri Mulyawati dan anakku tercinta Dhea Rifa Rahmah Edyawati yang menjadi jiwa dan

semangat dalam menapaki jalan kebahagiaan keluarga, meski berat pilihan yang harus dijalani. Juga kepada Ida Farida S.Farm, yang setia menemani keluarga selama pendidikan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi mereka yang memiliki perhatian di dunia perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota, meski tesis ini masih terdapat kelemahan, dan yang mengembangkannya ke arah yang lebih baik.

Semarang, Maret 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota	8
1.4 Keaslian Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	10
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah	11
1.7.2 Ruang Lingkup Substansial	12
1.8 Kerangka Pemikiran	14
1.9 Metode Penelitian	15
1.9.1. Kerangka Analisis.....	17
1.9.2. Kebutuhan Data	18
1.9.3. Teknik Pengumpulan Data	20
1.9.4. Teknik Analisis Data.....	23
1.10 Sistematika Pembahasan	28
BAB II PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DALAM KONTEKS KETERKAITAN DESA-KOTA (<i>RURAL- URBAN LINKAGES</i>)	30
2.1 Paradigma Pengembangan Wilayah	30
2.2 Konsep Pengembangan Ekonomi Wilayah	36
2.2.1 Konsep Wilayah	36
2.2.2 Teori Pengembangan Wilayah	41
2.2.3 Konsep Pengembangan Ekonomi Wilayah	47
2.3 Keterkaitan Desa-Kota (<i>Rural-Urban Linkages</i>)	51
2.4 Strategi Pengembangan.....	60
2.5 Rangkuman Kajian Teori	63

BAB III	GAMBARAN UMUM WILAYAH BOGOR BARAT DAN KOTA BOGOR	68
	3.1 Wilayah Bogor Barat.....	68
	3.1.1 Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan	68
	3.1.2 Kependudukan	70
	3.1.3 Pertanian	70
	3.1.4 Industri	79
	3.1.5 Infrastruktur Transportasi dan Sosial	81
	3.2 Wilayah Kota Bogor	84
	3.2.1 Batas Administrasi	84
	3.2.2 Kependudukan	89
	3.2.3 Perekonomian Kota	89
	3.2.4 Fasilitas Perdagangan.....	92
	3.2.5 Transportasi	92
	3.3 Sintesa	96
 BAB IV	 ANALISIS KETERKAITAN DESA-KOTA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT	 97
	4.1 Analisis Keterkaitan Ekonomi Wilayah	97
	4.2 Analisis Keterkaitan Fisik dan Pelayanan Transportasi ...	109
	4.3 Analisis Sistem Kota	113
	4.4 Keterkaitan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat	120
 BAB V	 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 136
	5.1 Kesimpulan	136
	5.2 Rekomendasi	139
	 DAFTAR PUSTAKA	 142
	LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Kebutuhan Data	21
TABEL I.2	: Kategori Keterkaitan, Elemen Dan Fokus Kajian	24
TABEL II.1	: Keterkaitan Utama Dalam Pengembangan Spasial	53
TABEL II.2	: Kategori Keterkaitan Antar Wilayah	56
TABEL II.3	: Hubungan Antara Teori Dengan Tema Penelitian.....	65
TABEL II.4	: Hubungan Antara Teori Dengan Variabel Penelitian..	66
TABEL III.1	: Jumlah Penduduk Wilayah Bogor Barat Tahun 2003 Dan 2006	71
TABEL III.2	: Luas Panen, Jumlah Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah Dan Ladang (Ton) Di Wilayah Bogor Barat Tahun 2003 Dan Tahun 2005	73
TABEL III.3	: Jumlah Produksi Palawija (Ton) Di Wilayah Bogor Barat Tahun 2003 Dan Tahun 2005	74
TABEL III.4	: Komoditi Palawija Unggulan	75
TABEL III.5	: Jumlah Produksi Sayuran (Kuintal) Di Wilayah Bogor Barat Tahun 2002 Dan Tahun 2005	76
TABEL III.6	: Komoditi Sayuran Unggulan	77
TABEL III.7	: Jumlah Produksi Buah-Buahan Di Wilayah Bogor Barat Tahun 2002 Dan Tahun 2005	78
TABEL III.8	: Komoditi Buah-Buahan Unggulan	79
TABEL III.9	: Jenis Industri Kecil Di Wilayah Bogor Barat.....	81
TABEL III.10	: Potensi Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian Di Wilayah Bogor Barat	81
TABEL III.11	: Kondisi Jalan Kabupaten Di Wilayah Bogor Barat.....	83
TABEL III.12	: Trayek Angkutan Di Wilayah Bogor Barat.....	85
TABEL III.13	: Jumlah Dan Jenis Fasilitas Di Masing-Masing Kota Kecamatan Wilayah Bogor Barat	87

TABEL III.14	: Luas Wilayah Kota Bogor	89
TABEL III.15	: Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Bogor Tahun 2004	91
TABEL III.16	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Utama Di Kota Bogor Tahun 2004	91
TABEL III.17	: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Tahun 2000 Dan 2004 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)	93
TABEL IV.1	: Bobot Dan Indeks Sentralitas Fasilitas Di Masing- Masing Kota Kecamatan Wilayah Bogor Barat	121
TABEL IV.2	: Faktor Internal dan Eksternal Wilayah Bogor Barat.....	129
TABEL IV.3	: Matriks SWOT Wilayah Bogor Barat	131

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Posisi Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota	9
GAMBAR 1.2	: Peta Administrasi Kabupaten Bogor	13
GAMBAR 1.3	: Kerangka Pikir Studi.....	16
GAMBAR 1.4	: Kerangka Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat	19
GAMBAR 2.1	: Proses Perkembangan Suatu Wilayah.....	39
GAMBAR 2.2	: Wilayah Sebagai Sistem Produksi Pertanian	40
GAMBAR 2.3	: Proses Pembangunan Wilayah Pedesaan: Struktur, Aliran Dan Intervensi Kebijakan.....	54
GAMBAR 2.4	: Diagram Matriks SWOT dan Kemungkinan Strategi yang Sesuai.....	61
GAMBAR 3.1	: Batas Administrasi Bogor Barat	69
GAMBAR 3.2	: Peta Sebaran Potensi Komoditi Wilayah Bogor Barat	80
GAMBAR 3.3	: Peta Sebaran Potensi Industri Wilayah Bogor Barat	82
GAMBAR 3.4	: Peta Jaringan Jalan.....	86
GAMBAR 3.5	: Peta Administrasi Kota Bogor	90
GAMBAR 3.6	: Peta Sebaran Fasilitas Perdagangan Kota Bogor.....	94
GAMBAR 3.7	: Peta Akses Antar Wilayah Kota Bogor	95
GAMBAR 4.1	: Peta Keterkaitan Pasar.....	101
GAMBAR 4.2	: Keterkaitan Pasar Dan Wilayah Pengaruhnya.....	102
GAMBAR 4.3	: Peta Aliran Komoditi Pertanian.....	105
GAMBAR 4.4	: Skema Pemasaran Komoditi Di Bogor Barat	106
GAMBAR 4.5	: Peta Asal Pedagang Dan Pembeli	108
GAMBAR 4.6	: Skema Keterkaitan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	109

GAMBAR 4.7	: Peta Analisis Keterkaitan Transportasi	114
GAMBAR 4.8	: Peta Analisis Transportasi Wilayah Bogor Barat...	115
GAMBAR 4.9	: Keterkaitan Jalan Dan Angkutan Di Wilayah Bogor Barat Dan Kota Bogor.....	116
GAMBAR 4.10	: Peta Analisis Sistem Kota	122
GAMBAR 4.11	: Peta Arah Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat	135

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Daftar Pertanyaan (Questioner).....	146
LAMPIRAN B	Rekapitulasi Hasil Wawancara Petani/Pertanian di Wilayah Bogor Barat.....	153
LAMPIRAN C	Rekapitulasi Hasil Wawancara Industri di Wilayah Bogor Barat.....	157
LAMPIRAN D	Rekapitulasi Hasil Wawancara Pengelola Pasar di Kota Bogor	159
LAMPIRAN E	Rekapitulasi Hasil Wawancara Pengelola Pasar di Wilayah Bogor Barat.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasawarsa pertama pertengahan abad ke-20 (dekade 50-an) muncul teori-teori yang menyatakan pentingnya peranan pusat-pusat pertumbuhan atau pembangunan, diantaranya adalah teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) yang disampaikan oleh Francois Perroux. Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan, yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya, yang dikenal dengan *trickling down effect* (dampak tetesan ke bawah) oleh Albert Hirschman.

Pengalaman selama ini, teori kutub pertumbuhan dianggap gagal karena tidak berhasil membuktikan terjadinya dampak tetesan ke bawah secara lugas. Gejala ini disebabkan karena pusat-pusat pertumbuhan yang umumnya adalah kota-kota besar sebagai pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial adalah cukup kuat, sehingga terjadi tarikan urbanisasi dari desa-desa dalam wilayah pengaruh ke pusat-pusat pertumbuhan (kota besar) atau terjadi dampak polarisasi, yang lebih besar pengaruhnya dibandingkan tetesan ke bawah. Dampak polarisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pengaruh yang oleh Gurnal Myrdal disebut *backwash effect* (dampak pengurasan). Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya strategi pengembangan wilayah yang lebih banyak diarahkan pada wilayah perkotaan akibatnya wilayah

pengaruh atau belakangnya menjadi terabaikan dan tetap tertinggal yang akhirnya terjadi kesenjangan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya. Namun demikian sebagai suatu teori, karena fungsinya, suatu kutub pertumbuhan diperlukan sebagai penggerak utama pertumbuhan terhadap wilayah di sekitarnya. Yang keliru sebenarnya adalah pelaksanaan dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang memberikan porsi yang terlalu berlebihan pada pembangunan perkotaan (Adisasmita, 2005: 66-67).

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul kecenderungan di antara para perencana untuk memandang kota dan *hinterland*-nya dalam mekanisme pembangunan wilayah. Untuk itu diperlukan pendekatan untuk menjembatani kesenjangan antar kota (*interurban*), antara kota dan desa (*rural-urban*), antara pusat pertumbuhan dan *hinterland*-nya, serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumberdaya wilayah. Dalam hal ini timbul gagasan bahwa pendekatan harus menggunakan pendekatan wilayah, yang menggabungkan desa-kota, kawasan-kawasan fungsional, dan prasarana wilayah sebagai satu kesatuan. Keuntungan pengkajian dan pengembangan secara kewilayahan ini sangat nyata dilihat secara ekonomi dan lingkungan. Oleh karenanya kemudian berkembang teori-teori pengembangan wilayah khususnya yang terkait dengan aspek-aspek pengembangan ekonomi wilayah dan geografi seperti diantaranya model-model *center-periphery*, *rural-urban linkages* dan sebagainya (Riyadi dalam Ambardi dan Prihawantoro, 2002: 51).

Rural-urban linkages secara umum berhubungan dengan berkembangnya aliran modal publik dan swasta, orang (migrasi dan komuter) dan

barang-barang (perdagangan) antara wilayah perkotaan dengan pedesaan. Infrastruktur yang memadai seperti transportasi, komunikasi, energi dan pelayanan dasar merupakan tulang punggung pendekatan keterkaitan pembangunan desa-kota. Terdapat hubungan positif antara ketersediaan infrastruktur transportasi, kemudahan mobilitas dan akses pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Kecukupan investasi infrastruktur khususnya transportasi juga meningkatkan produktivitas pedesaan dan memberikan akses pasar, pekerjaan dan pelayanan publik terhadap penduduk (Okpala, 2003: 1).

Pertukaran barang merupakan elemen yang mendasar dari keterkaitan desa-kota. Pembangunan ekonomi lokal desa-kota menekankan keterkaitan ekonomi yang efisien dan infrastruktur fisik yang menghubungkan petani dan produsen pedesaan lainnya dengan pasar domestik dan luar wilayah. Strategi pembangunan pedesaan adalah untuk mengembangkan jaringan antara pusat yang lebih besar, menengah dan kecil yang menyediakan fungsi-fungsi secara terpusat (seperti pelayanan, fasilitas dan infrastruktur) yang disusun secara hirarkis. Pembangunan pedesaan diharapkan menjadi pendorong dengan mengisi fungsi-fungsi yang belum ada (seperti pelayanan bank) melalui investasi yang selektif di kota pedesaan (Tacoli, 2004: 10).

Kabupaten Bogor yang masih memiliki dominasi wilayah pedesaan dengan kegiatan pertaniannya, dalam perkembangannya masih belum mendukung pengembangan wilayah hinterlandnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dan strategi pengembangan wilayahnya. Dalam perwilayahan Kabupaten Bogor terdapat 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu Wilayah Bogor Barat, Wilayah

Bogor Tengah dan Wilayah Bogor Timur. Perkembangan Wilayah Bogor Tengah sebagai urat nadi perkembangan Kabupaten Bogor menjadi sangat dominan dengan berbagai keunggulan seperti adanya jalur regional (tol) Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong, Kawasan industri Cibinong-Citeureup-Cileungsi yang menjadikan wilayah ini semakin berkembang dan menjadi daya tarik bagi pengembangan sektor perumahan dan perdagangan jasa. Begitu pula wilayah Bogor Timur yang mengalami perkembangan yang hampir sama dengan wilayah Bogor Tengah terutama di sekitar jalur regional Jakarta – Jonggol dan di beberapa wilayah kecamatannya berkembang kegiatan industri, perumahan dan perdagangan jasa.

Sementara itu wilayah Bogor Barat yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai kegiatan utama penduduknya (jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 60,95% dari total angkatan kerja yang ada (Rencana Terperinci Tata Ruang Wilayah Bogor Barat Tahun 2001-2011), mengalami perkembangan yang relatif lambat. Untuk mendorong perkembangan wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun strategi pengembangan wilayahnya (Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2003 – 2008) melalui:

1. Strategi Percepatan Pembangunan di Wilayah Bogor Barat yang terdiri dari 11 kecamatan dalam rangka keseimbangan pembangunan antar wilayah; melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan, investasi pemerintah di bidang infrastruktur publik dan pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi investasi swasta/masyarakat yang akan menanamkan modalnya di Wilayah Bogor Barat.

2. Strategi Pengendalian Pembangunan di Wilayah Bogor Tengah yang terdiri dari 18 kecamatan
3. Strategi Pemantapan Pembangunan di Wilayah Bogor Timur yang terdiri dari 6 kecamatan.

Perkembangan wilayah Bogor Barat pada dasarnya tidak terlepas dari perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, dalam hal ini perkembangan perkotaan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) yang menjadi pusat pengembangan ekonomi wilayah. Posisi yang berada di sekitar wilayah tersebut secara fisik memiliki keterkaitan dengan adanya sistem transportasi yang menghubungkan wilayah Bogor Barat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, yang memungkinkan terjadinya aliran orang dan barang untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing wilayah. Adanya kemudahan pergerakan tersebut akan mempengaruhi orientasi suatu wilayah dalam perkembangannya, untuk memasarkan produk-produk unggulannya dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak terdapat di wilayahnya. Dalam konteks keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan, wilayah Bogor Barat memiliki peluang berkembang yang besar terutama karena secara fisik memiliki hubungan dengan wilayah perkotaan di sekitarnya. Salah satu kota yang menjadi orientasi pergerakan penduduk wilayah Bogor Barat adalah Kota Bogor. Secara fisik, keterkaitan wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Adanya jalur jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Lebak (Propinsi Banten) dengan Kota Bogor yang melalui wilayah Bogor Barat, yang menjadi urat nadi pergerakan ke bagian barat Kota Bogor.

2. Adanya jalan regional ini didukung pula oleh berkembangnya prasarana perangkutan yang menghubungkan wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor dan angkutan yang menghubungkan wilayah lainnya ke Kota Bogor yang melintasi wilayah Bogor Barat.
3. Pergerakan orang yang tinggal di wilayah Bogor Barat ke wilayah Kota Bogor dan wilayah lainnya untuk tujuan tertentu, umumnya melalui Kota Bogor karena terdapatnya berbagai prasarana yang menghubungkan Kota Bogor ke wilayah lainnya seperti terminal, stasiun dan pasar regional.

Wilayah Bogor Barat sebagai wilayah perdesaan yang mengandalkan produk pertanian dan Kota Bogor yang menjadi pusat perdagangan, jasa dan industri, akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan terutama dengan adanya aliran komoditi dari masing-masing wilayah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Memperhatikan kondisi dan interaksi wilayah yang terjadi serta potensi keterkaitan wilayah yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah Bogor Barat maka dianggap cukup beralasan untuk melihat keterkaitan kedua wilayah tersebut yang berpotensi dan mendukung bagi berkembangnya ekonomi wilayah Bogor Barat. Oleh karena itu kajian pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat. dilakukan dalam konteks keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*).

1.2 Perumusan Masalah

Posisi wilayah Bogor Barat dalam konstelasi wilayah Jabodetabek memiliki peluang bagi pengembangan wilayahnya, untuk berperan menjadi produsen komoditi pertanian dan pengolahannya dan di sisi lain wilayah

Jabodetabek menjadi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah Bogor Barat, serta dapat memanfaatkan kemudahan lainnya yang disediakan oleh wilayah perkotaan. Keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan ini tampaknya belum optimal dimanfaatkan oleh wilayah Bogor Barat untuk mengembangkan ekonomi wilayahnya, terutama dalam mendukung aliran komoditi pertanian dan pengolahannya untuk dipasarkan ke wilayah perkotaan.

Dari aspek keruangan, keterkaitan secara fisik dengan adanya jaringan jalan regional dan prasarana angkutannya, hanya terjadi pada koridor jalan tersebut, sementara lokasi-lokasi produksi masih tersebar jauh dari jalan tersebut. Hal ini berarti masih rendahnya jangkauan infrastruktur yang ada sehingga menyebabkan kurang lancarnya fungsi-fungsi jaringan jalan untuk membantu proses pemasaran produk pertanian maupun aliran barang yang masuk ke wilayah Bogor Barat. Dampak lainnya dari rendahnya infrastruktur ini adalah tidak berkembangnya kota-kota kecil/kecamatan yang seharusnya berfungsi sebagai pusat lingkungan atau permukiman yang dapat menyediakan pelayanan-pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah belakangnya dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

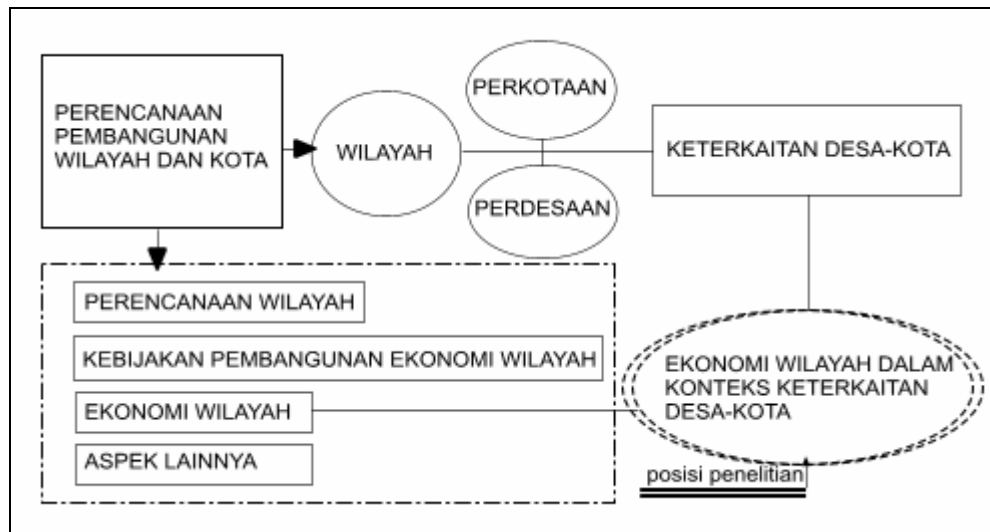
1. Belum optimalnya keterkaitan wilayah dalam mendukung aliran komoditi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di Wilayah Bogor Barat.
2. Infrastruktur transportasi sebagai elemen keterkaitan wilayah yang mendukung kegiatan pertanian belum optimal terutama dukungan terhadap pergerakan orang dan barang ke dan dari wilayah Bogor Barat.

3. Sistem kota-kota di wilayah Bogor Barat belum berfungsi dalam mendukung perkembangan sosial ekonomi wilayah. Keberadaan kota-kota belum menjadi pusat-pusat pelayanan bagi wilayah belakangnya dan mendukung keterkaitan antara desa-kota di wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor.

Dalam kaitannya dengan wilayah Bogor Barat sebagai wilayah penelitian, maka dari permasalahan di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) adalah bagaimana pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat di Kabupaten Bogor dalam konteks keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*) ?.

1.3 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Perencanaan pembangunan wilayah dan kota memiliki dimensi yang luas baik secara sektoral maupun tata ruang. Wilayah meliputi kawasan perkotaan dan perdesaaan, yang memiliki karakteristik dan saling berhubungan di antara keduanya, sehingga terdapat keterkaitan desa-kota dari aspek-aspek fisik, ekonomi, kependudukan dan sebagainya. Di sisi lain substansi perencanaan pembangunan wilayah dan kota meliputi aspek perencanaan wilayah, kebijakan pembangunan ekonomi wilayah, ekonomi wilayah dan aspek lainnya seperti perencanaan kota, infrastruktur, hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan melihat keterkaitan desa-kota sebagai elemen wilayah yang dihubungkan dengan aspek substansi perencanaan pembangunan, maka dilakukan penelitian pengembangan ekonomi wilayah dalam konteks keterkaitan desa-kota. Dengan demikian, posisi penelitian ini secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1.



GAMBAR 1.1
POSISI PENELITIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang keterkaitan desa-kota telah dilakukan Douglas pada tahun 1998 pada desa-desa di Yogyakarta, Lombok dan Sumbawa (Soegijoko ed, 2005: 49). Salah satu temuannya adalah bahwa keterkaitan desa-kota cenderung bersifat spesifik dan cenderung untuk tidak mencakup seluruh sektor kegiatan perdesaan. Pada kasus desa pegunungan di Prambanan Yogyakarta, keterkaitan utama yang terjadi dengan Kota Yogyakarta adalah perdagangan batu cadas, dimana batu cadas tersebut dikirim setiap hari dengan truk ke Yogyakarta. Namun demikian aliran penduduk, modal dan barang lainnya cenderung sangat terbatas.

Menyikapi hasil penelitian sebelumnya dan untuk memperkaya hasil penelitian tentang pengembangan ekonomi wilayah dalam konteks keterkaitan desa-kota sesuai dengan potensi wilayahnya sebagai sumber informasi dan bahan kajian pengembangan ekonomi wilayah, maka penelitian yang memfokuskan pada

keterkaitan ekonomi, fisik, prasarana transportasi dan sistem kota di wilayah Bogor Barat ini perlu dilakukan.

Berdasarkan data dan penelitian keterkaitan desa-kota dapat dikatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah dalam konteks keterkaitan desa-kota dengan wilayah studinya Wilayah Bogor Barat di Kabupaten Bogor belum pernah diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat merupakan upaya untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga kemampuan ekonomi wilayahnya dapat memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan ekonomi wilayah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang perencanaan pembangunan wilayah dan kota khususnya tentang keterkaitan desa-kota dalam pengembangan ekonomi wilayah. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup untuk pengembangan wilayah, dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan aktivitas wilayahnya dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah, melalui kebijakan dan memfasilitasi kegiatan masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah.

1.6 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat dalam konteks keterkaitan desa-kota, dari aspek keterkaitan ekonomi, fisik dan prasarana transportasi serta sistem kota.

Sementara itu sasaran penelitian ini adalah :

1. Menganalisis keterkaitan ekonomi wilayah dengan melihat pemasaran dan aliran komoditas pertanian dan industri pengolahannya.
2. Menganalisis keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi dalam mendukung pengembangan wilayah.
3. Menganalisis sistem kota-kota sebagai pusat-pusat pelayanan wilayah.
4. Merumuskan arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat dalam konteks keterkaitan desa-kota.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansial.

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor secara geografis berada dalam wilayah Kabupaten Bogor meskipun Kota Bogor merupakan daerah otonom, sebagai satu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pengembangan Kabupaten Bogor. Luas wilayah Bogor Barat adalah 88.017 Ha sedangkan Kota Bogor seluas 11.850 Ha. Kota Bogor berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor sementara Wilayah Bogor Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak di bagian barat dan Kabupaten Tangerang di bagian utara serta Kabupaten Sukabumi di bagian selatan. Sedangkan secara mikro sesuai dengan kajian penelitaian ini meliputi 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Tenjo,

Nanggung, Leuwiliang, Jasinga, Parung Panjang, Cigudeg, Rumpin, Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan dan Sukajaya. Dengan demikian unit analisis wilayah yang digunakan adalah kecamatan. Wilayah ini dipilih di samping karena kondisi perkembangan wilayahnya yang relatif lambat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, namun di sisi lain wilayah Bogor Barat memiliki kedekatan dengan Kota Bogor secara fisik. Mengenai wilayah studi ini dapat dilihat pada Gambar 1.2.

1.7.2 Ruang Lingkup Substansial

Dalam pengembangan ekonomi wilayah pada dasarnya banyak elemen yang harus dikaji. Namun demikian mengingat keterbatasan waktu dan ketersediaan data maka dalam penelitian ini akan mengkaji aspek yang berkaitan dengan keterkaitan desa-kota yaitu :

1. Identifikasi keterkaitan desa-kota dari aspek keterkaitan ekonomi berdasarkan aliran komoditi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.
2. Identifikasi infrastruktur transportasi yang meliputi jaringan jalan dan pelayanan angkutan dan prasarananya yang mendukung keterkaitan wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor.
3. Identifikasi sistem kota di wilayah Bogor Barat sebagai pusat-pusat pelayanan wilayah. Untuk itu diperlukan informasi tentang keberadaan masing-masing kota kecil/kecamatan dan kelengkapan fasilitas pendukung kekotaannya. Salah satu yang akan menjadi indikator kekotaan ini adalah adanya fasilitas pendukung sosial ekonomi, yang dimiliki oleh masing-masing kota kecamatan yang memberikan pelayanan sosial ekonomi baik dalam skala kecamatan maupun wilayah yang lebih luas.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARU
DALAM KONTEKS KETERANGAN DEER KOTA

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BOGOR

LEGENDA :

- Wilayah Bogor Baru
- Wilayah Kota Bogor

SKALA

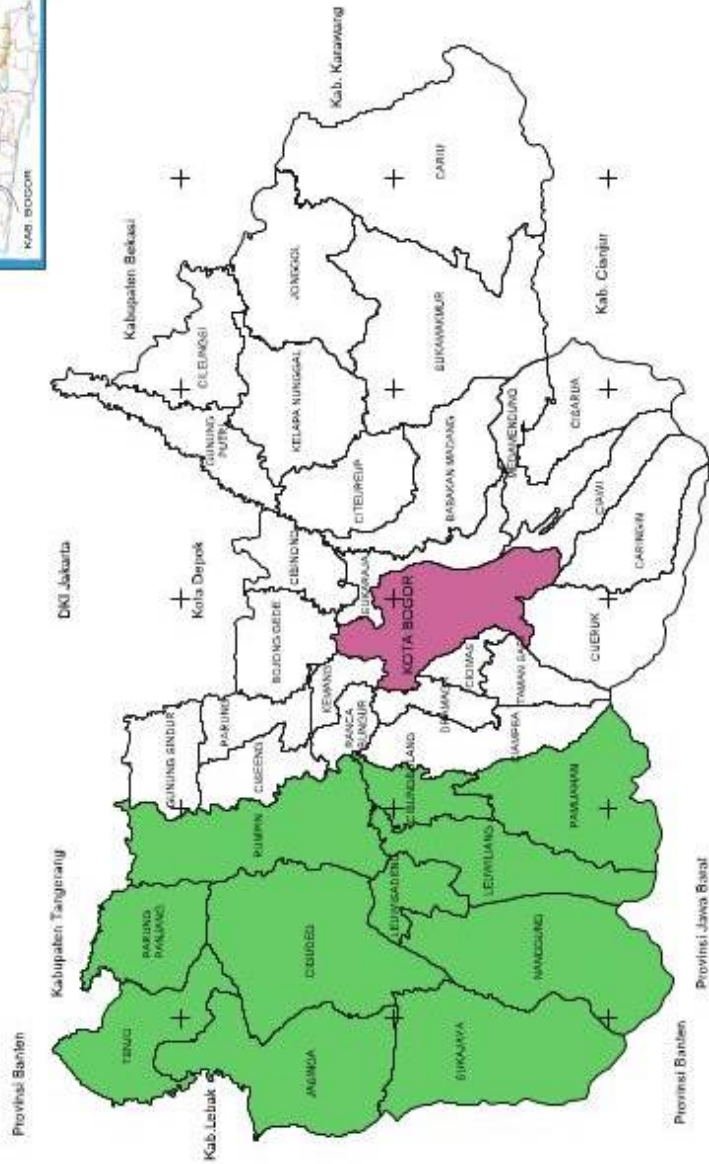
ND

1:1

UTARA



SUMBER
BPS/KABUPATEN BOGOR, 2014



4. Mendeskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan *rural-urban linkages*.
5. Mengkaji pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat.

1.8 Kerangka Pemikiran

Wilayah Bogor Barat sebagai salah satu wilayah pengembangan Kabupaten Bogor yang memiliki potensi sektor pertanian, dalam konstelasi wilayah Jabodetabek, memiliki potensi berkembang melalui keterkaitan secara fisik dan ekonomi dalam konteks adanya wilayah pedesaan (Bogor Barat) dengan perkotaan dalam hal ini kota-kota di wilayah Jabodetabek (*rural-urban linkages*). Secara wilayah, Kota Bogor akan menjadi sentral orientasi terjadinya keterkaitan baik secara fisik maupun ekonomi tersebut, mengingat secara geografis memiliki kedekatan dan didukung oleh prasarana dan sarana pergerakannya.

Namun demikian dalam perkembangannya keterkaitan tersebut belum optimal dalam mendukung aliran komoditi Bogor Barat dan hasil pengolahannya sehingga mempengaruhi perkembangan sektor pertanian dan pengembangan wilayahnya. Di sisi lain rendahnya dukungan transportasi ke wilayah-wilayah pusat produksi menyebabkan sektor-sektor kegiatan penduduk belum berkembang terutama dalam mendukung aliran komoditi yang ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pusat-pusat pelayanan, belum berkembangnya kota-kota kecil dalam memberikan pelayanan mengakibatkan kegiatan-kegiatan penduduk juga belum berkembang. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian pengembangan ekonomi wilayah dengan melihat keterkaitan, dukungan transportasi dan pengembangan kota-kota kecil sebagai pusat-pusat pelayanan wilayah.

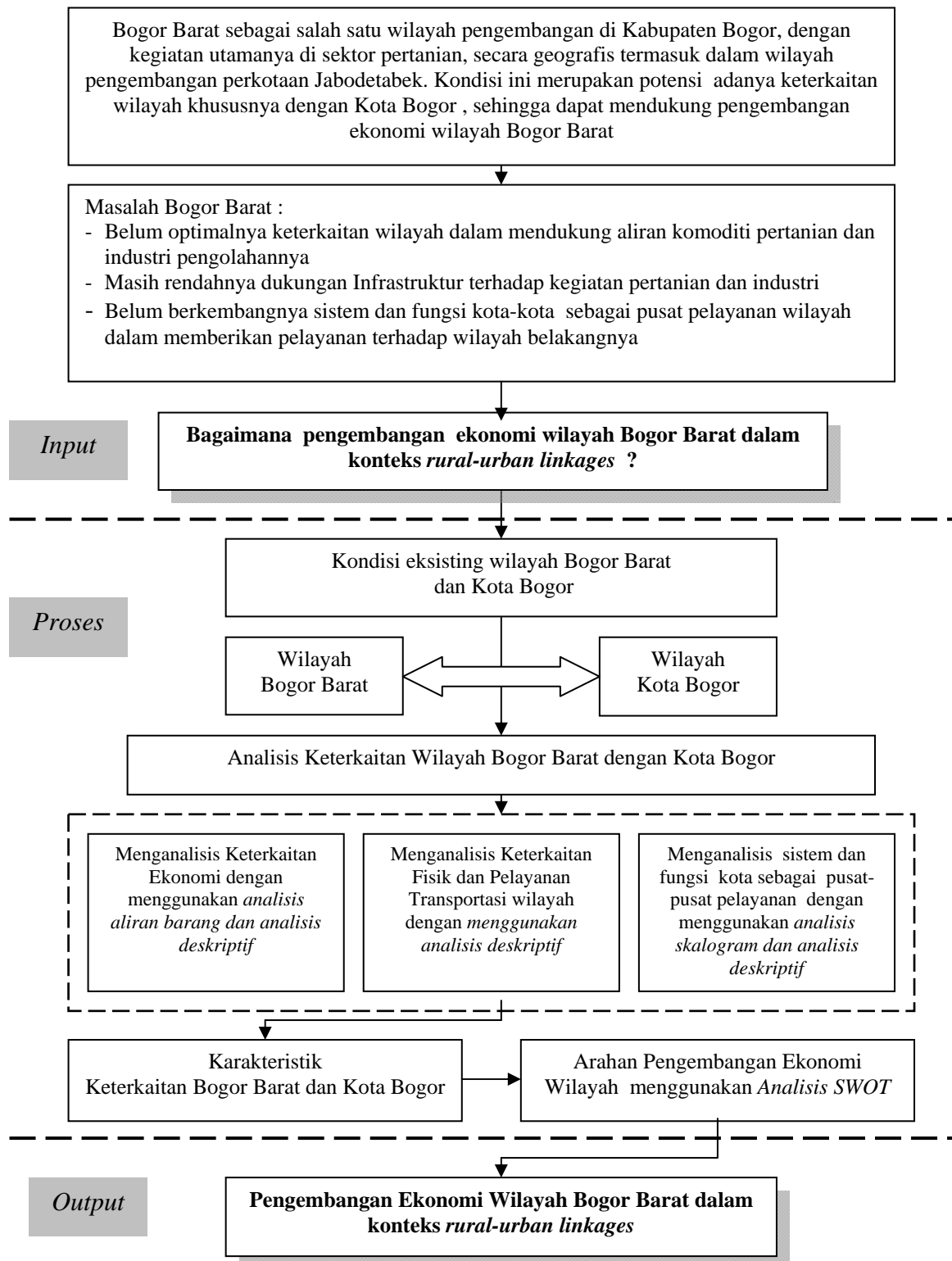
Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan identifikasi potensi keterkaitan wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor, analisis keterkaitan ekonomi wilayah, keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi serta sistem kota dalam mendukung kegiatan-kegiatan di wilayah Bogor Barat. Kemudian disusun arahan pengembangannya dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan pengembangan ekonomi wilayahnya. Mengenai kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 1.3.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Nazir (2003: 44) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian pengembangan ekonomi wilayah ini, sesuai dengan tujuan dan sasarnya maka dilakukan identifikasi terhadap potensi keterkaitan antara Wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor untuk menghasilkan karakteristik wilayah. Selanjutnya dengan melihat aspek tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan ekonomi, keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi serta sistem kota dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Analisis keterkaitan ekonomi wilayah dilakukan melalui deskripsi hubungan antara pasar dan pengaruhnya di antara kedua wilayah, aliran komoditi, aliran belanja, aliran modal dan aliran produksi. Untuk melihat aliran orang dalam keterkaitan ekonomi ini dilihat berdasarkan aliran belanja di kedua wilayah.



Sumber : Hasil Kajian, 2006

GAMBAR 1.3
KERANGKA PIKIR STUDI

Analisis keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi dilakukan deskripsi tentang kondisi jaringan jalan dan prasarananya yang menghubungkan kedua wilayah dan kondisi di wilayah Bogor Barat sendiri yang terkait dengan pelayanan angkutannya. Pola keterkaitan ini akan menghasilkan kondisi jaringan jalan dan pelayanan transportasi di wilayah Bogor Barat. Sedangkan analisis sistem kota ditujukan untuk melihat pusat-pusat kegiatan eksisting wilayah yang terkonsentrasi di suatu kota dilihat berdasarkan ketersediaan fasilitasnya. Dari keterkaitan dan sistem kota ini maka untuk menghasilkan arahan pengembangan ekonomi wilayah dilakukan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat*).

1.9.1 Kerangka Analisis

Kerangka analisis mencoba menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan dimulai dari *input*, proses dan *output*. Dalam tahapan input dijelaskan berbagai masukan yang menjadi pertimbangan dalam menghasilkan output akhir atau menjadi masukan bagi proses selanjutnya.

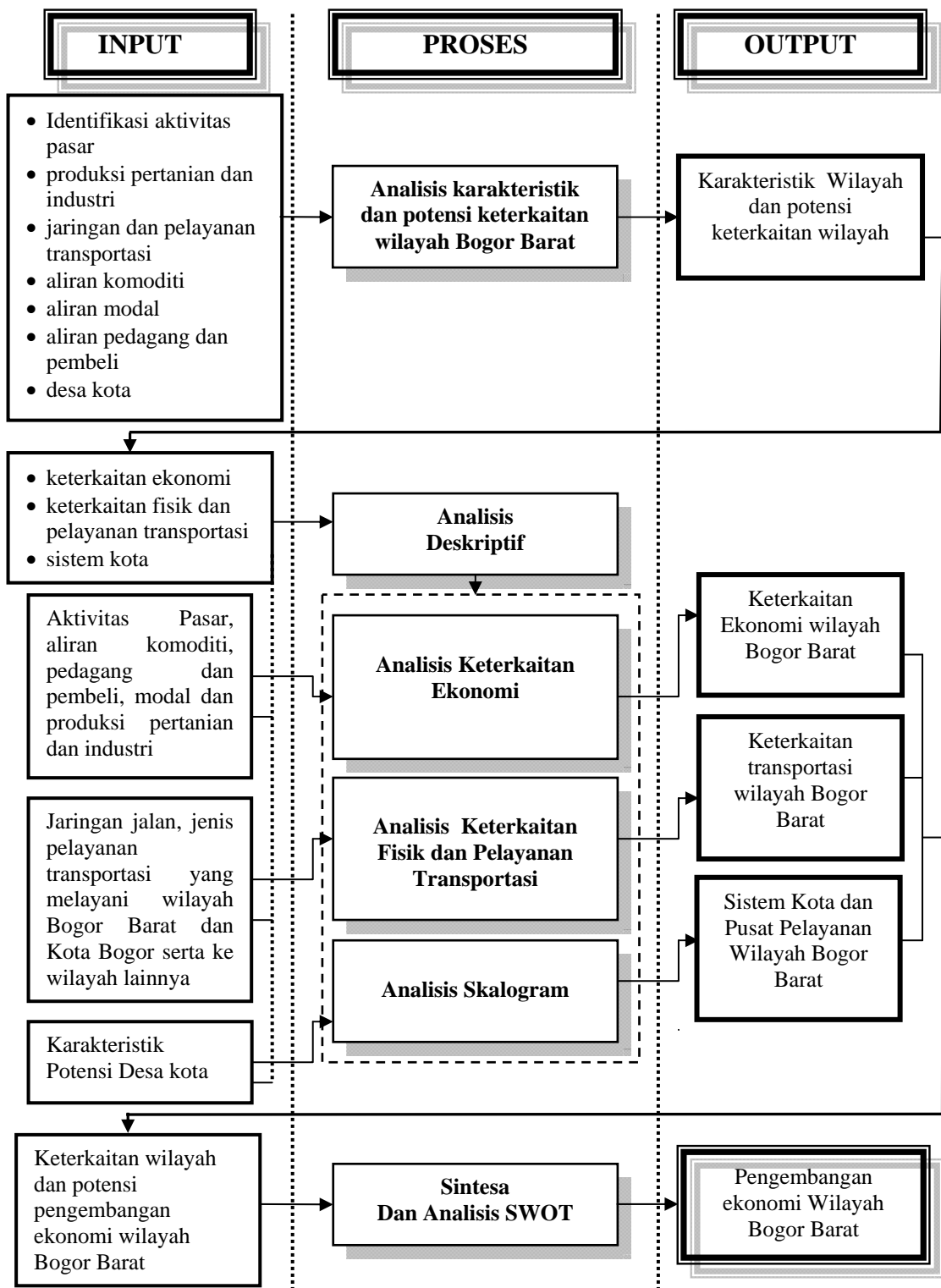
Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor untuk mengetahui karakteristik kedua wilayah dalam mendukung keterkaitan baik sosial, ekonomi maupun fisik. Kemudian hasil tahapan tersebut dianalisis yang meliputi 4 (empat) komponen utama yaitu aliran komoditi pertanian, industri pengolahan, infrastruktur dan fasilitas di wilayah desa kota. Analisis yang dilakukan adalah analisis keterkaitan ekonomi yang meliputi elemen pola pasar, aliran komoditi, aliran modal, pola

belanja dan aliran produksi sehingga dapat diketahui keterkaitan ekonomi wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor.

Analisis berikutnya adalah analisis keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi mendeskripsikan kondisi jaringan jalan dan angkutannya yang melayani wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor, dengan demikian dihasilkan keterkaitan transportasi kedua wilayah tersebut. Untuk melihat dukungan kota-kota di wilayah Bogor Barat dilakukan analisis pusat-pusat pelayanan dengan metode skalogram, sehingga dihasilkan sistem dan hirarki kota di Bogor Barat. Tahapan selanjutnya dengan mengetahui keterkaitan ekonomi, keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi serta sistem dan hirarki kota, maka dirumuskan arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil dari analisis SWOT ini adalah kemungkinan strategi yang sesuai dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengembangkan ekonomi wilayah. Mengenai kerangka analisis ini dapat dilihat pada Gambar 1.4.

1.9.2 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam studi ini merupakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi dalam bentuk laporan dan lain-lain. Kebutuhan data primer diperlukan mengingat aspek keterkaitan dan aliran barang sangat sulit diperoleh dari data sekunder, oleh karenanya dilakukan pengumpulan informasi secara langsung kepada sumber-sumber yang terlibat dan mengetahui kondisinya. Sumber data yang dimaksud meliputi pasar, petani/pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.



Sumber : Hasil Kajian, 2006

GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI
WILAYAH BOGOR BARAT

Kebutuhan data dapat dikelompokkan dalam data yang bersumber dari wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor. Data tersebut meliputi data komoditi pertanian dan industri, prasarana jalan dan angkutannya, fasilitas dan jumlah penduduk di desa kota yang dirinci berdasarkan unit analisis kecamatan. Secara lebih jelas mengenai jenis kebutuhan data, unit kajian, tahun data, sumber dan tujuan penggunaan data dapat dilihat pada Tabel I.1.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini data yang digunakan adalah data primer hasil survey lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait. Data yang diperoleh berdasarkan survey primer melalui observasi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap petani/pertanian, industri pengolahan pertanian, pengelola pasar sesuai dengan jenis komoditi yang dihasilkan dan diperdagangkan.

Pemilihan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden adalah aktor yang terdiri dari petani, pengusaha industri dan pengelola pasar. Responden yang dimaksud adalah responden yang terlibat langsung atau responden yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait dengan sektor pertanian, industri dan perdagangan. Dalam menentukan responden ini diawali dengan melihat pusat-pusat pelayanan penduduk yang terkait dengan perdagangan atau aliran komoditi yaitu lokasi pasar. Pasar yang dimaksud adalah pasar yang diperkirakan memiliki keterkaitan di antara kedua wilayah dan menjadi pasar regional dengan berbagai komoditi yang beragam dan dalam jumlah yang besar.

TABEL I.1
KEBUTUHAN DATA

No	Kelompok dan Jenis Data	Unit Kajian	Sumber Data dan Tahun	Sasaran
1.	Komoditi Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Produksi • Jumlah Produksi • Distribusi • Pemasaran 	Kecamatan	Pertanian, Bappeda, BPS, 2005	Analisis Deskriptif, Analisis Keterkaitan Ekonomi
2	Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Produksi • Jumlah Produksi • Distribusi • Pemasaran 	Kecamatan	Perindustrian, 2005	Analisis Deskriptif, Analisis Keterkaitan Ekonomi
3	Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Jalan dan Transportasi • Permukiman 	Kecamatan	Bina Marga, Perhubungan, Bappeda, 2005	Analisis deskriptif, Analisis Skalogram (Pusat-pusat Pelayanan)
4	Keterkaitan desa-kota <ul style="list-style-type: none"> • Antar Sektor • Antar Wilayah • Modal • Aliran Komoditi • Kendaraan • Pedagang/Pembeli 	Kecamatan, Kota	Survei Lapangan, 2006	Analisis Aliran Barang, Analisis Keterkaitan Ekonomi
5	Perekonomian dan Infrastruktur Kota Bogor	Kecamatan, Kota	Bappeda, BPS, 2005	Analisis Deskriptif, Analisis Keterkaitan Ekonomi dan Transportasi

Sumber : Hasil Kajian, 2006

Pasar yang menjadi lokasi survei tersebut adalah Pasar Kebon Kembang (Anyar), Pasar Bogor dan Pasar Induk Kemang (Kota Bogor), sedangkan pasar di

Wilayah Bogor Barat ditentukan berdasarkan skala pelayanan dan lokasinya yang berada di koridor jalan regional yaitu Pasar Leuwiliang dan Pasar Jasinga. Sedangkan Pasar Tenjo dan Pasar Parung Panjang dipilih berdasarkan karakteristik geografis yang jauh dari Kota Bogor dan memiliki kedekatan dengan pasar di Kabupaten Tangerang, untuk mewakili perbedaan orientasi pasar Wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor. Dengan demikian survei pasar dilakukan terhadap 7 (tujuh) pasar yang terdiri 3 (tiga) pasar regional di Kota Bogor dan 4 (empat) pasar di wilayah Bogor Barat. Sedangkan untuk mengetahui aliran komoditas pertanian, di samping dari pasar juga dilakukan wawancara dengan petani. Mengingat jumlah petani yang besar dan tidak adanya data masing-masing petani berdasarkan komoditasnya, maka dilakukan pengambilan responden sebesar 30 orang, dengan pertimbangan ukuran sampel tersebut telah dapat memberikan ragam sampel yang telah stabil sebagai pendugaan ragam populasi (Sugiarto et al, 2003: 8). Sebarannya disesuaikan dengan jenis komoditi yang diteliti di masing-masing kecamatan. Untuk komoditi industri pengolahan ditentukan berdasarkan jenis komoditinya (6 komoditi). Dengan pertimbangan sebaran dan jumlah industrinya maka dipilih dipilih sebanyak 4 (empat) jenis komoditi industri pengolahan yaitu industri dodol, keripik, kerupuk dan tempe.

Sedangkan dalam mendapatkan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen mengenai kumpulan data, perencanaan, peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai bahan analisis.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang diperoleh diolah dengan menggunakan alat analisis untuk dapat menghasilkan suatu temuan atau informasi yang diinginkan dari hasil olahan data tersebut. Hasil akhir dari analisis kuantitatif ini masih perlu diperkuat dengan interpretasi dan deskripsi secara kualitatif.

Beberapa analisis yang digunakan dalam menilai potensi dan keterkaitan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Analisis Keterkaitan Ekonomi

Diawali dengan melihat komoditas unggulan yang terdiri dari padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Dalam analisis ini digunakan analisis perbandingan jumlah produksi komoditi di setiap kecamatan, kemudian dipilih tiga besar kecamatan untuk setiap komoditi dengan pertimbangan bahwa komoditi tersebut relatif dominan dibandingkan dengan jumlah produksi di kecamatan lainnya, dan terjadi pemusatan di tiga kecamatan sebagai produsen atau penghasil utamanya. Untuk potensi industri pengolahan dilakukan deskripsi terhadap terhadap jenis dan distribusi dalam mendukung pengembangan wilayah.

Menganalisis keterkaitan wilayah melalui analisis keterkaitan ekonomi sesuai dengan elemennya yaitu analisis pola pasar, aliran komoditi, belanja, dan produksi dan modal. Melihat aliran komoditi digunakan analisis aliran barang. Analisis aliran Barang dapat digunakan sebagai salah satu ukuran intensitas hubungan suatu daerah dengan daerah lain. Lebih dari itu dapat pula diketahui tingkat ketergantungan daerah yang diselidiki pada daerah lain, atau peranan

daerah yang diselidiki atas daerah lain yang lebih luas (Warpani, 1984: 71). Dalam analisis keterkaitan ekonomi ini ditinjau dari elemen-elemen keterkaitan dan fokus kajiannya seperti terlihat pada Tabel I.2.

TABEL I.2
KATEGORI KETERKAITAN, ELEMEN DAN FOKUS KAJIAN

Kategori Keterkaitan	Elemen	Fokus Kajian
Ekonomi	Pola Pasar	Mengidentifikasi pasar sebagai pusat koleksi dan distribusi barang serta pelayanannya bagi kedua wilayah.
	Aliran Bahan Baku dan Setengah jadi	Aliran komoditi yang meliputi komoditi beras, palawija, sayuran dan buah-buahan antara Kota Bogor dan Bogor Barat serta komoditi yang keluar dari wilayah Bogor Barat.
	Aliran Modal	Aliran modal dilihat dari penggunaan modal oleh petani dan sumber modal yang diterima atau dimanfaatkan oleh petani dalam mengelola usaha tani dan pemasarannya.
	Aliran Belanja	Melihat asal pedagang dan penjual di masing-masing pasar serta aliran penduduk dalam mendapatkan barang konsumsi lainnya.
	Keterkaitan Produksi	Melihat komoditi pertanian di wilayah Bogor Barat yang dimanfaatkan sebagai input bagi industri pengolahannya.

Sumber : Rondinelli, 1985, dimodifikasi.

2. Analisis Keterkaitan Fisik dan Pelayanan Transportasi

Menganalisis infrastruktur wilayah yang menjadi pendorong dan pengarah pengembangan wilayah yang kemudian dideskripsikan mengenai jenis,

sebaran dan pelayanannya. Analisis keterkaitan transportasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antar permukiman yang meliputi prasarana jaringan jalan dan sarananya dalam mendukung kemudahan pergerakan antar wilayah. Dengan demikian diketahui hubungan antar wilayah dari prasarana pergerakannya dan wilayah-wilayah yang belum dilayani oleh transportasi internal dan yang terkait dengan wilayah lainnya.

3. Analisis Sistem Kota/Pusat Pelayanan

Dalam analisis pusat pelayanan digunakan analisis skalogram Guttman. Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui hirarki kota berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Hirarki kota akan berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan baik skala regional maupun lokal. Tahapan penyusunan analisis skalogram sebagai berikut (Rondinelli, 1985: 115 dan Budiharsono, 2005: 151):

1. Membuat urutan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel.
2. Membuat urutan fasilitas yang ditentukan berdasarkan frekuensi pada bagian atas.
3. Menggambar garis kolom dan baris sehingga lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan fasilitas yang ada pada masing-masing wilayah kota.
4. Menggunakan tanda (1) pada sel yang menyatakan keberadaan suatu fasilitas pada suatu wilayah dan tanda (0) pada sel yang tidak memiliki fasilitas.

5. Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas, semakin banyak banyak fasilitas yang ada pada suatu wilayah kota, maka wilayah tersebut berada di urutan atas, semakin banyak wilayah yang memiliki fasilitas tersebut, maka jenis fasilitas tersebut berada pada kolom sebelah kiri.
6. Mengalikan kolom-kolom yang telah disusun dengan nilai indeks sentralitas masing-masing kemudian disusun ulang seperti langkah lima.
7. Langkah terakhir yaitu mengidentifikasi peringkat/hirarki kota yang dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai keberadaan fasilitas pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilainya, maka hirarki kota tersebut akan semakin tinggi.

Disamping keberadaan fasilitas, pertimbangan jumlah fasilitas juga dilakukan untuk menentukan pusat pelayanan dengan menggunakan indeks sentralitas Marshal. Prosedurnya adalah sebagai berikut (Rondinelli, 1985: 125):

1. Membuat kembali tabel skalogram
2. Menjumlahkan masing-masing nilai baris dan nilai kolom
3. Dengan menggunakan asumsi total jumlah seluruh fungsi pelayanan maka diberi bobot 100, maka bobot fungsional fasilitas dapat dihitung berdasarkan rumus :

$$C = t / T$$

dimana :

C = Bobot atribut fungsional suatu fasilitas

t = Nilai sentralitas gabungan (100)

T = Jumlah total atribut masing-masing fasilitas

4. Menambahkan satu blok dan masukan bobot yang sudah dihitung
5. Buat kembali tabel seperti tahap 1, dan kalikan dengan bobot yang sudah dihitung.
6. Jumlahkan bobot masing-masing baris untuk mendapatkan nilai keterpusatan. Semakin tinggi jumlahnya maka pusat pelayanan tersebut hirarkinya semakin tinggi atau berada diurutan paling atas.

4. Analisis SWOT

Dalam SWOT terdapat dua faktor yang sangat penting yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan elemen-elemen/komponen wilayah Bogor Barat dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, khususnya yang terkait dengan sektor pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan hasil pertanian, fisik dan pelayanan transportasi serta sistem kota dalam konteks keterkaitan desa-kota. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar yang memberikan peluang maupun hambatan bagi pengembangan elemen-elemen wilayah yang seharusnya dioptimalkan sehingga hambatan yang ada mampu diperkecil untuk meningkatkan peluang pengembangannya. Elemen-elemen tersebut dianalisis kekuatannya (*strength*) dan kelemahannya (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Penyusunan matriks faktor eksternal dan internal tanpa melakukan pemberian skor karena lebih diarahkan kepada identifikasi faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan untuk digunakan sebagai dasar menetapkan sasaran-sasaran dan perumusan strategi tanpa melakukan pemetaan posisi wilayah terhadap lingkungannya. Dengan demikian strategi yang dirumuskan adalah Strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan wilayah yang dimiliki untuk mengembangkan ekonomi wilayah dimasa yang akan datang. Strategi WO adalah melihat kelemahan yang ada dengan mempertimbangkan peluang di masa yang akan datang. Strategi ST adalah memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi hambatan di masa yang akan datang. Strategi WT yaitu didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman di masa yang akan datang.

1.10 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, posisi penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DALAM KONTEKS KETERKAITAN DESA-KOTA (*RURAL-URBAN LINKAGES*), bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan *rural-urban linkages* serta rangkuman kajian teori.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH BOGOR BARAT DAN KOTA

BOGOR, dalam bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor, yang meliputi kondisi fisik wilayah, kependudukan, perekonomian, dan transportasi

BAB IV ANALISIS KETERKAITAN DESA-KOTA DAN PENGEMBANGAN

EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT, bab ini berisi mengenai analisis keterkaitan ekonomi, analisis keterkaitan fisik dan transportasi, analisis sistem kota dan pusat pelayanan, serta perumusan arahan pengembangan ekonomi wilayah.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, berisi kesimpulan penelitian

dan rekomendasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat.

BAB II

PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DALAM KONTEKS KETERKAITAN DESA-KOTA (*RURAL- URBAN LINKAGES*)

2.1 Paradigma Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan. Konsep pengembangan wilayah berbeda dengan konsep pembangunan sektoral, karena pengembangan wilayah sangat berorientasi pada issues (permasalahan) pokok wilayah secara saling terkait, sementara pembangunan sektoral sesuai dengan tugasnya, bertujuan untuk mengembangkan sektor tertentu, tanpa memperhatikan kaitannya dengan sektor-sektor lainnya (Riyadi, 2002: 47).

Tujuan utama pengembangan wilayah adalah menyeraskan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang ada di dalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Optimal berarti dapat dicapai tingkat kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan dalam alam lingkungan yang berkelanjutan.

Saat ini terdapat perubahan-perubahan struktural dalam ekonomi politik global yang menjadi bagian penting dalam perencanaan wilayah di negara berkembang. Menguatnya hubungan ekonomi lintas batas dan tumbuhnya integrasi ekonomi internasional yang dicirikan dengan mobilitas yang besar dari barang dan jasa serta faktor-faktor produksi yang luas dan intensif dari hubungan ekonomi dunia telah merubah kebijakan dan analisis lingkup tradisional yang berkaitan dengan aliran sumberdaya dan perdagangan internasional. Proses berkembangnya integrasi ekonomi internasional dijelaskan sebagai globalisasi dan regionalisasi (Cook dan Kirkpatrick, 1997: 55). Globalisasi digunakan untuk menjelaskan berbagai kecenderungan, dan didefinisikan sebagai kemajuan yang pesat dari keberagaman hubungan dan keterkaitan di antara negara dan masyarakat untuk membentuk sistem modern. Keputusan dan aktivitas yang dilakukan di suatu wilayah akan membawa konsekwensi kepada individu atau masyarakat di wilayah lainnya.

Menurut Riyadi (2002: 4) bahwa globalisasi ekonomi adalah suatu kondisi dimana batas-batas ekonomi semakin lama semakin menghilang dan peranan negara (baik kewenangan, batas wilayah teritorial, historis dan lain-lain) menjadi kurang berarti dalam konteks perekonomian. Ada beberapa komponen yang berperan penting dalam globalisasi ekonomi yaitu investasi (mengalir ke berbagai belahan dunia), industri (melayani peluang-peluang pasar yang menarik dan memanfaatkan sumberdaya potensial), informasi teknologi (pengendalian dan informasi dari luar wilayah), dan individu (mencari produk sesuai kebutuhan dan keinginan individu).

Implikasi globalisasi bagi negara berkembang adalah bahwa integrasi ekonomi yang semakin dekat akan meningkatkan aliran barang dan jasa serta faktor-faktor produksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan globalisasi akan menghasilkan pembagian tenaga kerja yang lebih baik, memungkinkan negara berkembang menspesialisasikan komoditi yang menyerap tenaga kerja dan menggunakan tenaga kerja dengan lebih produktif. Begitu pula dengan modal yang bergerak bebas dalam kaitannya dengan kesempatan investasi produktif dan karenanya meningkatkan pengembalian modal. Di sisi lain globalisasi juga memberikan dampak yang negatif terutama karena globalisasi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan antar negara, individu dan wilayah (Kumssa, 2001: 57).

Fenomena lain yang terkait dengan globalisasi adalah desentralisasi yang menjadi dua gaya yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Perpaduan antara keduanya telah menghasilkan tidak hanya konflik yang signifikan dalam mengurangi disparitas wilayah saat ini, tetapi juga memunculkan kesempatan yang baik. Kesempatan tersebut sangat relevant dengan dimensi sosial kebijakan wilayah yaitu kesamaan antar *region*, dan dimensi ekonomi yaitu persaingan antar *region* (Hoshino dan Rodriguez, 2001: 193). Desentralisasi mengacu kepada restrukturisasi dan reorganisasi kewenangan politik, fiskal dan administratif. Indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia, kelembagaan, Governance dan kebijakan pemerintah dan manajemen dan

ekonomi mikro (Abdullah et al, 2002: 15). Baiquni (2004: 122) menyatakan semangat yang dikembangkan dalam sistem desentralisasi adalah proses pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan karakteristik wilayah yang terwujud sebagai "pembangunan daerah".

Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, terdapat beberapa konsep perencanaan pembangunan daerah (Mangiri dan Widiati dalam Alkadri dan Djajadiningrat 2002: 101-107):

1. Perencanaan pembangunan daerah berbasis sumberdaya. Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia baik dalam bentuk tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam dan sosial budaya,
2. Perencanaan pembangunan daerah berbasis komoditas unggulan. Pada konsep ini, penggerak utama pembangunan suatu daerah adalah komoditas-komoditas unggul baik di dalam negeri maupun mancanegara,
3. Perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada efisiensi. Penekanan pembangunan bidang ekonomi lebih besar dibandingkan bidang lain dan dijalankan dalam kerangka pasar bebas dan pasar persaingan sempurna (*free market mechanism*) yaitu industri yang efisien akan bertahan dan industri yang tidak efisien akan kalah bersaing,
4. Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pada pelaku pembangunan, mengedepankan pelaku pembangunan di bidang ekonomi, seperti usaha kecil, usaha lembaga sosial, lembaga bukan keuangan (*nonfinancial institution*), lembaga keuangan (*financial institution*) dan pemerintah.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya (Syaukani, 2002: 172). Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya, melalui investasi, proses perijinan, pembangunan infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laode Ida dalam Saragih (2003: 35) mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga esensi dari otonomi daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Artinya dengan otonomi daerah, maka daerah-daerah otonom diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga dimensi budaya. Artinya dengan otonomi daerah masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal. Disinilah pentingnya memikirkan kembali strategi pembangunan secara mendasar, yakni pada upaya membangun ekonomi berbasis komunitas lokal. Pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kesempatan untuk munculnya prakarsa ekonomi lokal.

Konsep pengembangan ekonomi lokal berusaha mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen *endogenous development* dalam kehidupan

sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas. Guimaraes (1998: 63) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal menekankan pada kebijakan "*endogenous development*" yang menggunakan potensi sumberdaya manusia lokal, institusi dan sumberdaya alam. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pembangunan ekonomi lokal juga berhubungan dengan "*intraregional planning*" yang terkait dengan organisasi ekonomi dan ruang di dalam wilayah khususnya melalui keputusan-keputusan yang bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pembangunan wilayah yang berdampak terhadap lokasi, infrastruktur dan aktivitas ekonomi di dalam wilayah.

Pembangunan ekonomi lokal berkenaan dengan proses dimana pemerintah daerah dan organisasi berbasis masyarakat bersatu untuk mendorong atau memelihara aktivitas ekonomi atau tenaga kerja. Salah satu tujuan dari pengembangan ekonomi lokal adalah memperkuat posisi kompetitif wilayah dan lokalitas dengan mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan alam (Blakely, 1994: 42).

Pembangunan ekonomi wilayah dan daerah (*Local and Regional Economic Development/L&RED*) adalah rangkaian aktivitas yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu area. Di beberapa tempat aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dan dibiayai oleh masyarakat, yayasan penyanggah dana atau sektor swasta, tetapi umumnya pemerintah merupakan pendorong bagi tumbuhnya kemitraan berbagai pelaku (Beer et al, 2003: 5)

2.2 Konsep Pengembangan Ekonomi Wilayah

2.2.1 Konsep Wilayah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif disebut wilayah pemerintahan. Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional disebut kawasan. Kawasan meliputi kawasan perdesaan dan perkotaan.

Wilayah adalah sebuah batasan ruang geografis tanpa batasan yang pasti, sedangkan *region* adalah ruang geografis yang menunjukkan keterlibatan ruang (spatial) dari beberapa daerah administratif, baik sebagian maupun seluruhnya (Abdurahman, 2005: 7).

Glasson (1978:37) mengemukakan konsep tentang wilayah melalui dua *fase* metode pengklasifikasian yang berbeda dan mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana kesistem industri yang kompleks. Pada *fase* pertama memperlihatkan wilayah formal, berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Sedangkan *fase* yang kedua memperlihatkan perkembangan wilayah fungsional yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Menurut Richardson (1979: 19), wilayah formal terbentuk karena adanya kesamaan (*homogenitas*) secara ekonomi, keadaan geografi, dan sosial politik.

Dalam konsep wilayah homogen, hubungan wilayah yang didasari oleh keterkaitan ekonomi, lebih penting dari pada perbedaan intraregional. Sedangkan wilayah nodal (*polarized*) tersusun dari kota besar, kota kecil dan desa yang berkaitan secara fungsional berdasar pada aktivitas ekonomi wilayah.

Konsep wilayah nodal yang merupakan bagian dari konsep wilayah fungsional/sistem didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti (Rustiadi at al, 2004: II-10). Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau permukiman yang dikelilingi oleh beberapa inti kecil dari sub wilayah, sedangkan plasma adalah daerah belakang (*periphery/hinterland*) yang mengelilingi wilayah inti utama dan inti sub wilayah, dengan sifat-sifat dan hubungan fungsional tertentu. Pusat wilayah berfungsi sebagai :

1. tempat terkonsentrasinya penduduk (permukiman)
2. sebagai pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*
3. pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri,
4. sebagai lokasi pemusatan industri manufaktur (*manufactory*) diartikan sebagai kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu *output* tertentu.

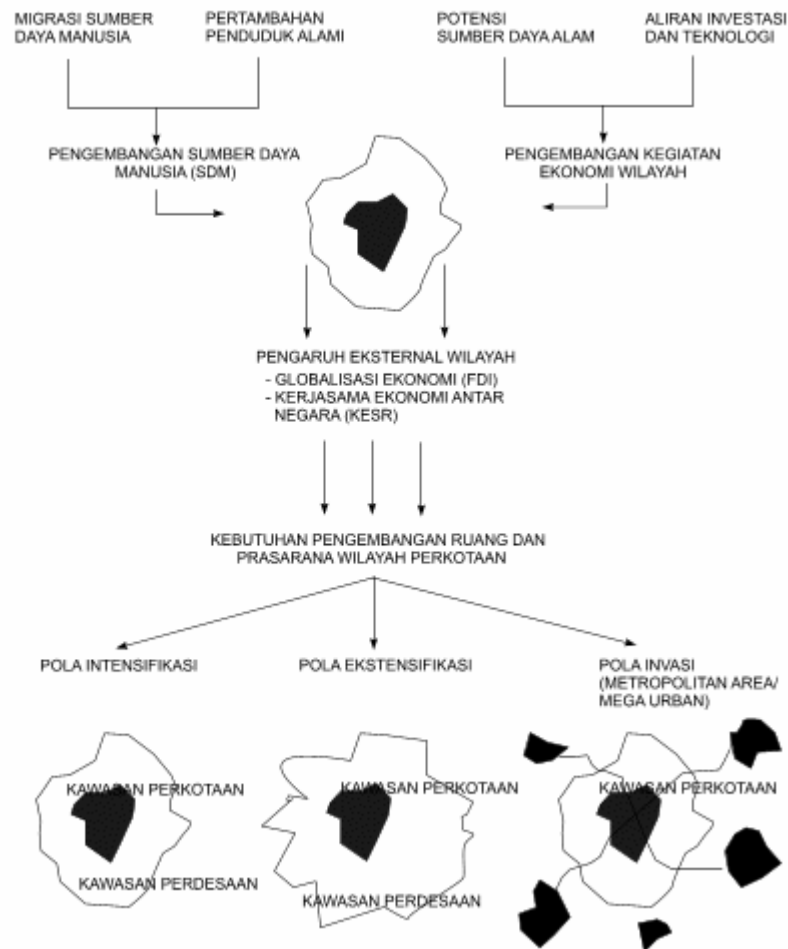
Hinterland berfungsi sebagai :

1. pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku.
2. pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan *comuting* (penglaju).
3. sebagai daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur,
4. penjaga keseimbangan ekologis.

Perkembangan suatu wilayah dimungkinkan terjadi, karena adanya aliran masuk investasi ke suatu wilayah dengan didukung oleh sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Salah satu indikator bahwa sebuah wilayah mengalami perkembangan adalah adanya aliran investasi, barang dan jasa (Riyadi dalam Ambardi dan Prihawantoro, 2002: 56).

Suatu wilayah dapat berkembang, erat kaitannya dengan potensi dan faktor pendukung yang ada pada wilayah tersebut. Faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah adalah faktor internal yang meliputi potensi sumber daya alam, manusia dan teknologi atau metode penanganan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengesampingkan fungsi ekologis suatu wilayah, serta faktor eksternal seperti kebijakan dari pemerintah daerah yang mempunyai hierarki lebih tinggi yang membatasi wilayah dalam suatu batasan administratif.

Di samping pengaruh faktor internal tersebut, terdapat faktor eksternal lainnya (globalisasi ekonomi dan kerjasama antar negara/wilayah) dalam bentuk masuknya investasi asing (*FDI : Foreign Direct Investment*) ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi serta adanya kerjasama antar negara atau wilayah (KESR : Kerjasama Ekonomi Sub Regional) dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini mempengaruhi perkembangan suatu wilayah yang tercermin dalam kebutuhan pengembangan ruang dan prasarana dan sarana wilayah/perkotaan. Kebutuhan tersebut pada akhirnya mempengaruhi perkembangan wilayah baik secara intensifikasi, ekstensifikasi dan invasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.

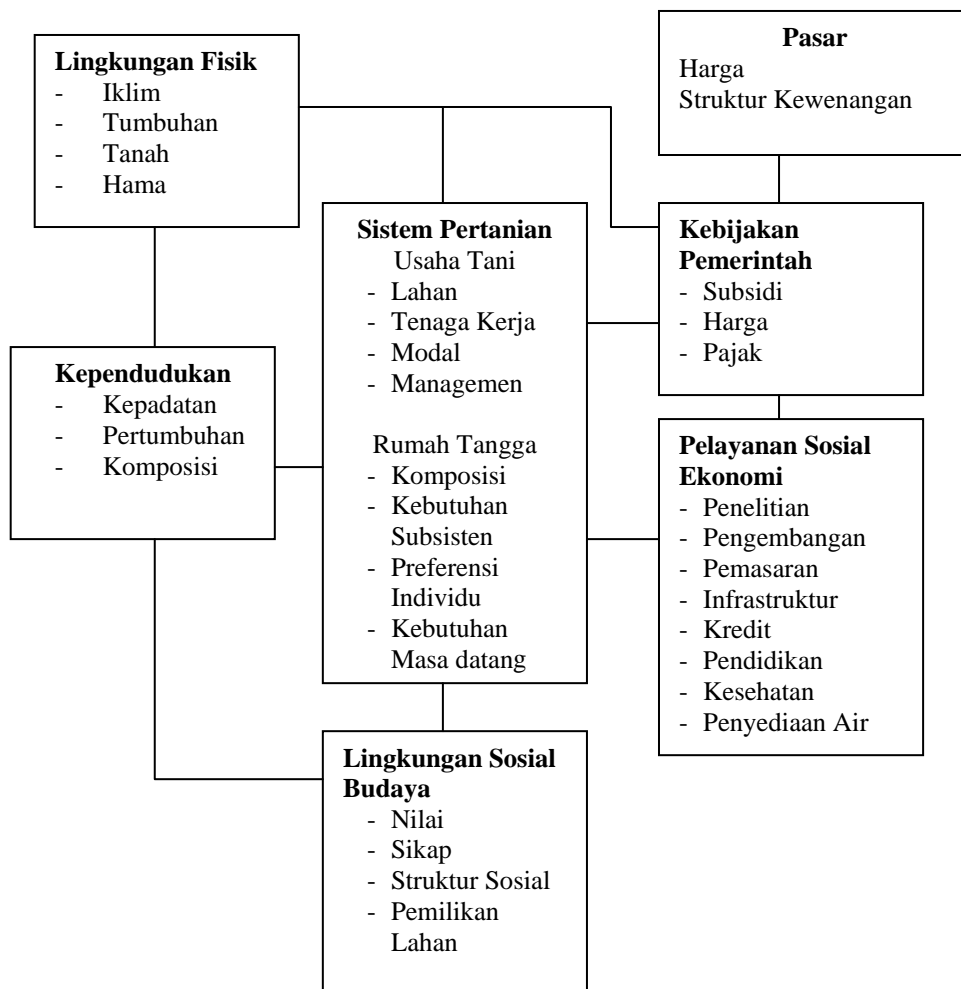


Sumber : Riyadi dalam Ambardi dan Prihawantoro, 2002

GAMBAR 2.1
PROSES PERKEMBANGAN SUATU WILAYAH

Dalam kaitannya dengan analisis profile wilayah (analisis sumberdaya wilayah), terdapat beberapa pandangan tentang wilayah dilihat berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, kependudukan dan fisik. Salah satu pandangan tentang wilayah, khususnya di negara-negara yang memiliki wilayah pedesaannya masih sangat dominan, maka wilayah dapat diartikan sebagai wilayah pertanian (*Agricultural Production System*). Kebijakan dan program pengembangan wilayahnya akan memfokuskan pada peningkatan *output* dan efisiensi usaha pertanian (Rondinelli, 1985: 51).

Usaha pertanian dan rumah tangga petani merupakan unit dasar aktivitas yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik, karakteristik kependudukan, faktor sosial budaya, tingkat pelayanan sosial ekonomi, dan kondisi pasar mengenai harga dan perdagangan seperti harga di tingkat nasional dan kebijakan yang mendukungnya. Formulasi dan pelaksanaan kebijakan akan difokuskan pada pengelolaan input yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan wilayah. Secara diagramatis seperti pada Gambar 2.2.



Sumber : Rondinelli, 1985

GAMBAR 2.2
WILAYAH SEBAGAI SISTEM PRODUKSI PERTANIAN

Pandangan lainnya tentang wilayah adalah wilayah sebagai kawasan pusat-pinggiran (*Core-Periphery Areas*), yang memandang wilayah sebagai rangkaian hubungan sosial ekonomi antara pusat-pusat perkotaan (*core urban centers*) dengan wilayah pedesaan (*peripheral rural areas*). Friedmann dalam Rondinelli (1985: 51) mengklasifikasikan wilayah dan kawasan di dalamnya dengan berbagai indikator yang menentukan hubungan di antara keduanya dalam ekonomi ruang (*space-economy*) yang lebih besar. Kawasan pusat (*core area*) merupakan kawasan yang memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan dan mendorong penyebaran inovasi pembangunan. Kawasan ini memiliki satu atau beberapa kota dan di sekitarnya merupakan wilayah pedesaan.

2.2.2 Teori Pengembangan Wilayah

Beberapa teori pengembangan wilayah yang terkait dengan kajian studi ini adalah sebagai berikut :

A. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Teori tempat sentral bermaksud menghubungkan tempat sentral dengan daerah belakangnya dan mendefinisikan tempat sentral sebagai suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah belakangnya. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1933 oleh Christaller (Adisasmita, 2005: 51) yang merintis analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistem wilayah baik secara fisik ataupun ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatan-kegiatan produksi dan daerah-daerah perkotaan secara hirarkis.

Secara horizontal, model Christaller menunjukkan kegiatan-kegiatan manusia yang tersusun dalam tata ruang geografis. Tempat-tempat sentral (pusat-

pusat) yang lebih tinggi ordenya mempunyai wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas. Tempat-tempat sentral kecil dan wilayah-wilayah komplementernya tercakup dalam wilayah-wilayah perdagangan dari pusat-pusat yang lebih besar. Secara vertikal, model tersebut memperlihatkan keterkaitan dalam pelayanan antara tempat sentral yang lebih tinggi ordenya dan tempat-tempat sentral yang lebih rendah ordenya. Sedangkan Losch mengembangkan modelnya mulai dari bawah yaitu wilayah spasial yang tersempit ruang lingkungannya. Mula-mula wilayah perdagangan berbentuk wilayah pasar sederhana, kemudian berkembang menjadi suatu jaringan wilayah pasar, dan akhirnya membentuk sistem wilayah pasar (Adisasmita, 2005: 53).

Meskipun model tempat sentral memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti tidak menjelaskan pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan gejala-gejala (fenomena) pembangunan dan sebagainya, tetapi sedikitnya memiliki tiga konsep fundamental (Richardson dalam Adisasmita, 2005: 57) yaitu konsep ambang (*threshold*), lingkup (*range*) dan hirarki (*hierarchy*). Proses penyebaran pertumbuhan mengikuti pola ambang (jumlah penduduk) dan pola lingkup (sistem lokasi). Kedua faktor tersebut menentukan hirarki tempat sentral. Konsep-konsep ini merupakan unsur-unsur susunan spasial yang penting dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan formal permintaan dan wilayah-wilayah perdagangan atau wilayah-wilayah pelayanan.

Sumbangan positif teori tempat sentral adalah bahwa teori tersebut relevan bagi perencanaan kota dan wilayah, karena sistem hirarki merupakan sarana yang efisien untuk perencanaan wilayah. Tempat sentral besar merupakan

titik pertumbuhan inti di wilayahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi ke seluruh wilayah. Dengan demikian distribusi tata ruang dan besarnya pusat-pusat kota merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur wilayah-wilayah nodal dan kemudian melahirkan konsep-konsep dominasi dan polarisasi. Teori tempat sentral mengemukakan model yang mudah dimengerti untuk menjelaskan pertumbuhan hirarki kota dan ketergantungan antara pusat-pusat kota dengan wilayah-wilayah di sekitarnya (Adisasmita, 2005: 58).

B. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Teori ini pertama kali disampaikan oleh Francois Perroux, seorang ahli ekonomi Perancis yang menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di semua wilayah, akan tetapi terbatas hanya pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya.

Menurut Perroux terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pandangan Perroux mengenai proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries atau industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya. Nampaknya Perroux lebih menekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan (Adisasmita, 2005: 61)

Dalam kaitannya dengan kutub-kutub pertumbuhan, maka konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografiknya dapat didefinisikan sebagai berikut (Glasson, 1978: 155):

1. Konsep "*leading sector*" (*industrie motrice*) dan perusahaan-perusahaan propulsip, menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam "*leading industries*" yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya.
2. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari "*leading industries*" ("*propulsive growth*") mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Implisit dalam proses polarisasi ini adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi.
3. Konsep "*spread effect*" menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya.

Meskipun ada beberapa perbedaan penekanan arti industri pendorong, akan tetapi ada tiga ciri dasarnya yang dapat disebutkan, yaitu sebagai berikut:

1. Industri pendorong harus relatif besar kapasitasnya agar mempunyai pengaruh yang kuat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Industri pendorong harus merupakan sektor yang berkembang dengan cepat.
3. Jumlah dan intensitas hubungannya dengan sektor-sektor lainnya harus penting sehingga besarnya pengaruh yang ditimbulkan dapat diterapkan kepada unit-unit ekonomi lainnya.

Dilihat secara tata ruang geografis, industri-industri pendorong dan industri-industri yang dominan mendorong terjadinya aglomerasi-aglomerasi pada kutub-kutub pertumbuhan tempat industri-industri tersebut berada. Jelaslah bahwa

industri pendorong mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Industri-industri besar akan mampu meletakkan dasar pertumbuhan pendapatan ekonomi bagi daerahnya dan pusat utama pertumbuhan ekonomi terdapat pada tempat-tempat yang memiliki industri berat dan berkapasitas tinggi dan industri kimia.

Salah satu dasar teori kutub pertumbuhan ekonomi adalah ide yang menjelaskan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai sumber dan mendapat rangsangan yang terus menerus dari kegiatan industri besar. Pada dasarnya pemikiran semacam ini berasal dari teori dominasi. Beberapa kritik terhadap teori kutub pertumbuhan adalah sebagai berikut (Adisasmita, 2005: 62):

1. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa besarnya suatu industri itu sendiri tidak cukup menjamin pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh di Perancis dibangun industri besi, tetapi tidak diikuti oleh pembangunan industri-industri lainnya yang membutuhkan besi tersebut sebagai masukannya.
2. Dalam konsep pertumbuhan tidak seimbang (*unbalanced growth*) Hirschman telah memperkenalkan kegiatan-kegiatan pendorong (*propulsive*). Investasi dalam industri yang strategis akan menimbulkan kesempatan investasi baru dan memperkuat pembangunan ekonomi selanjutnya. Namun penggabungan konsep *unbalanced growth* dengan teori *growth pole* hasilnya tidak sukses. Misalnya di negara-negara Afrika, industri-industri pendorong tidak mampu memenuhi peranannya karena persoalan yang sama dengan negara maju dan terbatasnya jumlah wiraswasta (*entrepreneur*).

3. Kedudukan industri pendorong seringkali diartikan terlalu berlebihan (*overestimated*). Boudeville mengemukakan contoh keadaan di Denmark. Negara tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai suatu wilayah yang independen dimana proses pertumbuhan ekonominya dapat berkembang cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemakmuran negara tersebut tidak dimulai oleh industri-industri pendorong tetapi didukung oleh usaha-usaha kooperatif dari unit-unit usaha pertanian kecil yang tersebar di seluruh negeri.
4. Teori kutub pertumbuhan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai proses aglomerasi, yaitu terkonsentrasinya industri-industri pada suatu daerah. Vernon memperlihatkan bahwa industri-industri yang tertarik berkonsentrasi di suatu tempat oleh karena penghematan eksternal yang diberikan oleh kota-kota besar, bukan karena sifat-sifat oligopolistis industri pendorong.

C. Model Gravitasi

Model-model gravitasi telah dipergunakan secara luas dalam proses perencanaan ekonomi regional dan studi transportasi. Gaspersz (1990: 109) menyatakan bahwa dalam perencanaan regional, gaya tarik antara kedua benda dianalogikan dengan gaya tarik (interaksi) antara dua daerah *i* dan *j*, kemudian masa benda dianalogikan dengan sifat yang sesuai untuk daerah itu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kesempatan kerja yang ada dan sebagainya yang menjadi faktor penarik di antara dua daerah *i* dan *j*, sedangkan jarak antara kedua benda dianalogikan dengan jarak antara kedua daerah *i* dan *j* (km, mil atau kadang-kadang dipergunakan ukuran ekonomi seperti ongkos transportasi dan

sebagainya). Interaksi antara kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lain sebagai produsen dan konsumen beserta barang-barang yang diperlukan, menunjukkan adanya gerakan (*movement*). Produsen sesuatu barang pada umumnya terletak di sebuah tempat tertentu dalam ruang geografi (*geographical space*), sedang para langganannya tersebar dengan rentang jarak di sekitar produsen sehingga diperlukan gerakan terlebih dahulu (Bintarto, 1989: 86).

Frekuensi gerakan antara produsen dan para langganannya dipengaruhi oleh prinsip optimasi, oleh persyaratan "*reshold*" atau oleh saingan-saingan yang ada dan jarak. *Threshold* adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan, dalam hal ini, pemakai yang dijadikan dasar perhitungan untuk mendirikan sesuatu unit usaha (Toyne dan Newby dalam Bintarto, 1989: 86). Bintarto selanjutnya menyatakan efek jarak terhadap gerakan ini telah dikenal masyarakat secara intuisi untuk segala tingkat perkembangan. Pelbagai interaksi menimbulkan pelbagai lapangan interaksi (*interaction field*). Luas sempitnya areal interaksi tergantung pada tinggi rendahnya *reshold*, padat tidaknya satu kawasan, dan perbedaan kultur, daya beli penduduk dan sebagainya. Dengan demikian fungsi orde tinggi mempunyai areal interaksi lebih luas dari pada fungsi orde rendah. Limit yang menghalangi pemakai dan para pelanggan memang banyak, tetapi yang utama adalah unsur jarak.

2.2.3 Konsep Pengembangan Ekonomi Wilayah

Perencanaan regional pada umumnya disusun berdasarkan pertimbangan pengembangan kegiatan ekonomi pada wilayah (*region*) tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk perencanaan spasial

(*spatial planning*), terutama dalam menentukan lokasi-lokasi dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini pada dasarnya merupakan gabungan dari berbagai kegiatan sektoral. (Soegijoko, 1997: 396). Lebih spesifik mengenai ekonomi wilayah, bangun teori ekonomi merupakan derivasi teori ekonomi dengan memasukan unsur-unsur ruang terutama aspek interaksi antar kegiatan (Haeruman dalam Soegijoko, 1997: 248).

Menurut Tukiyat dalam Ambardi dan Prihawantoro (2002: 123), pengembangan ekonomi wilayah adalah suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependensi dan interaksi antara sistem ekonomi (*economy system*), sistem masyarakat (*sosial system*), dan lingkungan hidup (*environment*), serta sumber daya alam (*ecosystem*). Konsep pengembangan ekonomi wilayah selain dapat menjamin keserasian pengembangan antar daerah, juga menjembatani hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Tujuan pengembangan ekonomi wilayah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas regional.

Dalam ekonomi wilayah terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan (Tukiyat dalam Ambardi dan Prihawantoro, 2002: 133-134) :

1. Sumberdaya: yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, yang merupakan kekuatan bagi wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis sumberdaya ekonomi wilayah difokuskan pada pemanfaatan sumberdaya yang lebih optimal, sedangkan analisis sumberdaya

manusia pada potensi/kemampuan kreativitas dan inovasi yang ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan.

2. Lokasi: pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan mutunya tetapi juga oleh lokasi dan sistem tata ruang. Tingkat efisiensi suatu kegiatan ditentukan oleh posisi relatif lokasi lainnya seperti permukiman sebagai pemasok tenaga kerja, transportasi, dan sarana pelayanan.
3. Ekonomi Wilayah: pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan oleh keragaman dan besarnya inovasi, ekonomi, pengenalan, penciptaan, pemanfaatan keunggulan kompetitif, tingkat perkembangan struktur perekonomian wilayah dan kemampuan meramal mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi persaingan sempurna, suatu wilayah akan menspesialisasikan diri pada kegiatan dimana sumberdaya wilayah memiliki keunggulan kompetitif. Spesialisasi wilayah akan mendorong perdagangan antar wilayah, yang pada gilirannya mampu memberikan pertumbuhan ekonomi wilayah lebih lanjut secara efektif dan efisien.
4. Kelembagaan: peranan kelembagaan pada pengembangan ekonomi wilayah menyangkut bukan hanya organisasi, tetapi juga tata nilai dan norma perilaku di dalam pembangunan. Efisiensi dan efektivitas dalam distribusi hasil-hasil pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh *performance* (kinerja) kelembagaan yang ada seperti pemerintah dan masyarakat lainnya.

Dalam teori *resources endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki

dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu (Perloff dan Wingo dalam Soegijoko, 1997: 222). Dalam jangka pendek, sumberdaya yang dimiliki suatu daerah merupakan suatu aset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Suatu sumberdaya menjadi berharga jika dapat dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk produksi. Teori *resource endowment* secara implisit mengasumsikan bahwa dalam perkembangannya, sumberdaya yang dimiliki suatu wilayah akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang berbeda bila terjadi perubahan permintaan.

Kemampuan sumberdaya tersebut akan lebih menguntungkan apabila mampu diekspor ke luar wilayah. Dalam teori *export base* atau teori *economic base*, yang pertama kali dikembangkan oleh Douglass C. North pada tahun 1995 (Soegijoko, 1997: 223), yang menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditi ekspor. Dengan kata lain permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor pelayanan).

Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumberdaya yang unik untuk memproduksi barang dan jasa, mempunyai pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya,

perekonomian wilayah cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang menguntungkan dalam sektor ekspor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah.

2.3 Keterkaitan Desa-Kota (*Rural- Urban Linkages*)

Pendekatan Pembangunan Berbasis Permintaan meyakini bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luas (*broad-base*) suatu daerah minimal harus memiliki dua kondisi berikut (Arifin, 2004: 123) :

1. daerah tersebut harus mampu dan berhasil dalam memasarkan produk (barang dan jasanya) ke wilayah lain dalam suatu negara atau ekspor ke luar negeri.
2. penerimaan ekspor itu harus menghasilkan dampak ganda atau perputaran tambahan pendapatan dalam perekonomian daerah, minimal melalui pembelian faktor produksi dan pengeluaran rumah tangga terhadap barang konsumen oleh segenap aktor ekonomi.

Kedua prakondisi ini dapat terjadi apabila suatu daerah memiliki suatu keterkaitan yang efisien yang menghubungkan daerah perdesaan dan perkotaan (*rural-urban linkages*). Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan berbasis pasar (*market-driven*) karena orientasi utamanya adalah untuk memperbaiki akses pasar, atau menciptakan pasar. Fokus pendekatan ini salah satunya adalah dengan cluster komoditas (*commodity cluster*), yang menerapkan suatu kombinasi strategi keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus.

Suatu wilayah tidak hanya merupakan sistem permukiman secara fungsional tetapi juga merupakan suatu jaringan dari interaksi fisik, ekonomi dan sosial. Proses interaksi tersebut dibentuk oleh adanya keterkaitan (*linkages*) di antara permukiman. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan fisik, ekonomi, penduduk, teknologi, sosial, pelayanan dan organisasi (Randinelli, 1985: 143), seperti dalam Tabel II.1.

Keterkaitan fisik memiliki elemen prasarana transportasi dan lingkungan sedangkan keterkaitan ekonomi meliputi pola pasar, aliran barang, modal, pendapatan, komoditi antar wilayah dan sektor, keterkaitan produksi, pola belanja dan konsumsi serta pola kepemilikan kegiatan ekonomi. Keterkaitan pergerakan penduduk dapat dilihat dengan adanya migrasi baik secara temporer maupun permanen serta adanya perjalanan penduduk ke tempat kerja. Sementara itu keterkaitan teknologi meliputi ketergantungan teknologi, sistem irigasi dan telekomunikasi. Keterkaitan sosial terdiri dari pola kunjungan dan pola kekerabatan, aktivitas ritual dan keagamaan serta keterkaitan antar kelas masyarakat. Keterkaitan pelayanan dapat digambarkan dengan adanya jaringan dan aliran energi, keuangan dan kredit, pendidikan, pelayanan kesehatan, profesional, komersial dan pelayanan sistem transportasi. Sementara itu keterkaitan organisasi meliputi aliran anggaran pemerintah, ketergantungan organisasi dan lain-lain.

Linkages dapat diartikan sebagai segala bentuk keterkaitan baik berupa *flow* (aliran) dan interaksi (*interaction*) yang dapat terjadi antara desa dan kota. Menurut Douglass (1998:26), keterkaitan desa-kota (*rura-urban linkages*) dapat

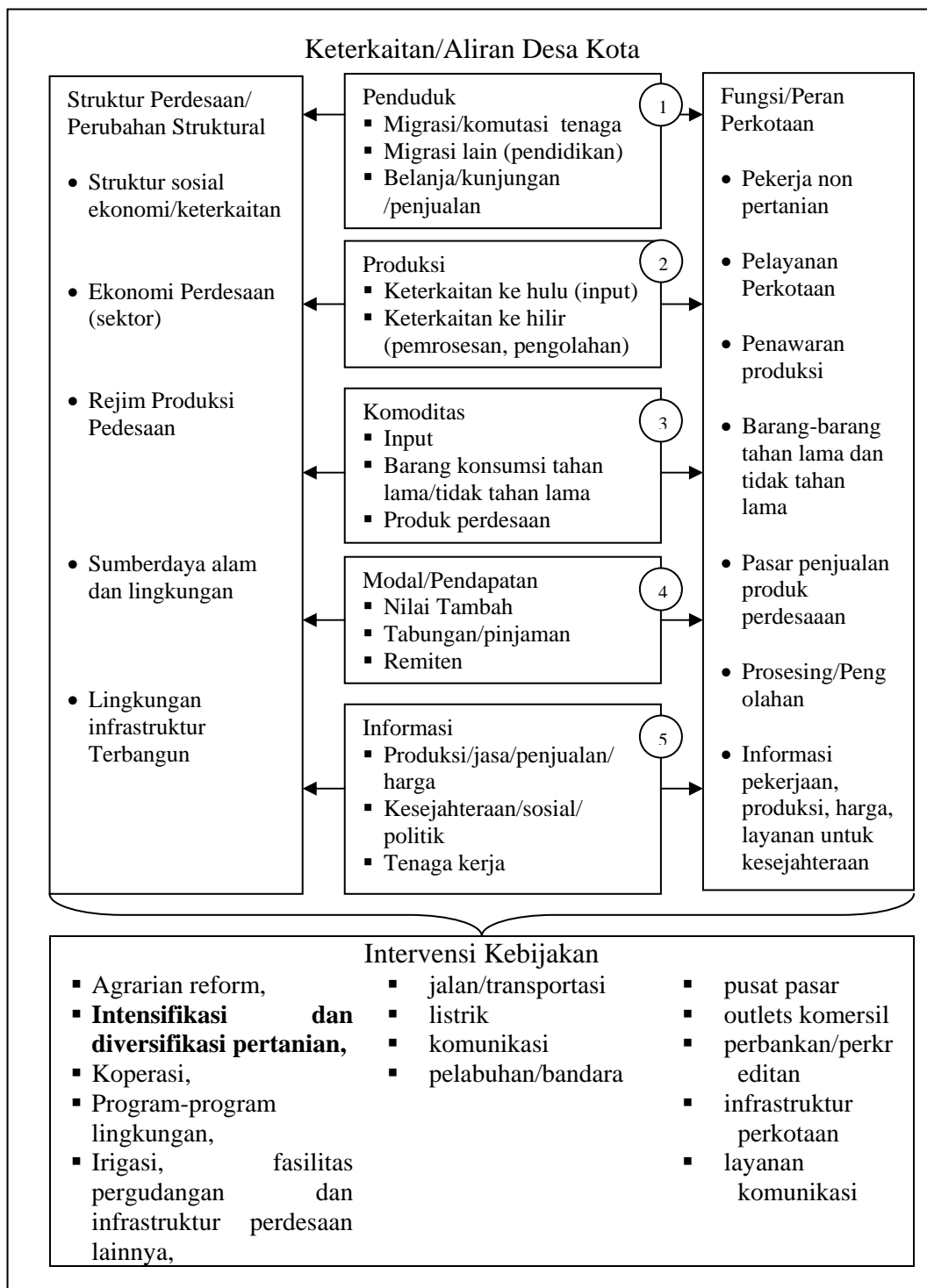
dilihat dari lima type aliran, yaitu (1) orang/penduduk, (2) produksi, (3) komoditas, (4) modal dan (5) informasi, seperti terlihat pada Gambar 2.3.

TABEL II.1

KETERKAITAN UTAMA DALAM PENGEMBANGAN SPASIAL

Tipe	Elemen
Keterkaitan Fisik	Jaringan jalan Jaringan transportasi air dan sungai Jaringan kereta api Ketergantungan ekologis
Keterkaitan Ekonomi	Pola Pasar Aliran bahan baku dan barang setengah jadi Aliran modal Keterkaitan produksi → <i>backward, forward</i> dan <i>lateral</i> Pola belanja dan konsumsi Pola kepemilikan kegiatan ekonomi Aliran pendapatan Aliran komoditi antar wilayah dan sektor ” <i>Cross Linkages</i> ”
Keterkaitan Pergerakan Penduduk	Migrasi → Temporer dan Permanen Perjalanan ke tempat kerja
Keterkaitan Teknologi	Ketergantungan teknologi Sistem Irigasi Sistem Telekomunikasi
Keterkaitan Sosial	Pola kunjungan Pola kekerabatan Aktivitas rite, ritual dan agama Keterkaitan antar kelas masyarakat
Keterkaitan Pelayanan	Jaringan dan aliran energi Jaringan keuangan dan kredit Jaringan pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sistem pelayanan kesehatan Pola Pelayanan profesional, komersial dan teknis Sistem pelayanan transportasi
Keterkaitan Politik, administrasi dan organisasi	Hubungan struktural Aliran anggaran pemerintah Ketergantungan organisasi Pola Kewenangan-Penilaian-Pengawasan Pola transaksi antar wilayah hukum Rantai keputusan politik informal

Sumber : Rondinelli, 1985



Sumber : Douglas, 1998

GAMBAR 2.3
PROSES PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN :
STRUKTUR, ALIRAN DAN INTERVENSI KEBIJAKAN

Aliran penduduk dapat berupa migrasi atau komuter dan tujuan lainnya seperti untuk melanjutkan pendidikan, belanja, kunjungan dan penjualan berbagai produk yang dihasilkan. Aliran produksi meliputi keterkaitan terhadap produksi hulu dan hilir untuk prosesing dan pengolahan. Aliran komoditi berupa bentuk-bentuk produk perdesaan dan konsumsi barang yang tahan lama maupun tidak tahan lama.

Aliran pendapatan/modal dapat berupa nilai tambah dari hasil penjualan, adanya tabungan dan penyaluran kredit, serta kembalinya dana ke wilayah perdesaan dari hasil pendapatan buruh migran.

Sedangkan aliran informasi dapat berupa bentuk-bentuk informasi mengenai produksi, penjualan, kesejahteraan dan kesempatan tenaga kerja. Dari aliran tersebut maka diperlukan adanya campur tangan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan mendapatkan keuntungan dengan mempertimbangkan pula hubungan sosial ekonomi perdesaan, produksi, kelembagaan dan lingkungan.

Sementara itu menurut Bendavid-Val (1991:141) keterkaitan antar wilayah (*regional linkages*) meliputi keterkaitan transportasi, komunikasi, *natural resources*, ekonomi, sosial, pelayanan umum dan institusi seperti ditunjukkan pada Tabel II.2. Kategori keterkaitan antar wilayah dapat pula dipertimbangkan untuk melihat keterkaitan antara desa-kota yang memiliki elemen keterkaitan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa keterkaitan yang dikemukakan memiliki kesamaan terutama dilihat dari elemen yang menunjangnya seperti elemen sumberdaya alam (fisik), transportasi, aliran komoditi dan modal, komunikasi, sistem anggaran dan sebagainya.

TABEL II.2**KATEGORI KETERKAITAN ANTAR WILAYAH**

Kategori Keterkaitan	Elemen
Transportasi	Jaringan jalan, sungai dan pelabuhan udara Infrastruktur jaringan transportasi dan lain-lain
Komunikasi	Jaringan telegram, koran dan lain-lain Jaringan infrastruktur dan lain-lain
Natural Resources	Sungai, drainase, arah angin, zona iklim dan hasil buatan seperti jaringan irigasi dan lain-lain
Ekonomi	Rantai aliran produk barang jadi dan setengah jadi Keterkaitan produksi Pola belanja konsumen Pola kepemilikan kegiatan ekonomi Aliran pendapatan (transfer dan remiten) Aliran modal Sistem finansial formal dan informal Migrasi musiman
Sosial	Kelompok etnis dan agama Pola kekerabatan Keterkaitan antar kelas masyarakat
Pelayanan Umum	Jaringan utilitas Jaringan pendidikan dan pelatihan Sistem diseminasi informasi dan hasil penelitian Pelayanan transportasi perseorangan Keterkaitan pelayanan kesehatan
Institusi	Keterkaitan Pemerintah Sistem anggaran sesuai tingkatan pemerintah Pola kewenangan

Sumber : Bendavid-Val, 1991

Rondinelli (1985:148) menyatakan metode untuk mengidentifikasi dan menilai keterkaitan permukiman dalam pendekatan UFRD (*Urban Function In Rural Development*) di antaranya adalah analisis pusat pasar, analisis fisik dan transportasi dan analisis wilayah pelayanan.

A. Analisis Pusat Pasar

Bromely dalam Rondinelli (1985:148) menyatakan pasar adalah kumpulan pembeli dan penjual komoditi yang bertemu pada suatu lokasi secara reguler dari

harian sampai bulanan. Pusat pasar merupakan suatu pusat permukiman dengan satu atau lebih pasar setiap minggunya. Mengingat penduduk berasal dari wilayah sekitarnya untuk berjualan atau berkunjung ke pusat pasar, pola perdagangan pasar merupakan keterkaitan dan indikator penting "wilayah pelayanan" dari pusat. Di wilayah dengan sistem pasar yang baik, hirarki permukiman sering sesuai dengan hirarki pusat pasarnya. Analisis pusat pasar meliputi penyusunan daftar pusat pasar dan hari pasar, pemetaan pusat pasar dan mengklasifikasikannya sesuai ukuran dan periode waktu pasar, pengukuran aktivitas pasar dan menentukan wilayah pengaruh pusat pasar. Salah satu informasi yang penting dalam analisis pusat pasar ini adalah asal dan tujuan komoditi yang diperjualbelikan di lokasi pasar dan hubungan dengan pasar lainnya.

B. Analisis Fisik dan Transportasi

Rondinelli (1985:160-161) menyatakan keterkaitan transportasi merupakan hal yang paling penting dalam menghubungkan antar permukiman di dalam suatu wilayah dan memberikan kemudahan bagi penduduk pedesaan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kota. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah :

1. Kepadatan jaringan jalan, panjang kilometer jalan dalam kilometer persegi lahan/wilayah.
2. Kebutuhan akses penduduk pedesaan.
3. Kualitas dari jaringan jalan, memperluas kemudahan bagi pelayanan dan pemasaran di pusat permukiman.

4. Jarak rata-rata antar permukiman dan penduduk terhadap jalan.
5. Klasifikasi jaringan jalan; jalan nasional, jalan regional dan jalan lokal.
6. Moda transport (jenis kendaraan) dan kesesuaiannya;
7. Kondisi jaringan jalan (jenis perkerasan) dan tingkat pemeliharaan;
8. Asal dan tujuan lalu lintas komoditi dan penduduk.

Infrastruktur merupakan modal penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memberikan kemudahan terhadap faktor-faktor produksi. Salah satu infrastruktur yang mendukung adalah transportasi yang memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, sebaliknya apabila mengabaikannya akan menurunkan produktivitasnya (Dikun, 2003: 10).

Dalam konsep kawasan strategis dan cepat tumbuh, infrastruktur diasumsikan sebagai “*enabler*” yang memungkinkan berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi. Paradigma ini membuka peluang infrastruktur untuk berperan secara lebih terfokus untuk pengembangan kawasan. Di sisi lain, kesenjangan pertumbuhan desa-kota yang menyebabkan terjadinya urbanisasi berujung pada pentingnya memperhatikan pedesaan sebagai suatu wilayah ekonomi dan sosial. Solusi untuk mengatasi disparitas ini cukup jelas, yaitu produktivitas kegiatan ekonomi pedesaan harus ditingkatkan. Infrastruktur berperan besar terhadap pembangunan pedesaan karena tingkat kesejahteraan di desa tergantung pada

akses terhadap infrastruktur, seperti jalan, air bersih dan listrik. Format kebijakan infrastruktur di masa depan akan diwarnai oleh aspek pengembangan wilayah. Artinya untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa dalam kerangka perspektif pengembangan wilayah (Dikun, 2003: 49). Pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah (Sutami dalam Akil, 2006: 2).

C. Analisis Pusat Pelayanan

Dalam pengembangan kawasan yang mempertimbangkan *rural-urban linkages* dapat dikemukakan adanya konsep integrasi fungsional-spasial yang diartikan sebagai suatu pendekatan dengan mengembangkan sistem pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran dan karakteristik fungsional secara terpadu (Rustiadi et al, 2006: 9). Sistem seperti ini diharapkan dapat lebih mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan regional yang jauh lebih luas. Diyakini pula, bahwa untuk pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, stimulan dari pengembangan regional harus dimulai dari pendekatan pertanian dibandingkan pengembangan industri.

Berkaitan dengan sistem pusat-pusat pertumbuhan, Rustiadi at al, (2004 : II-10) menyatakan dalam konsep wilayah nodal, pusat atau hinterland suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas serta jumlah penduduk. Metode yang digunakan untuk menentukan hirarki wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan dan karakteristik permukiman adalah metode skalogram (Rondinelli, 1985: 106). Metode skalogram dapat digunakan untuk menentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan.

Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki *ranking* tertinggi adalah lokasi yang dapat menjadi pusat pelayanan. Berdasarkan analisis ini dapat ditentukan prioritas pengadaan sarana dan prasarana di setiap unit wilayah yang dianalisis. Indikator yang digunakan dalam analisis skalogram adalah jumlah penduduk, jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang dimiliki masing-masing kota.

2.4 Strategi Pengembangan

Keanekaragaman informasi dari suatu kegiatan akan memberikan banyak peluang dalam menentukan suatu strategi perencanaan atau pengembangan. Salah satu analisis yang dapat digunakan dalam membuat suatu strategi adalah Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Rangkuti (2001:18-19) menyatakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategi (Marimin, 2004: 58). Menurut Kuncoro (2006: 51), pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang, serta mengantisipasi ancaman.

Selanjutnya Rangkuti (2001: 21) menyatakan bahwa proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan. Tahap pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengumpulan data tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis, pada tahap ini data dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. Model yang digunakan dalam tahap ini terdiri dari tiga yaitu matrik faktor strategi eksternal, matrik faktor strategi internal dan matrik profil kompetitif. Matrik faktor strategi eksternal akan diketahui dengan menyusun EFAS (*ekternal strategic factors analysis summary*), sedangkan matrik faktor strategi internal dapat diketahui dengan menyusun IFAS (*internal strategic factors analysis summary*). Tahap Analisis dapat dimulai setelah faktor-faktor strategis diketahui melalui EFAS dan IFAS, maka disusunlah matrik SWOT, seperti berikut :

IFAS		
EFAS	STRENGTHS	WEAKNESSES
OPPORTUNITIES	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti, 2001

GAMBAR 2.4
DIAGRAM MATRIKS SWOT DAN
KEMUNGKINAN STRATEGI YANG SESUAI

“Guidelines for Preparation of Corporate Plan by Indonesian Regional Drinking Water Enterprises (PDAMs)” yang disiapkan oleh proyek kerjasama Pemerintah Indonesia (Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan) dengan World Bank (1995) dalam <http://www.performorid.04>, mengadopsi Analisis SWOT tanpa pemberian skor. Kelemahan metode ini ialah pemetaan posisi organisasi terhadap lingkungannya sukar untuk dilakukan. Dengan demikian, dari identifikasi faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sasaran-sasaran dan perumusan strategi. Kelebihan metode ini ialah mengurangi bias pembobotan dan pemeringkatan faktor-faktor kunci eksternal dan internal serta persepsi yang kurang tepat dalam melihat posisi organisasi terhadap lingkungannya sebagai sesuatu yang final dan statis. Sebagaimana halnya dalam analisis kuantitatif dalam bidang non-eksakta pada umumnya, pada pendekatan kuantitatif/pemberian skor dalam Analisis SWOT dilakukan reduksi dan simplifikasi, sehingga kuantifikasi atau pembobotan dan rating terhadap sejumlah faktor yang pada dasarnya mempunyai sifat yang kompleks yang sukar untuk diukur tidak sepenuhnya dapat mewakili karakter faktor tersebut atau nilai komparatifnya terhadap faktor yang lain. Karena itu sekalipun bermanfaat, adanya bias pada hasil analisis kuantitatif untuk bidang-bidang non-eksakta tidak bisa dihindarkan. Adakalanya, semakin kompleks pendekatan yang digunakan semakin besar bias yang dihasilkan. Oleh karena itu dalam melakukan Analisis SWOT dengan atau tanpa pemberian skor perlu mempertimbangkan dengan seksama kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan tersebut.

2.5 Rangkuman Kajian Teori

Diera globalisasi ekonomi, komponen investasi (mengalir ke berbagai belahan dunia), industri (melayani peluang-peluang pasar yang menarik dan memanfaatkan sumberdaya potensial), informasi teknologi (pengendalian dan informasi dari luar wilayah), dan individu (mencari produk sesuai kebutuhan dan keinginan individu), seharusnya menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah melalui pengelolaan sumberdaya lokal (*endogenous development*), yang didasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan. Pengelolaan sumberdaya wilayah bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri tetapi diarahkan untuk mampu memenuhi kebutuhan wilayah lainnya.

Dalam pengembangan ekonomi wilayah, pendekatan pembangunan berbasis permintaan memandang suatu wilayah hanya dapat berkembang apabila memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya. Keterkaitan wilayah pedesaan dan perkotaan (*rural-urban linkages*) menjadi penting terutama dengan terjadinya aliran produksi dan konsumsi dari kedua wilayah yang saling menguntungkan. Diperlukan pendekatan baru yang mengarah pada penciptaan nilai tambah terjadi di tingkat pedesaan. Artinya kawasan pedesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian. Proses interaksi antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan harus dalam konteks pembangunan inter-regional berimbang, dimana terjadi proses pembagian nilai tambah yang seimbang dan proporsional antara keduanya. Di wilayah pedesaan

harus dibangun strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi perdesaan, dengan kemampuan tingkat pelayanan infrastruktur, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain-lain yang setara, sehingga mampu menggerakkan ekonomi perdesaan dan penciptaan nilai tambah yang dinikmati oleh pelaku lokal, untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya, melalui pengembangan investasi, proses perijinan, pembangunan infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur merupakan modal penggerak pertumbuhan ekonomi. Salah satu infrastruktur yang mendukung adalah transportasi yang memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, dan sebaliknya apabila mengabaikannya akan menurunkan produktivitasnya.

Dalam menunjang keterkaitan desa-kota dan pentingnya pelayanan bagi masyarakat di pedesaan dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat wilayah dengan diarahkannya kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan lokal yang berfungsi sebagai koleksi dan distribusi bagi wilayah sekitarnya. Pengembangan kota-kota ini diharapkan dapat memberikan efek penjaralan yang berarti bagi pengembangan wilayah pedesaan sehingga penduduknya mendapatkan pelayanan sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraannya. Hubungan antara kajian teori dengan rencana penelitian seperti terlihat pada Tabel II.3 dan Tabel II.4.

TABEL II.3
HUBUNGAN ANTARA TEORI DENGAN TEMA PENELITIAN

Rangkuman dan Sumber Teori	Hubungan dengan Tema Penelitian
<p>Globalisasi, desentralisasi dan ekonomi lokal yang menjadi cara pandang bagi pengembangan wilayah Riyadi: 2002, Tukiyat: 2002, Mangiri, Widiati dalam Alkadri dan Djajadiningrat: 2002).</p>	<p>Perubahan struktural ekonomi dunia/regional akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan peluang desentralisasi melalui pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian strategi pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan daerah harus menempatkan wilayah dalam sistem yang lebih terbuka dan persaingan wilayah.</p>
<p>Konsep Wilayah dan Pengembangan ekonomi Wilayah Abdurahman: 2005, Glasson: 1978, Riyadi: 2002.</p>	<p>Untuk mengetahui konsep wilayah baik secara formal maupun fungsional. Dalam penelitian ini wilayah merupakan wilayah fungsional/nodal yaitu desa – kota yang memiliki hubungan diantara keduanya dan wilayah sebagai sistem produksi pertanian. Ekonomi wilayah merupakan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan atau interaksi berbagai sistem, termasuk interaksi desa-kota.</p>
<p><i>Rural-Urban Linkages</i> (Keterkaitan Desa-Kota) Rondinelli: 1985, Douglass: 1998, Bendavid-Val:1991, Rustiadi dan Hadi: 2006.</p>	<p>Untuk mengetahui hubungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam bentuk aliran/keterkaitan fisik maupun non fisik. Keterkaitan keduanya didasari oleh adanya pendekatan berbasis pasar. Elemen keterkaitan keduanya meliputi keterkaitan fisik, sosial, ekonomi, teknologi, pelayanan dan politik. Dalam studi ini akan dilihat keterkaitan fisik, ekonomi dan sosial yang dijabarkan dalam analisis keterkaitan ekonomi (komoditi pedesaan dan pengolahannya) dan transportasi serta. analisis pusat pelayanan yang merupakan sistem permukiman dengan karakteristik fungsional secara hirarkis dalam bentuk sistem kota (pusat-pusat pertumbuhan).</p>

Sumber : Sintesa , 2007

TABEL II.4
HUBUNGAN ANTARA TEORI DENGAN VARIABEL PENELITIAN

Sasaran	Sumber Pustaka	Variabel Penelitian	Variabel Terpilih
Mengidentifikasi keterkaitan desa-kota	Rondinelli: 1985, Douglas: 1989, Bendavid-Val: 1991,	<p>A. Keterkaitan Fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, sosial, pelayanan, politik, administrasi dan organisasi.</p> <p>B. Keterkaitan penduduk, produksi, komoditas, modal dan informasi</p> <p>C. Keterkaitan transportasi, komunikasi, natural resources, ekonomi, sosial, pelayanan umum dan institusi</p>	Keterkaitan Ekonomi dan Keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi,
Menganalisis keterkaitan ekonomi	Rondinelli: 1985, Douglas: 1989, Bendavid-Val: 1991, Rustiadi dan Hadi: 2006	<p>Pola Pasar, Aliran bahan baku dan barang setengah jadi, Aliran modal, Keterkaitan produksi → <i>backward</i>, <i>forward</i> dan <i>lateral</i>, Pola belanja dan konsumsi, Pola kepemilikan kegiatan ekonomi, Aliran pendapatan, Aliran komoditi antar wilayah dan sektor "Cross Linkages",</p> <p>Rantai aliran produk barang jadi dan setengah jadi, Keterkaitan produksi,</p>	Pola pasar, aliran komoditi, aliran modal, pola belanja dan konsumsi serta keterkaitan produksi

Lanjutan :

Sasaran	Sumber Pustaka	Variabel Penelitian	Variabel Terpilih
		Pola belanja konsumen, Pola kepemilikan kegiatan ekonomi, Aliran pendapatan (transfer dan remiten), Aliran modal, Sistem finansial formal dan informal, Migrasi musiman.	Pola pasar, aliran komoditi, aliran modal, pola belanja dan konsumsi serta keterkaitan produksi
Menganalisis keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi yang mendukung pengembangan wilayah	Rondinelli: 1985, Douglas: 1989, Bendavid-Val: 1991, Dikun: 2003, Sutami dalam Akil: 2006, Rustiadi dan Hadi: 2006	Jalan dan sistem pelayanan transportasi	Jalan raya dan pelayanan angkutan.
Menganalisis sistem kota-kota sebagai pusat pelayanan dengan kelengkapan fasilitas yang dimilikinya.	Rondinelli: 1985, Douglas: 1989, Rustiadi dan Hadi: 2006	Desa-desa yang teridentifikasi sebagai desa kota, jumlah penduduk dengan fasilitasnya	Jumlah penduduk dan fasilitas sosial, ekonomi, kesehatan dan peribadatan serta jumlah penduduk
Mengkaji pengembangan ekonomi wilayah	Rangkuti: 2001, Marimin: 2004 dan Kuncoro: 2006	Faktor eksternal dan internal wilayah	Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pengembangan ekonomi wilayah

Sumber : Sintesa , 2007

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH BOGOR BARAT DAN KOTA BOGOR

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor, yang meliputi kondisi fisik, kependudukan, sektor perekonomian dan transportasi wilayah. Pembahasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang wilayah studi yang memuat data yang terkait dengan aspek kajian penelitian.

3.1 Wilayah Bogor Barat

3.1.1 Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan letak administrasinya, Wilayah Bogor Barat merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Bogor yang meliputi 11 kecamatan, dengan luas wilayah Bogor Barat adalah 88.017 Ha. Batas-batas Wilayah Bogor Barat adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Propinsi Banten).
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi (Propinsi Jawa Barat),
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Ciampea, Tenjolaya, Rancabungur, Ciseeng dan Gunung Sindur,
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Propinsi Banten).

Untuk jelasnya mengenai posisi wilayah Bogor Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT
DALAM KONTEKS KETERTAPAN DESA-KOTA

PETA ADMINISTRASI BOGOR BARAT

LEGENDA

- Batas Administratif
- Sungai dan Lintang
- Jalan Kiri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

NO

3.1

UTARA

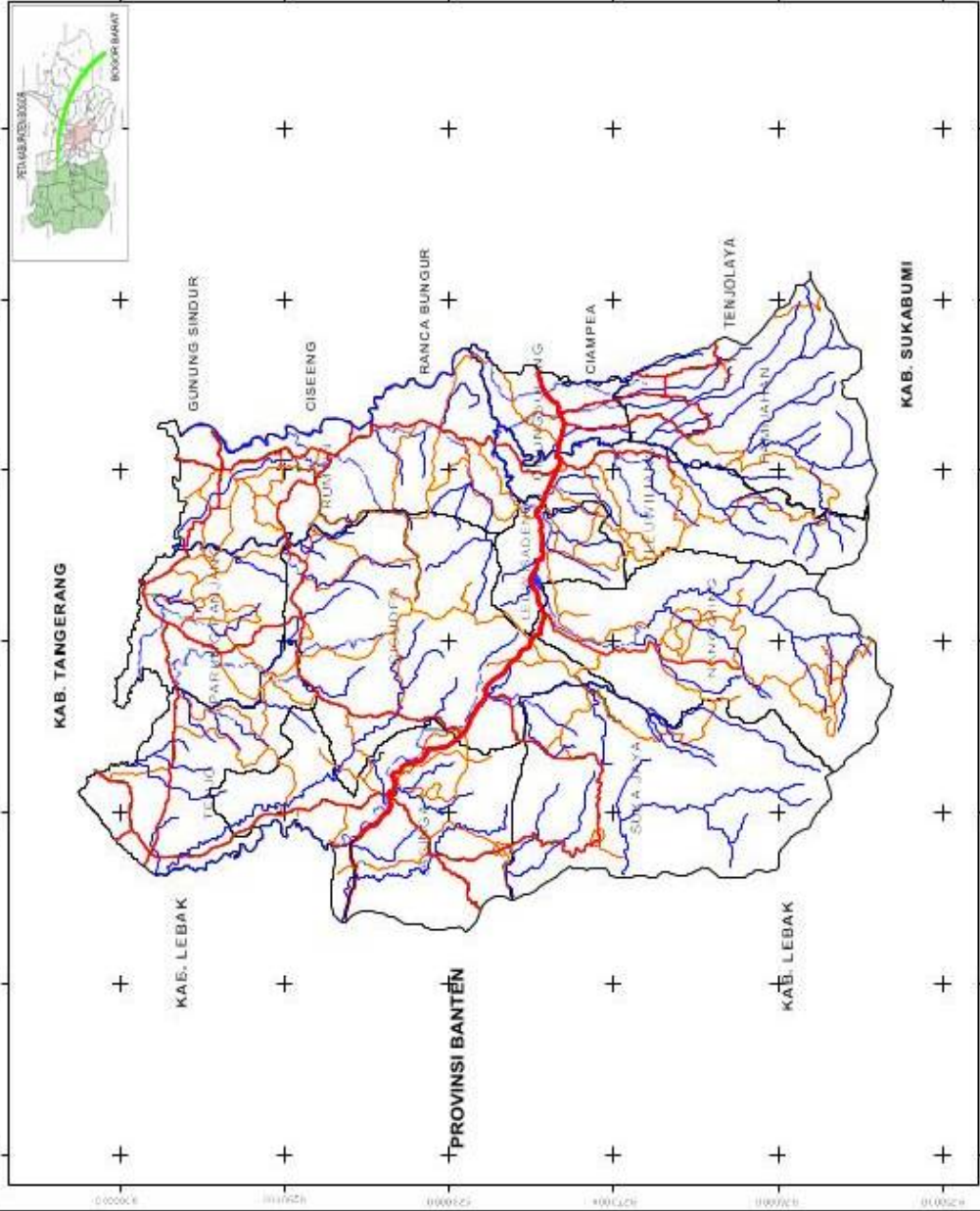


SKALA



SUMBER

BAPPENAS/BAPPENDES/BOGOR, 2006



Penggunaan lahan di Wilayah Bogor Barat tahun 2003 meliputi hutan, kebun/perkebunan, permukiman, sawah tadah hujan, sawah irigasi, tegalan/ladang, belukar, rawa dan sungai/danau. Kelas penggunaan lahan yang paling dominan adalah kebun/perkebunan (24,5%), belukar (23,8%), sawah tadah hujan (15,8%) dan hutan (14,2%). Penggunaan lahan yang dominasinya sebagai lahan pertanian ini menunjukkan bahwa wilayah Bogor Barat merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya pertanian yang dominan didukung dengan sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian (54,25% dari total penduduk yang bekerja).

3.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk di wilayah Bogor Barat pada tahun 2003 berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor adalah sebesar 948.990 jiwa. Sementara itu pada tahun 2006 jumlah penduduk wilayah Bogor Barat sebesar 1.085.594 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2003-2006 sebesar 4,80%. Mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Wilayah Bogor Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.1.

3.1.3 Pertanian

Sektor pertanian wilayah Bogor Barat secara umum meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat serta kehutanan. Pengembangan tanaman pangan meliputi padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK WILAYAH BOGOR BARAT
TAHUN 2003 DAN 2006

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%/tahun)
			2003	2006	
1.	Cibungbulang	3.198	106.553	123.879	5,42
2.	Pamijahan	5.693	121.104	140.224	5,26
3.	Leuwiliang	5.475	94.437	111.705	6,10
4.	Leuwisadeng	3.294	60.716	70.631	5,44
5.	Nanggung	9.194	75.828	81.425	2,46
6.	Sukajaya	12.542	51.513	57.937	4,16
7.	Rumpin	11.732	108.431	126.113	5,45
8.	Cigudeg	13.865	105.148	115.150	3,17
9.	Jasinga	10.242	88.893	93.575	1,76
10.	Tenjo	6.485	54.116	64.104	6,15
11.	Parung Panjang	6.297	82.251	100.851	7,54
Total		88.017	948.990	1.085.594	4,80

Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, 2007

A. Padi

Wilayah Bogor Barat memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Bogor, meskipun secara umum kebutuhan beras di Kabupaten Bogor masih didatangkan dari daerah lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2006, beberapa kecamatan mengalami surplus beras yaitu Kecamatan Tenjo, Jasinga, Sukajaya dan Pamijahan (standard 120 kg/kap/tahun). Lahan tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Pada umumnya semua kecamatan di wilayah Bogor Barat merupakan penghasil padi terutama padi sawah. Total produksi padi pada tahun 2002 sebesar 211.651 ton, dan kecamatan yang menjadi penghasil terbesar adalah Kecamatan Pamijahan (36.924 ton), Leuwiliang (27.551 ton) dan Cigudeg (25.236 ton).

Sementara itu, pada tahun 2005 produksi tanaman padi mengalami penurunan menjadi 182.871 ton. Hal ini terjadi salah satunya karena penurunan luas panen yang sebelumnya (2002) sebesar 38.459 Ha menjadi 33.215 Ha. Kecamatan-kecamatan yang menjadi penghasil padi terbesar adalah Kecamatan Pamijahan (34.139 ton), Cigudeg (24.256 ton) dan Sukajaya (21.966 ton). Untuk jelasnya mengenai luas panen dan produksi padi dapat dilihat pada Tabel III.2.

B. Palawija

Produksi palawija di wilayah Bogor Barat meliputi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Produksi palawija pada tahun 2002 sebesar 88.285 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2005 yaitu menjadi 57.812 ton. Kecamatan-kecamatan yang menjadi produsen utama palawija dilihat dari total jumlah produksi adalah Kecamatan Cibungbulang, Cigudeg dan Parung Panjang. Selama jangka waktu 2002-2005, semua komoditi mengalami penurunan total produksi kecuali kacang hijau, begitu pula produksi di masing-masing kecamatan. Jika dilihat berdasarkan potensi masing-masing komoditi di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel III.3.

Berdasarkan jumlah produksinya di masing-masing kecamatan, maka terdapat komoditi palawija yang unggul di masing kecamatan seperti komoditi ubi jalar di Kecamatan Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang. Sementara itu untuk komoditi ubi kayu terdapat di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg dan Parung panjang. Begitu pula dengan komoditi jagung, kacang kedelai. Masing-masing kecamatan dan komoditi unggulan berdasarkan jumlah produksinya, seperti terlihat pada Tabel III.4.

TABEL III.2
LUAS PANEN, JUMLAH PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DAN LADANG (TON)
DI WILAYAH BOGOR BARAT TAHUN 2002 DAN 2005

TAHUN 2002		Padi Sawah			Padi Ladang			Total
		Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Total Jumlah Produksi (Ton)
1	Cibungbulang	3,620.00	19,334.00	5.34	-	-	-	19,334.00
2	Pamijahan	6,592.00	36,617.00	5.55	116.00	307.00	2.65	36,924.00
3	Leuwiliang	5,102.00	27,377.00	5.37	67.00	174.00	2.60	27,551.00
4	Leuwisadeng	-	-	-	-	-	-	-
5	Nanggung	2,308.00	11,740.00	5.09	-	-	-	11,740.00
6	Sukajaya	3,288.00	17,286.00	5.26	941.00	2,507.00	2.66	19,793.00
7	Rumpin	3,713.00	19,109.00	5.15	461.00	1,195.00	2.59	20,304.00
8	Cigudeg	4,524.00	23,731.00	5.25	572.00	1,505.00	2.63	25,236.00
9	Jasinga	4,170.00	21,368.00	5.12	210.00	546.00	2.60	21,914.00
10	Tenjo	2,358.00	11,971.00	5.08	707.00	1,833.00	2.59	13,804.00
11	Parung Panjang	2,784.00	14,099.00	5.06	367.00	952.00	2.59	15,051.00
	Total	38,459.00	202,632.00	5.27	3441	9,019.00	2.62	211,651.00
TAHUN 2005		Padi Sawah			Padi Ladang			Total
No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Total Jumlah Produksi (Ton)
1	Cibungbulang	3,091.00	16,766.00	5.42	-	-	-	16,766.00
2	Pamijahan	6,254.00	34,139.00	5.46	-	-	-	34,139.00
3	Leuwiliang	1,981.00	10,779.00	5.44	-	-	-	10,779.00
4	Leuwisadeng	1,255.00	6,848.00	5.46	-	-	-	6,848.00
5	Nanggung	1,410.00	7,322.00	5.19	15.00	36.00	2.40	7,358.00
6	Sukajaya	4,018.00	21,597.00	5.38	138.00	369.00	2.67	21,966.00
7	Rumpin	3,531.00	18,268.00	5.17	207.00	527.00	2.55	18,795.00
8	Cigudeg	4,472.00	24,133.00	5.40	47.00	123.00	2.62	24,256.00
9	Jasinga	2,065.00	10,913.00	5.28	311.00	811.00	2.61	11,724.00
10	Tenjo	2,394.00	12,894.00	5.39	657.00	1,711.00	2.60	14,605.00
11	Parung Panjang	2,744.00	14,894.00	5.43	284.00	741.00	2.61	15,635.00
	Total	33,215.00	178,553.00	5.38	1,659.00	4,318.00	2.60	182,871.00

Sumber : Laporan Tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, 2002
Monografi Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2005

TABEL III.3
JUMLAH PRODUKSI PALAWIJA (TON) DI WILAYAH BOGOR BARAT
TAHUN 2002 DAN 2005

TAHUN 2002										
No	Kecamatan	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Jumlah		
1	Cibungbulang	-	9.809.00	10.585.00	110.00	-	-	20.504.00		
2	Pamijahan	545.00	1.099.00	3.228.00	22.00	1.00	-	4.895.00		
3	Leuwiliang	898.00	7.501.00	8.176.00	4.00	-	-	16.579.00		
4	Leuwisdang	-	-	-	-	-	-	-		
5	Nanggung	333.00	2.047.00	2.032.00	81.00	32.00	-	4.525.00		
6	Sukajaya	6.00	1.989.00	808.00	8.00	1.00	-	2.812.00		
7	Rumpin	387.00	5.475.00	2.294.00	93.00	59.00	-	8.308.00		
8	Cigudeg	21.00	3.152.00	930.00	24.00	2.00	-	4.200.00		
9	Jasinga	79.00	7.638.00	1.394.00	97.00	16.00	-	9.224.00		
10	Tenjo	327.00	4.878.00	614.00	49.00	3.00	-	5.871.00		
11	Parung Panjang	50.00	9.847.00	1.318.00	220.00	1.00	2.00	11.438.00		
	Total	2,646.00	53,435.00	31,379.00	708.00	115.00	2.00	88,285.00		
TAHUN 2005										
No	Kecamatan	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Jumlah		
1	Cibungbulang	-	4.126.00	8.446.00	57.00	-	-	12.629.00		
2	Pamijahan	82.00	1.716.00	4.484.00	-	-	-	6.282.00		
3	Leuwiliang	-	2.411.00	1.990.00	29.00	-	-	4.430.00		
4	Leuwisdang	8.00	361.00	424.00	6.00	-	-	799.00		
5	Nanggung	51.00	1.448.00	188.00	29.00	-	-	1.716.00		
6	Sukajaya	-	5.417.00	1,219.00	37.00	4.00	-	6,677.00		
7	Rumpin	79.00	2,524.00	919.00	74.00	1.00	4.00	3,601.00		
8	Cigudeg	-	5,066.00	1,618.00	66.00	-	-	6,750.00		
9	Jasinga	710.00	3,650.00	759.00	95.00	-	-	5,214.00		
10	Tenjo	118.00	2,398.00	394.00	75.00	-	6.00	2,991.00		
11	Parung Panjang	-	5,865.00	774.00	80.00	-	4.00	6,723.00		
	Total	1,048.00	34,982.00	21,215.00	548.00	5.00	14.00	57,812.00		

Sumber : Laporan Tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, 2002

Monografi Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2005

TABEL III.4
KOMODITI PALAWIJA UNGGULAN

No.	Kecamatan	Komoditi Palawija Unggulan
1.	Cibungbulang	Ubi jalar.
2.	Pamijahan	Ubi jalar, jagung.
3.	Leuwiliang	Ubi jalar.
4.	Leuwisadeng	-
5.	Nanggung	-
6.	Sukajaya	Ubi kayu, kacang kedelai.
7.	Rumpin	Kacang kedelai, kacang hijau.
8.	Cigudeg	Ubi kayu
9.	Jasinga	Jagung, kacang tanah.
10.	Tenjo	Jagung, kacang tanah, kacang hijau.
11.	Parung Panjang	Ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau.

Sumber : Analisis, 2007

C. Sayuran

Produksi sayuran di wilayah Bogor Barat meliputi komoditi Petsai sawi, kacang merah, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, mentimun, labu siam dan kangkung serta bayam. Secara umum, seluruh kecamatan di wilayah Bogor Barat merupakan potensi penghasil sayuran meskipun tidak semua kecamatan menghasilkan seluruh komoditi/jenis sayuran, seperti pada Tabel III.5.

Beberapa kecamatan yang memiliki keunggulan dalam jumlah produksi sayuran adalah Kecamatan Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Nanggung, Sukajaya, Rumpin, Cigudeg dan Jasinga. Kecamatan Cibungbulang memiliki potensi dalam pengembangan sayuran mengingat banyaknya jenis sayuran yang memiliki jumlah produksi yang besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya, seperti komoditi petsai sawi, kacang panjang, tomat, terung, buncis, mentimun, kangkung dan bayam. Begitu pula dengan Kecamatan Sukajaya dan Pamijahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.6.

TABEL III.5
JUMLAH PRODUKSI SAYURAN (KUINTAL) DI WILAYAH BOGOR BARAT
TAHUN 2002 DAN 2005

TAHUN 2002													
No	Kecamatan	Petsai Sawi	Kacang Merah	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terung	Buncis	Mentimun	Labu Siam	Kangkung	Bayam	Jumlah
1	Cibungbulang	5,755.0	-	55,757.0	907.00	-	4,734.00	6,917.00	24,961.00	-	9,166.00	7,559.00	115,755.00
2	Pamijahan	-	-	10,546.0	2,124.00	-	785.00	4,483.00	16,727.00	10,676.00	-	-	45,341.00
3	Leuwiliang	1,033.0	78.1	22,441.0	1,628.00	2,868.00	2,328.00	4,300.00	20,963.00	-	4,943.00	3,664.00	64,246.10
4	Leuwisadeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nanggung	-	-	7,968.0	-	3,669.00	-	86.00	448.00	-	-	-	12,171.00
6	Sukajaya	480.0	-	6,415.0	597.00	3,479.00	-	504.00	2,524.00	-	26,994.00	-	40,993.00
7	Rumpin	578.0	-	14,990.0	3,595.00	5,430.00	1,425.00	-	7,389.00	-	4,522.00	3,027.00	40,956.00
8	Cigudeg	812.0	-	8,245.0	1,361.00	-	50.00	338.00	4,450.00	-	29,839.00	-	45,095.00
9	Jasinga	-	-	17,136.0	2,304.00	538.00	3,656.00	-	10,778.00	-	2,302.00	1,741.00	38,455.00
10	Tenjo	-	-	1,887.0	63.00	2,275.00	27.00	-	843.00	-	2,105.00	580.00	7,780.00
11	Parung Panjang	-	-	10,429.0	188.00	526.00	742.00	-	14,365.00	-	1,274.00	4,515.00	32,039.00
	Total	8,658.0	78.1	155,814.0	12,767.00	18,785.00	13,747.00	16,628.00	103,448.00	10,676.00	81,144.00	21,086.00	442,831.10
TAHUN 2005													
No	Kecamatan	Petsai Sawi	Kacang Merah	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terung	Buncis	Mentimun	Labu Siam	Kangkung	Bayam	Jumlah
1	Cibungbulang	16,344.0	-	3,700.0	965.00	2,940.00	2,115.00	5,875.00	28,096.00	-	16,870.00	22,400.00	99,305.00
2	Pamijahan	-	380.0	2,235.0	-	2,721.00	1,503.00	3,771.00	35,460.00	5,225.00	600.00	600.00	52,495.00
3	Leuwiliang	215.0	-	4,058.0	-	570.00	1,239.00	1,220.00	2,564.00	-	1,009.00	630.00	11,505.00
4	Leuwisadeng	-	-	548.0	-	394.00	237.00	412.00	1,184.00	-	750.00	690.00	4,215.00
5	Nanggung	40.0	-	2,940.0	-	-	1,915.00	-	3,183.00	-	2,151.00	693.00	10,922.00
6	Sukajaya	50.0	980.0	3,100.0	1,878.00	5,520.00	240.00	8,738.00	15,340.00	1,067.00	2,324.00	2,245.00	41,482.00
7	Rumpin	-	-	979.0	1,423.00	1,184.00	862.00	-	6,217.00	-	4,950.00	4,905.00	20,520.00
8	Cigudeg	-	-	4,455.0	1,175.00	1,072.00	769.00	1,350.00	9,651.00	-	1,325.00	100.00	19,897.00
9	Jasinga	-	-	2,817.0	2,158.00	-	3,535.00	-	13,145.00	-	2,250.00	1,620.00	25,525.00
10	Tenjo	-	-	1,007.0	323.00	-	588.00	-	5,255.00	-	2,090.00	2,090.00	11,353.00
11	Parung Panjang	-	-	2,008.0	353.00	-	355.00	-	9,919.00	-	1,937.00	-	14,572.00
	Total	16,649.0	1,360.0	27,847.0	8,275.00	14,401.00	13,358.00	21,366.00	130,014.00	6,292.00	36,256.00	35,973.00	311,791.00

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian, 2002
Monografi Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2005

TABEL III.6
KOMODITI SAYURAN UNGGULAN

No.	Kecamatan	Komoditi Sayuran Unggulan
1.	Cibungbulang	Petsai sawi, kacang panjang, tomat, terung, buncis, mentimun, kangkung, bayam.
2.	Pamijahan	Tomat, buncis, mentimun.
3.	Leuwiliang	Kacang panjang.
4.	Leuwisadeng	-
5.	Nanggung	Terung
6.	Sukajaya	Cabe, tomat, buncis, mentimun, kangkung, bayam.
7.	Rumpin	Cabe, kangkung, bayam.
8.	Cigudeg	Kacang panjang.
9.	Jasinga	Cabe, terung.
10.	Tenjo	-
11.	Parung Panjang	-

Sumber : Analisis, 2007

D. Buah-buahan.

Produksi buah-buahan di wilayah Bogor Barat terdiri dari jeruk, alpukat, durian, duku, jambu biji, jambu air, nenas, mangga, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun. Secara total jumlah produksi buah-buahan di wilayah Bogor Barat mengalami penurunan dari 63,633, 20 ton di tahun 2002 menjadi 23.712 ton pada tahun 2005, seperti dapat dilihat pada Tabel III.7.

Umumnya komoditi buah-buahan ini terdapat di seluruh kecamatan dengan masing-masing memiliki kunggulan sesuai dengan potensinya. Beberapa kecamatan memiliki komoditi buah-buahan yang beragam dari sisi jumlah produksi seperti Kecamatan Cigudeg, Jasinga dan Parung Panjang. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh petani maupun pedagang, komoditi buah-buahan yang memiliki jangkauan perdagangan yang luas di antaranya pepaya, jambu biji, durian, manggis, rambutan dan pisang. Kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi pengembangan buah-buahan seperti terlihat pada Tabel III.8.

TABEL III.7
Jumlah Produksi Buah-Buahan (Ton) di Wilayah Bogor Barat
TAHUN 2002 DAN 2005

TAHUN 2002																		
No	Kecamatan	Jeruk	Alpukat	Durian	Duku	Jambu Biji	Jambu Air	Nenas	Mangga	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Manggis	Sukun	Jumlah
1	Cibungbulang	11,70	4,40	91,80	14,40	46,30	54,40	5,20	124,30	622,20	680,30	269,10	-	0,60	8,10	2,10	4,20	2.139,10
2	Pamijahan	2,20	15,50	3,20	0,20	48,80	7,80	2,80	2,80	560,10	6,253,30	-	-	-	1,40	0,30	4,00	6.902,40
3	Leuwiliang	133,50	86,80	2,829,40	109,20	2,253,30	2,979,40	71,50	562,60	447,00	2,308,00	462,00	7,20	167,00	36,70	43,50	32,70	12.528,80
4	Leuwisadeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nanggung	17,50	3,40	23,50	3,80	44,60	-	1,40	96,40	229,40	36,80	1,60	0,90	-	4,90	0,10	0,20	420,00
6	Sukajaya	1,00	4,40	80,10	0,60	10,60	106,50	30,90	39,70	9,30	17,803,30	572,60	11,30	0,80	4,30	0,40	0,20	283,10
7	Rumpin	30,40	64,60	111,50	36,00	14,60	38,50	83,40	88,00	62,90	662,70	89,00	27,20	71,20	36,70	5,30	81,40	529,90
8	Cigugur	-	3,30	849,70	0,40	25,30	166,40	40,40	256,40	10,00	3,975,10	42,70	1,30	-	2,20	1,40	-	1.351,90
9	Jasiraga	0,90	3,60	30,20	436,40	1,20	2,30	-	247,80	40,00	767,20	56,40	0,60	6,50	1,60	151,90	0,10	762,40
10	Tenjo	24,50	2,30	3,80	2,00	1,60	17,00	26,20	16,70	18,10	757,90	7,30	21,40	30,00	4,50	0,70	8,30	942,30
11	Paung Panjang	6,80	-	20,30	26,80	80,70	62,10	92,40	21,80	205,10	12,828,30	151,80	-	37,20	5,10	-	0,70	518,00
	Total	228,50	186,30	4,043,50	631,80	2,527,00	3,434,40	364,20	1,456,50	2,204,10	46,292,90	1,652,50	69,90	313,30	104,50	205,70	131,80	63.686,90
TAHUN 2005																		
No	Kecamatan	Jeruk	Alpukat	Durian	Duku	Jambu Biji	Jambu Air	Nenas	Mangga	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Manggis	Sukun	Jumlah
1	Cibungbulang	-	30,00	16,00	-	34,00	49,00	3,00	16,00	1,195,00	261,00	98,00	-	1,00	3,00	-	-	1.726,00
2	Pamijahan	26,00	-	-	-	140,00	8,00	2,00	14,00	465,00	415,00	-	-	3,00	7,00	-	165,00	1.265,00
3	Leuwiliang	-	11,00	133,00	-	19,00	6,00	-	17,00	14,00	330,00	83,00	-	9,00	-	119,00	9,00	750,00
4	Leuwisadeng	-	6,00	128,00	-	36,00	-	-	3,00	3,00	664,00	84,00	-	-	-	82,00	-	1.006,00
5	Nanggung	-	-	62,00	-	34,00	3,00	1,00	11,00	5,00	176,00	30,00	32,00	-	6,00	18,00	1,00	116,00
6	Sukajaya	-	16,00	-	-	72,00	473,00	2,00	171,00	12,00	962,00	292,00	-	3,00	2,00	38,00	4,00	746,00
7	Rumpin	-	-	-	-	60,00	-	-	-	8,00	108,00	-	-	-	-	-	-	68,00
8	Cigugur	-	69,00	-	-	259,00	540,00	1,00	201,00	3,00	4,061,00	201,00	3,00	-	4,00	177,00	-	1.073,00
9	Jasiraga	-	26,00	109,00	109,00	75,00	27,00	4,00	123,00	31,00	1,975,00	468,00	2,00	26,00	2,00	1,721,00	6,00	501,00
10	Tenjo	-	-	9,00	-	29,00	23,00	4,00	9,00	14,00	1,536,00	74,00	1,00	2,00	8,00	12,00	1,00	1.722,00
11	Paung Panjang	-	-	33,00	4,00	124,00	188,00	14,00	3,00	54,00	5,828,00	287,00	-	46,00	6,00	-	1,00	400,00
	Total	26,00	159,00	490,00	113,00	862,00	1,297,00	28,00	568,00	1,824,00	16,366,00	1,617,00	36,00	90,00	38,00	2,167,00	187,00	25.879,00

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian, 2002
Monografi Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2005

TABEL III.8
KOMODITI BUAH-BUAHAN UNGGULAN

No.	Kecamatan	Komoditi Buah-buahan Unggulan
1.	Cibungbulang	Alpukat, pepaya.
2.	Pamijahan	Jambu biji, pepaya, sirsak, sukun.
3.	Leuwiliang	Durian, sawo, manggis, sukun.
4.	Leuwisadeng	Durian.
5.	Nanggung	Salak, sirsak
6.	Sukajaya	Jambu air, mangga, rambutan.
7.	Rumpin	-
8.	Cigudeg	Alpukat, jambu biji, jambu air, mangga, pisang, salak, manggis.
9.	Jasinga	Alpukat, durian, mangga, pisang, rambutan, salak, sawo, manggis, sukun.
10.	Tenjo	Sirsak.
11.	Parung Panjang	Jambu biji, jambu air, pepaya, pisang, rambutan, sawo, sirsak.

Sumber : Analisis, 2007

Mengenai potensi komoditi padi dan komoditi palawija, sayuran dan buah-buahan unggulan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

3.1.4 Industri

Salah satu kegiatan di wilayah Bogor Barat adalah sektor industri, meskipun sektor industri di wilayah Bogor Barat belum berkembang seperti di Wilayah Bogor Tengah dan Timur. Secara umum jenis industri yang terdapat di wilayah Bogor Barat adalah industri kecil seperti kerajinan, bahan bangunan, makanan dan lain sebagainya yang tersebar di masing-masing kecamatan. Dilihat berdasarkan jumlah industri pengolahan hasil pertanian terdapat sentra industri yang meliputi industri dodol, gula aren, tahu/tempe, kripik dan kerupuk. Mengenai potensi industri ini dapat dilihat pada Tabel III.9 dan industri pengolahan hasil pertanian seperti pada Tabel III.10 serta Gambar 3.3.

TABEL III.9
JENIS INDUSTRI KECIL DI WILAYAH BOGOR BARAT

No.	Kecamatan	Jenis Industri
1.	Cibungbulang	Kompore, <i>kerupuk</i> , kerajinan timah putih
2.	Pamijahan	Steer Racing, <i>dodol</i> , <i>keripik</i>
3.	Leuwiliang	Bata Merah, Kayu dan Sandal
4.	Leuwisadeng	Industri Tas, Rangka Beton dan Kapur
5.	Nanggung	Kerajinan rotan, sepatu dan meubel
6.	Sukajaya	Kerajinan bambu
7.	Rumpin	Kerajinan Bambu, <i>susu kedelai</i>
8.	Jasinga	Kayu jenjing
9.	Tenjo	<i>Dodol tenjo</i> , jambu mete, anyaman, lebah madu
10.	Parung Panjang	Kerajinan Bambu, <i>dodol cibunar</i> , lebah madu.

Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, 2001

TABEL III.10
POTENSI SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
DI WILAYAH BOGOR BARAT

No.	Komoditi	Kecamatan	Desa	Jumlah	Tenaga Kerja
1	Dodol	Parung Panjang Tenjo	Cibunar	10	30
			Tenjo	18	126
			Cilaku	4	20
2	Gula Aren	Leuwiliang Jasinga Cigudeg	Purasari	15	30
			Pangradin	20	50
			Cisarua	5	25
3	Tahu/Tempe	Cibungbulang	Leuweungkolot	17	68
			Girimulya	6	24
4	Kripik Singkong Kripik Pisang	Cibungbulang	Cibatok II	4	20
			Sukamaju	1	4
5	Kerupuk Makaroni Baso	Cibungbulang	Sukamaju	1	15
			Sukamaju	1	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2006

3.1.5 Infrastruktur Transportasi dan Sosial.

Kondisi transportasi di wilayah Bogor Barat dapat dilihat berdasarkan kondisi jaringan jalan, kereta api, sarana perangkutan dan terminal penumpang.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT
SALAM KONTAKS KETERKAWAN DESA-KOTA

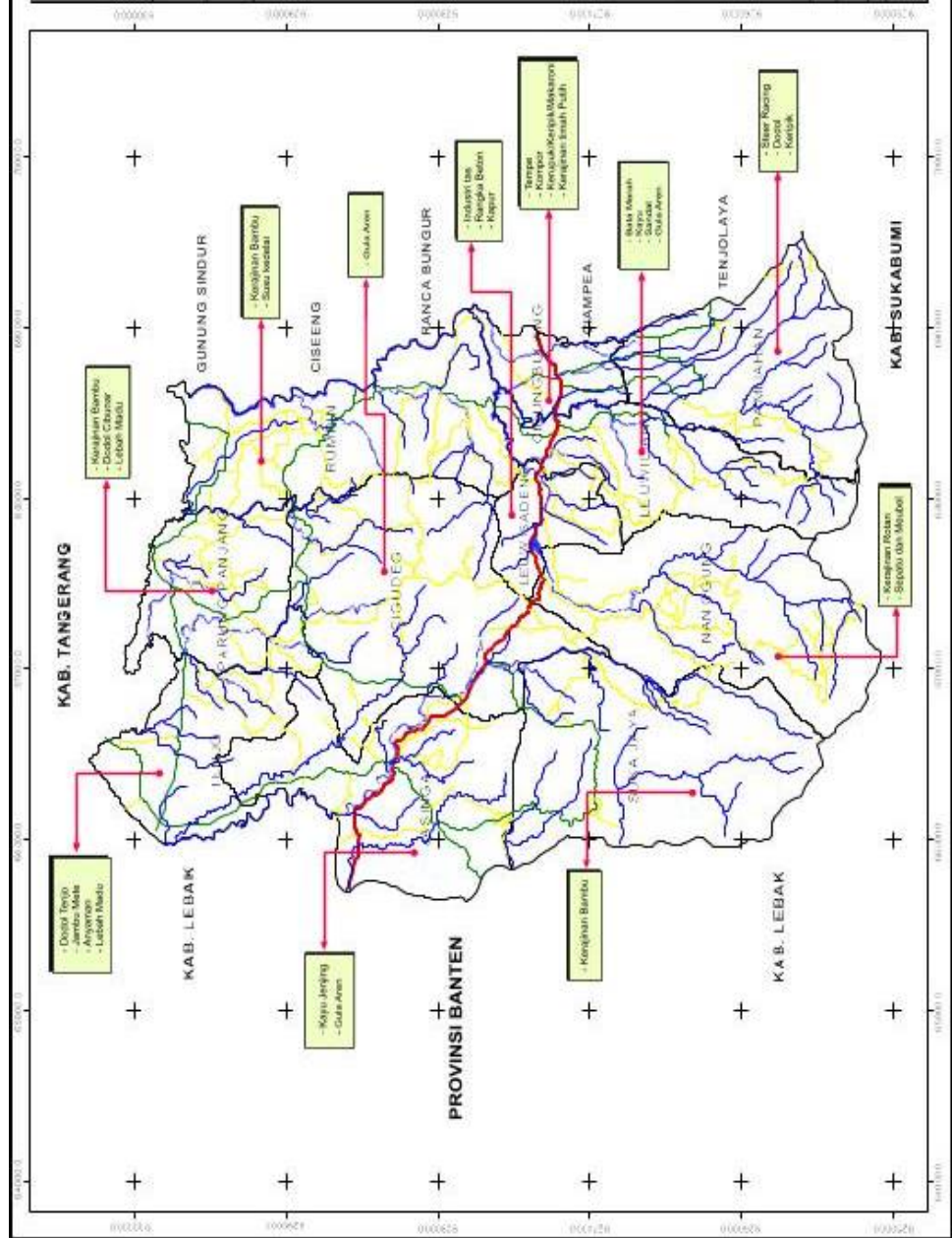
PETA SEBAGIAN POTENSI INDUSTRI
WILAYAH BOGOR BARAT

- LEGENDA
- ↳ Batas Administrasi
 - ↳ Sungai
 - ↳ Jalan Arteri
 - ↳ Jalan Kolektor
 - ↳ Jalan Lokal

NO	SKALA
3.3	

UTARA

SUMBER
BUREAU OF STATISTICS, BANGKALAN, 2005
DATA REKONSTRUKSI DAN PERENCANAAN 2016
HASIL SURVEI 2016



Jaringan jalan wilayah Bogor Barat didukung oleh adanya jaringan jalan propinsi, yang menghubungkan wilayah kecamatan di Bogor Barat dengan propinsi Banten. Kecamatan yang berada di jalur tersebut adalah Kecamatan Cibungbulang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg dan Jasinga. Kondisi jaringan jalan di wilayah Bogor Barat sebesar 34,62 % dalam kondisi baik dan 40,38 % dalam kondisi rusak berat, seperti terlihat pada Tabel III.11.

TABEL III.11.
KONDISI JALAN KABUPATEN DI WILAYAH BOGOR BARAT

No.	Kecamatan	Kondisi (km)				Total
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Cibungbulang	12,00	7,60	2,60	4,30	26,50
2.	Pamijahan	12,75	16,90	3,90	15,20	63,75
3.	Leuwiliang	19,30	5,50	5,50	24,10	54,40
4.	Leuwisadeng	9,70	2,03	2,80	6,60	21,13
5.	Nanggung	19,45	12,08	5,35	27,50	64,38
6.	Sukajaya	5,70	7,30	1,60	30,30	44,90
7.	Rumpin	50,75	8,70	7,55	39,00	76,00
8.	Cigudeg	11,40	9,50	3,80	25,95	50,65
9.	Jasinga	24,40	12,80	2,60	32,86	72,66
10.	Tenjo	27,40	10,50	2,90	5,60	46,40
11.	Parung Panjang	14,65	4,50	3,00	13,10	35,25
Total		192,50 (34,62%)	97,40 (17,52%)	41,60 (7,48%)	224,51 (40,38%)	556,01

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, 2004

Untuk mendukung pergerakan manusia dan barang di wilayah Bogor Barat terdapat angkutan regional dan lokal serta prasarana terminal yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Jasinga dan Parung Panjang yang meliputi terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan. Angkutan regional melayani pergerakan ke luar wilayah Bogor Barat seperti ke Kota Bogor, Tangerang dan

Rangkasbitung. Mengenai trayek angkutan di wilayah Bogor Barat dan jaringan jalan seperti pada Tabel III.12 dan Gambar 3.4.

Infrastruktur permukiman yang terdapat di wilayah Bogor Barat dirinci berdasarkan kota-kota kecamatan yang menjadi pusat-pusat pelayanan di masing-masing kecamatan meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan dan perekonomian. Secara umum masing-masing fasilitas tersebut terdapat di masing-masing kota kecamatan meskipun berdasarkan jenis fasilitasnya masing-masing memiliki perbedaan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya orientasi penduduk ke fasilitas yang lebih lengkap di kota kecamatan lainnya. Keberadaan fasilitas permukiman seperti ini juga terdapat di luar wilayah kotanya mengingat adanya pengembangan fasilitas oleh individu yang lebih melihat dari sisi lokasi yang sesuai dengan fasilitas tersebut, seperti adanya kampus pelatihan di Kecamatan Pamijahan. Orientasi ini disamping dipengaruhi oleh kelengkapannya, juga ditentukan oleh kemudahan untuk mencapai lokasi tersebut. Mengenai sebarannya dapat dilihat pada Tabel III.13.

3.2 Wilayah Kota Bogor

3.2.1 Batas Administrasi

Wilayah Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan dengan 22 kelurahan dan 46 desa, memiliki luas wilayah 11.850 Ha. Batas administrasi wilayah Kota Bogor dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

- **Selah Utara** berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede dan Sukaraja.
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Ciawi.

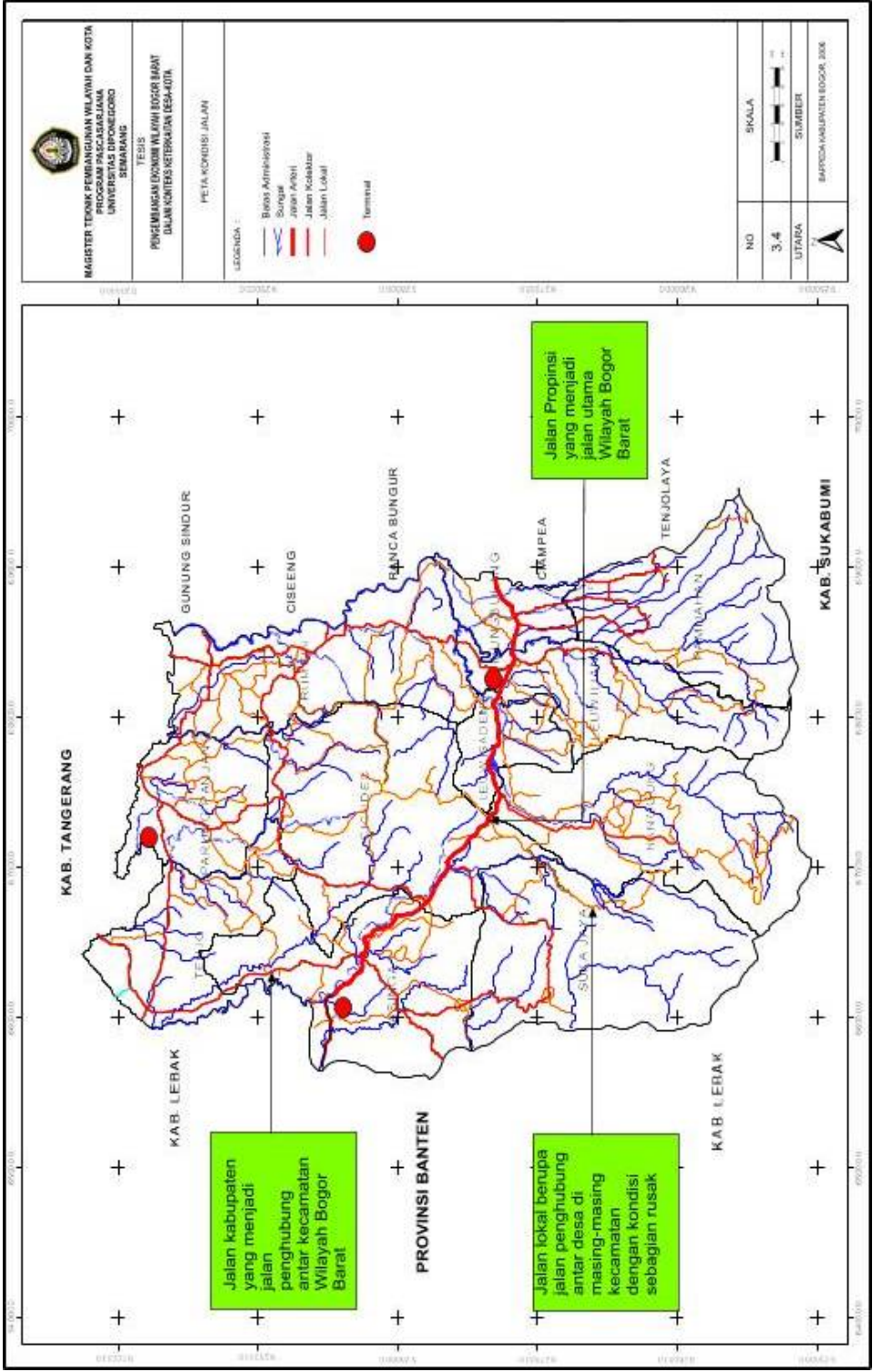
TABEL III.12
TRAYEK ANGKUTAN DI WILAYAH BOGOR BARAT

No.	Jurusan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Leuwiliang-Ciampea	200	Terminal Leuwiliang
2	Leuwiliang-Jasinga	30	
3	Leuwiliang-Hamaro	25	
4	Leuwiliang-Nanggung	50	
5	Leuwiliang-Puraseda	30	
6	Leuwiliang-Panyaungan-Pongkor	100	
7	Leuwiliang-Gobang-Nyuncung-Rumpin	100	
8	Leuwiliang-Cibatok-Gn Salak Endah	200	
9	Leuwiliang-Pamijahan-Purabakti	200	
10	Leuwiliang-Cibatok-Segok	100	
11	Leuwiliang-Cibatok-Gn. Bunder-Gn. Salak Endah	100	
12	Leuwiliang-Dramaga-Terminal Laladon/Bubulak	440	
13	Jasinga-Tenjo	50	Terminal Jasinga Bogor Barat – Kota Bogor
14	Jasinga-Leuwiliang-Terminal Laladon/Bubulak	520	
15	Parung Panjang-Bunar	100	Terminal Parung Panjang
16	Parung Panjang-Tenjo	50	
17	Parung Panjang-Perum Griya	50	
18	Parung Panjang-Lebak Wangi	50	
19	Parung Panjang-Dago	50	
20	Rumpin-Cicangkal	30	
21	Jasinga – Tenjo – Jakarta	30	Hasil Survey
22	Parung Panjang –Tangerang - Jakarta	70	
23	Kota Bogor – Rangkasbitung - Pandegelang	10	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, 2006 dan survey 2007

- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Ciomas.
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Caringin.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah dan batas administrasi Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel III. 14 dan Gambar 3.5.



TABEL III.13

JUMLAH DAN JENIS FASILITAS DI Masing-Masing Kota Kecamatan Wilayah Bogor Barat

No	Kecamatan	Desa Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TK	SD	SLTP	SMU	SMK	Akademi/PT	SLB	SLB Swasta	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Pus Pembantu	Tempat Praktek dokter	Tempat Praktek Bidan	Posyandu	Polindes	Apotek	Pos Obat desa	Toko Khusus Obat/Alma	Masjid	Langgar	Gereja	Vihara	Pasar Swalayan/Toserba	Restoran/Rmh Makan	Hotel/Penginapan	Bank Umum	Bank Perkreditan	Pasar							
1	Cibungbulang	Cimannggu II	7,717	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Cimannggu I	9,150	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Jumlah	16,867	2	10	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	14	0	0	0	0	11	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Pamijahan	Gunung Sari	12,192	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	0	0	1	0	34	66	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0				
		Pamijahan	11,297	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	16	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0			
		Jumlah	23,489	2	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	14	0	0	0	1	0	50	72	0	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0			
3	Leuwiliang	Leuwiliang	13,583	3	9	1	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	13	0	1	1	8	12	4	0	0	4	5	0	0	3	1	0	0	0			
		Leuwimekar	14,074	2	7	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	2	1	11	0	1	0	1	12	9	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0			
		Cibeber I	9,540	1	11	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	11	0	0	0	0	15	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Cibeber II	8,500	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Jumlah	45,697	7	34	8	8	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	6	4	41	0	2	2	9	54	33	0	0	6	8	0	1	3	1	0	0	0	0		
4	Leuwisadeng	Sibanteng	10,073	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kalong II	6,356	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Leuwisadeng	11,370	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah	27,799	1	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	25	0	0	0	0	0	22	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nanggung	Parakan Muncang	13,112	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	1	0	1	0	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Nanggung	7,287	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	20,399	4	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	18	1	0	1	0	23	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Sukajaya	Sipayung	6,636	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sukajaya	8,041	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah	14,677	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	28	0	0	0	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Rumpin	Rumpin	5,682	1	6	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9	0	0	1	2	6	9	0	0	0	7	0	0	1	1	0	0	0	0		
		Kampung Sawah	10,258	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	1	3	8	12	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Cipinang	12,046	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rabak	12,450	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	11	23	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Jumlah	40,436	1	21	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	28	0	0	2	5	37	59	0	0	17	0	0	1	1	0	0	0	0	0		

Lanjutan																																						
No	Kecamatan	Desa Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK	SD	SLTP	SMU	SMK	Akademi/PT	SLB	SLB Swasta	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Pus Pembantu	Tempat Praktek dokter	Tempat Praktek Bidan	Posyandu	Polindes	Apotek	Pos Obat desa	Toko Khusus ObatJamu	Masjid	Langgar	Gereja	Vihara	Pasar Swalayan/Toserba	Restoran/Rmh Makan	Hotel/Penginapan	Bank Umum	Bank Perkreditan	Pasar					
8	Cigugueg	Cigugueg	14,102	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	12	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	2	0	0	1	0	1			
		Bunar	8,362	0	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	5	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Sukamaju	8,455	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wargajaya	6,092	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Jumlah	37,031	1	26	4	3	1	0	0	0	0	0	2	2	4	2	6	31	0	0	0	0	34	33	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1			
9	Jasinga	Pamagersari	4,611	1	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	0	0	0	3	6	8	0	0	0	3	6	1	1	1	0	1	0		
		Jasinga	5,437	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1		
		Sipak	11,327	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	7	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cikopomayak	5,394	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	8	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Setu	5,437	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Neglasari	2,893	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah	36,099	1	23	3	3	0	0	0	0	0	1	5	1	1	1	5	39	0	0	0	3	36	36	0	0	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	
10	Tenjo	Tenjo	10,905	1	8	4	1	1	0	0	0	0	0	8	1	0	1	1	4	0	0	0	0	4	14	0	0	0	15	0	0	1	1	1	1	1		
		Babakan	9,163	0	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	0	0	0	0	6	48	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cilaku	6,499	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	5	18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Singabraja	4,055	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	4	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Singabangsa	3,558	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah	34,180	1	24	6	2	1	0	0	0	0	0	8	1	2	1	5	30	1	0	0	0	23	99	0	1	0	23	0	0	1	1	1	1	1	1	
11	Parung Panjang	Parung Panjang	16,581	2	8	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	1	2	8	1	0	0	0	1	6	34	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	
		Cibunar	10,373	4	6	3	1	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	3	8	0	0	0	1	5	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabasaran	12,092	6	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	11	0	0	0	0	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Giritung Cilejet	6,914	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	0	0	0	0	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jagabaya	7,092	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	6	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lumpang	12,641	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	12	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gorowong	8,014	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	6	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jagabita	6,366	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	80,093	13	47	8	4	1	0	0	0	0	3	8	1	2	2	8	65	1	0	0	2	53	193	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	
		TOTAL	375,767	33	243	40	26	4	2	1	1	2	5	29	11	13	14	37	333	3	2	6	19	357	636	1	3	11	61	16	11	7	10	7	10	7	10	

Sumber : Perda No. 43 Tahun 2002, RTRW Kab. Bogor, Masterplan Agropoliplan Kabupaten Bogor, 2005

TABEL III.14
LUAS WILAYAH KOTA BOGOR

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Bogor Utara	1.772
2.	Bogor Timur	1.015
3.	Bogor Selatan	3.081
4.	Bogor Tengah	813
5.	Bogor Barat	3.285
6.	Tanah Sareal	1.884
	Total	11.850

Sumber : RTRW Kota Bogor, 2004

3.2.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 1999 sebesar 697.496 jiwa sedangkan pada tahun 2004 sebesar 831.571 jiwa, sehingga terjadi peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3,56%. Hal ini disebabkan Kota Bogor sebagai wilayah penyangga Jakarta dan banyaknya fasilitas sosial ekonomi yang memberikan daya tarik bagi penduduk untuk bermukim di Kota Bogor. Secara rinci jumlah dan kepadatan penduduk Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel III.15.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 266.691 jiwa, yang terdiri dari 84.096 jiwa bekerja di sektor jasa, sektor perdagangan (36.991 jiwa), industri (29.226 jiwa) dan transportasi sebesar 8.167 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.16.

3.2.3 Perekonomian Kota

Struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh sektor perdagangan dengan kontribusinya sebesar 32,45% tahun 2000 dan 30,66% pada tahun 2004.

TABEL III.15
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA BOGOR
TAHUN 2004

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1.	Bogor Utara	1.772	148.107	84
2.	Bogor Timur	1.015	83.907	83
3.	Bogor Selatan	3.081	163.295	53
4.	Bogor Tengah	813	101.162	124
5.	Bogor Barat	3.285	184.464	56
6.	Tanah Sareal	1.884	150.636	80
	Total	11.850	831.571	70

Sumber : RTRW Kota Bogor, 2004

TABEL III.16.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN UTAMA
KOTA BOGOR TAHUN 2004

No.	Kecamatan	Jasa (Jiwa)	Perdagangan (Jiwa)	Industri (Jiwa)	Transportasi (Jiwa)
1.	Bogor Utara	12.563	4.763	10.228	1.816
2.	Bogor Timur	10.467	3.469	3.107	1.239
3.	Bogor Selatan	12.947	6.946	4.812	1.486
4.	Bogor Tengah	13.049	6.165	1.874	678
5.	Bogor Barat	17.801	7.558	3.962	1629
6.	Tanah Sareal	17.269	8.090	5.243	1.861
	Total	84.096	36.991	29.226	8.709

Sumber : RTRW Kota Bogor, 2004

Dari kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki potensi yang besar di sektor perdagangan ini, dan membuktikan bahwa sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah sekitarnya maka sektor perdagangan menjadi sektor unggulan. Selain perdagangan, sektor yang juga memberikan kontribusinya terhadap perekonomian kota adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusinya sebesar 27,99% pada tahun 2004. Sektor lainnya meliputi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 12,85%,

Pengangkutan dan Komunikasi (9,80%) dan Jasa-jasa (7,98%). Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.17.

3.2.4 Fasilitas Perdagangan

Dalam mendukung perkembangan perekonomian Kota Bogor, terdapat berbagai prasarana kota di antaranya adalah fasilitas perdagangan seperti pasar, toko, warung dan pusat perbelanjaan. Sesuai dengan fungsi Kota Bogor sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah Bogor, keberadaan fasilitas yang berskala regional menunjukkan pentingnya Kota Bogor bagi perkembangan wilayah sekitarnya. Untuk jelasnya mengenai sebaran fasilitas perdagangan Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 3.6.

3.2.5 Transportasi

Sistem transportasi Kota Bogor sangat terkait dengan kondisi sistem transportasi yang ada di wilayah sekitarnya, terutama wilayah Kabupaten Bogor. Secara geografis, Kota Bogor berada di tengah Kabupaten Bogor yang menjadi pusat orientasi pergerakan manusia dan barang. Hal ini disebabkan dampak dari status Kota Bogor yang sebelumnya menjadi pusat ibukota Kabupaten Bogor dan adanya fasilitas perkotaan yang dimilikinya sehingga menjadi titik simpul pergerakan. Adanya prasarana transportasi yang memiliki skala regional memungkinkan Kota Bogor lebih mudah dijangkau dari wilayah lainnya yang sekaligus menjadi pusat orientasi pergerakan menuju ke luar wilayah Bogor yang melalui Kota Bogor. Mengenai sistem jaringan jalan dan prasarananya dapat dilihat pada Gambar 3.7.

TABEL III.17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA BOGOR TAHUN 2000 DAN 2004
(Atas dasar harga konstan tahun 2000)

No.	Lapangan Usaha	2000	%	2004	%	Trend (%)
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN dan PERIKANAN	10,230.25	0.38	12,212.03	0.36	19.37
a.	Tanaman Bahan Makanan	5,642.13	0.21	7,127.53	0.21	26.33
b.	Tanaman Perkebunan	13.14	0.00	16.07	0.00	22.30
c.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,830.02	0.11	3,209.17	0.10	13.40
d.	Kehutanan	-	-	-	-	-
e.	Perikanan	1,744.96	0.07	1,859.26	0.06	6.55
2	PERTAMBANGAN dan HASIL-HASILNYA	-	-	-	-	-
a.	Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b.	Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c.	Penggalian	-	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	732,433.95	27.42	941,005.62	27.99	28.48
a.	Industri Migas	-	-	-	-	-
b.	Industri Tanpa Migas	732,433.95	27.42	941,005.62	27.99	28.48
4	LISTRIK, GAS dan AIR BERSIH	80,503.06	3.01	105,293.90	3.13	30.79
a.	Listrik	41,246.90	1.54	50,571.97	1.50	22.61
b.	Gas	28,987.68	1.09	40,177.25	1.20	38.60
c.	Air Bersih	10,268.48	0.38	14,544.68	0.43	41.64
5	BANGUNAN/KONSTRUKSI	219,288.08	8.21	255,205.11	7.59	16.38
6	PERDAGANGAN	866,819.47	32.45	1,030,723.00	30.66	18.91
a.	Perdagangan Besar dan Eceran	682,925.00	25.56	819,688.01	24.38	20.03
b.	Hotel	15,089.05	0.56	19,431.63	0.58	28.78
c.	Restoran	168,805.42	6.32	191,603.36	5.70	13.51
7	PENGANGKUTAN dan KOMUNIKASI	249,621.46	9.34	329,374.45	9.80	31.95
a.	Pengangkutan	190,695.10	7.14	239,745.39	7.13	25.72
1)	Angkutan Rel	5,149.43	0.19	5,641.30	0.17	9.55
2)	Angkutan Jalan Raya	165,944.35	6.21	210,470.14	6.26	26.83
3)	Jasa Penunjang Angkutan	19,601.32	0.73	23,633.95	0.70	20.57
b.	Komunikasi	58,926.36	2.21	89,629.06	2.67	52.10
8	KEUANGAN, PERSEWAAN dan JASA PERUSAHAAN	299,538.60	11.21	431,911.40	12.85	44.19
a.	Bank	91,180.94	3.41	142,535.41	4.24	56.32
b.	Lembaga Keuangan Selain Bank	46,163.92	1.73	72,603.18	2.16	57.27
c.	Sewa Bangunan	76,019.44	2.85	120,417.33	3.58	58.40
d.	Jasa Perusahaan	86,174.30	3.23	96,355.48	2.87	11.81
9	JASA-JASA	213,172.36	7.98	255,860.70	7.61	20.03
a.	Pemerintahan Umum	61,121.13	2.29	72,015.92	2.14	17.82
b.	Swasta	152,051.23	5.69	183,844.78	5.47	20.91
1)	Sosial Kemasyarakatan	71,754.26	2.69	82,488.70	2.45	14.96
2)	Hiburan dan Rekreasi	5,758.89	0.22	6,495.40	0.19	12.79
3)	Perorangan dan Rumah Tangga	74,538.08	2.79	94,860.68	2.82	27.26
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,671,607.23	100.00	3,361,586.21	100.00	25.83

Sumber : Bapeda - BPS Kota Bogor, 2005

MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SIPONEGORO
SEMARANG

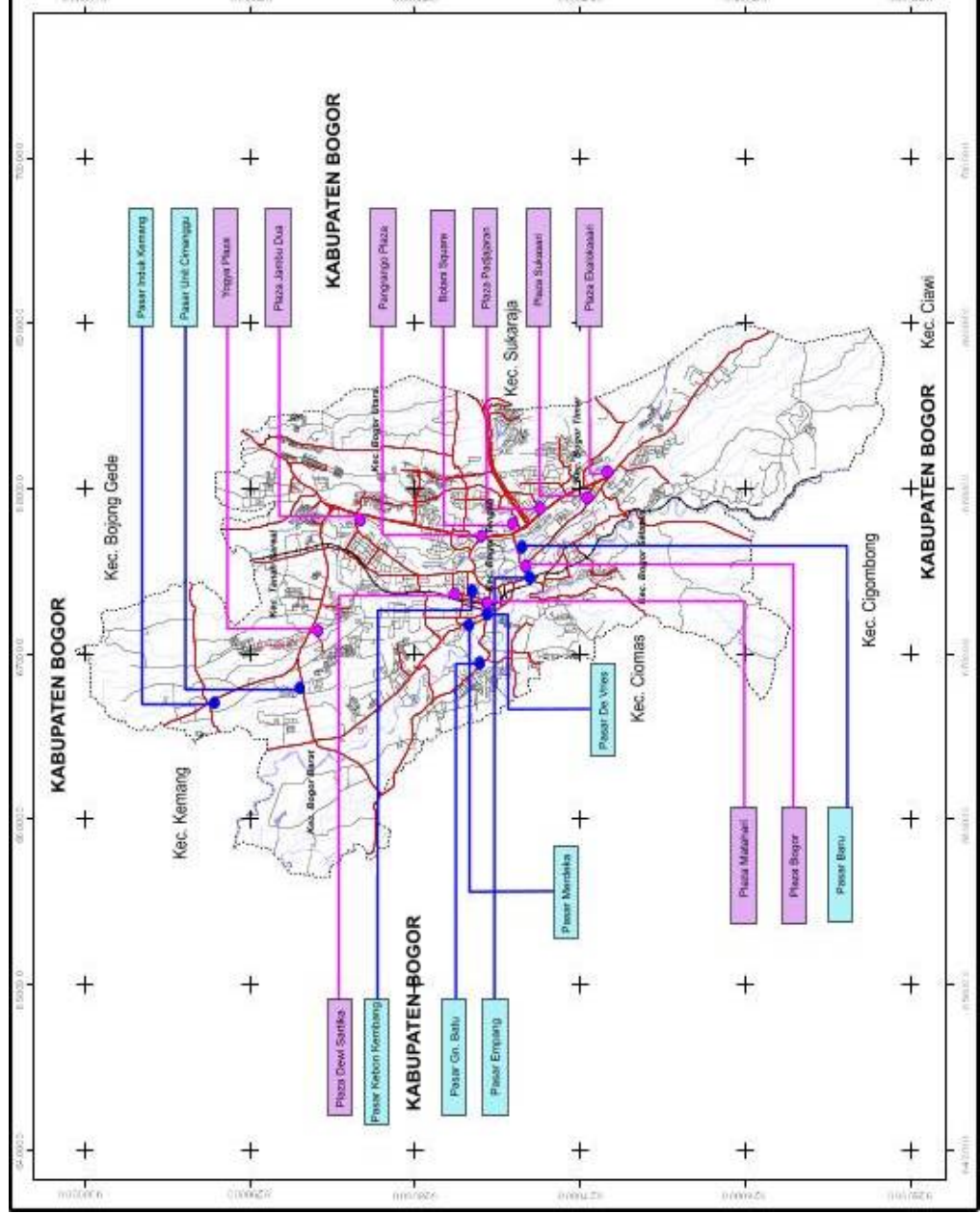
TEKNIK
PERENCANAAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT
DALAM KONTEKS KETERAMPILAN KOTA


PETA SEDERHANA FASILITAS PERDAGANGAN
 KOTA BOGOR

LEGENDA

- Batas Administrasi
- Riol Kontrol Aqib
- Jalan Utama
- Sungai
- Fasilitas Perdagangan
- Plaza

NO	SKALA
3.6	
LITAMPA	SUMBER
	MAPINDA KOTA BOGOR 2008




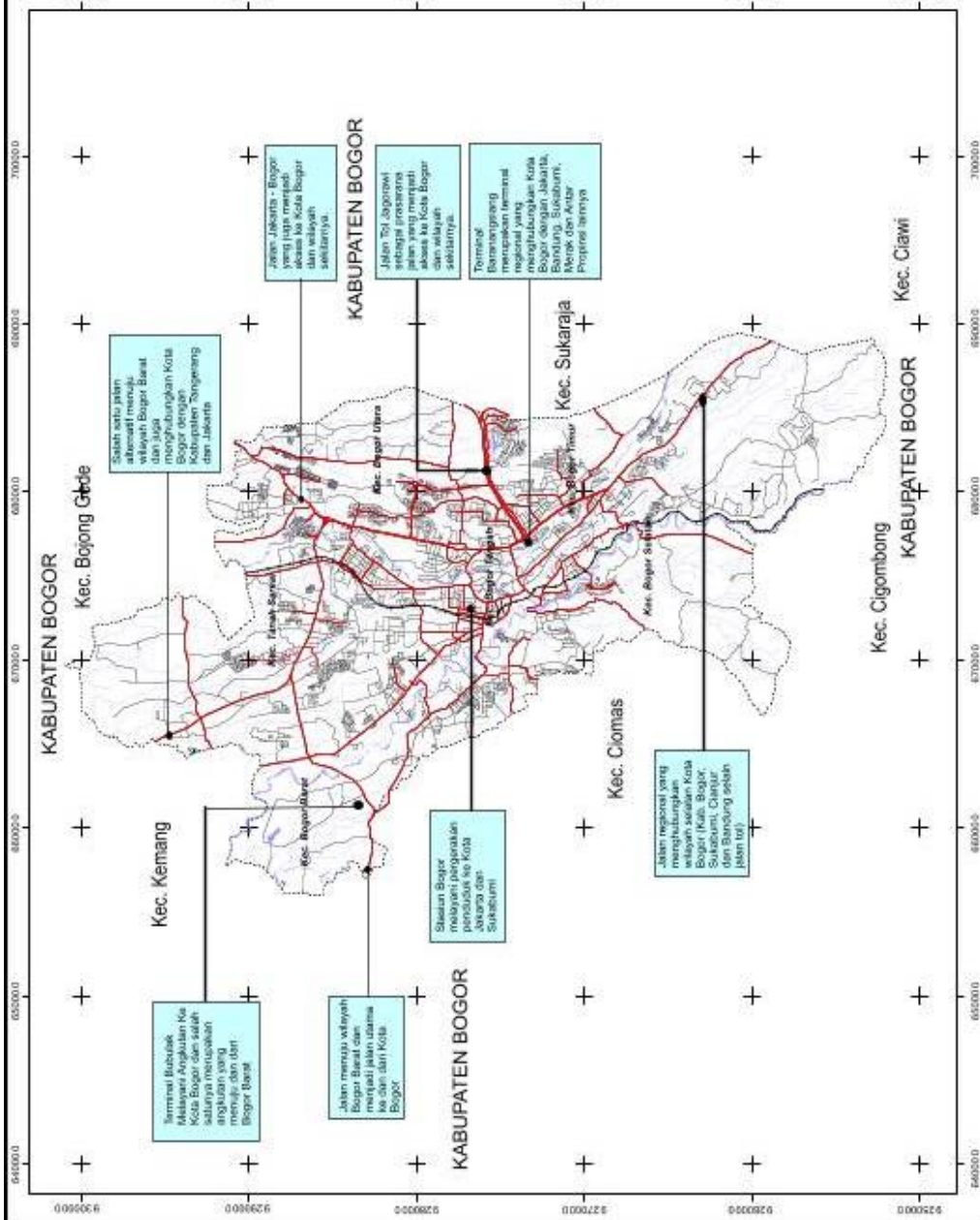

MAJISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT
DALAM KONTEKS KETERRUKAN DEKATAN

PETA AKSES ANTAR WILAYAH
KOTA BOGOR

LEGENDA:
 - - - - - Batas Administrasi
 - - - - - Rute Kecepatan Agri
 - - - - - Jalan Utama
 - - - - - Sungai

NO	SKALA
3.7	1 : 100.000
UTARA	SUMBER
	
MAPPIED KOTA BOGOR 2018	



645000 650000 655000 660000 665000 670000 675000 680000 685000 690000
 9250000 9260000 9270000 9280000 9290000 9300000 9310000 9320000 9330000 9340000

3.3 Sintesa

Wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor secara fisik menunjukkan adanya keterkaitan yang dapat dilihat berdasarkan jaringan jalan yang menghubungkan keduanya, terutama dengan adanya jalan propinsi Bogor-Rangkasbitung. Dengan melihat kondisi jaringan jalan dan prasarananya maka keterkaitan elemen-elemen lainnya seperti penduduk dan komoditi yang dihasilkan wilayah Bogor Barat akan mengalir ke Kota Bogor, bahkan ke wilayah lainnya di luar Kota Bogor. Dari aspek penduduk, jumlah penduduk wilayah Bogor Barat 1.085.594 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Bogor adalah 831.571 jiwa dengan fasilitas yang dimiliki Kota Bogor relatif lengkap maka jumlah penduduk Bogor Barat memiliki potensi dalam mendukung keterkaitan keduanya, untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sekolah, pasar, terminal, stasiun dan pusat perbelanjaan dan rekreasi lainnya yang memiliki jangkauan pelayanan regional.

Di sisi lain dengan adanya fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dalam memasarkan produk-produk wilayah Bogor Barat terutama produk pertanian yang dijual di Kota Bogor. Dari beberapa aspek tersebut diperkirakan kedua wilayah memiliki keterkaitan secara ekonomi maupun transportasi dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk kegiatan di Kota Bogor ataupun memanfaatkan fasilitas untuk tujuan menuju ke wilayah lainnya yang harus melewati dan memanfaatkan fasilitas Kota Bogor. Dengan demikian Kota Bogor dapat dianggap sentral bagi wilayah Bogor Barat untuk pemasaran komoditi hasil produksi pertanian, pusat belanja bagi pemenuhan konsumsi, orientasi bekerja, sekolah dan wisata yang titik simpulnya berada di Kota Bogor.

BAB IV

ANALISIS KETERKAITAN DESA-KOTA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BOGOR BARAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis keterkaitan wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor dilihat dari elemen keterkaitan ekonomi, fisik dan pelayanan transportasi serta sistem kota. Dari aspek yang dianalisis tersebut kemudian dianalisis implikasinya terhadap pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat.

4.1 Analisis Keterkaitan Ekonomi

Interaksi ekonomi sebagai salah satu keterkaitan wilayah dapat meningkatkan integrasi spasial. Keterkaitan yang paling penting adalah jaringan pemasaran dimana komoditi, bahan mentah dan produk-produk pengolahan mengalir antar permukiman, aliran modal dan pendapatan, keterkaitan produksi ke depan dan ke belakang antara industri dan proses pengolahan hasil pertanian. Meningkatnya keterkaitan pasar merupakan suatu kekuatan utama di dalam perdagangan hasil pertanian, penganekaragaman produksi dan perluasan pertukaran sistem spasial. Karena pasar sebagai saluran utama bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan pelayanan dasar maka dapat memiliki efek yang sangat luas dan memberikan keuntungan kepada petani. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan tawar petani melalui peningkatan informasi harga dan persaingan pasar, mengurangi ongkos distribusi secara fisik dan transaksi melalui standarisasi prosedur pasar dan memungkinkan petani menggunakan alat perangkutan barang mereka secara lebih efisien (Rondinelli, 1985: 144).

Dalam kaitannya dengan studi ini maka keterkaitan ekonomi ini dapat dilihat berdasarkan elemen keterkaitannya yang dijadikan sebagai fokus kajian. Beberapa elemen tersebut adalah sebagai berikut:

Pola Pasar, dalam mengidentifikasi keterkaitan ekonomi wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor ini diawali dengan melihat keterkaitan pasar sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditi. Pasar merupakan titik sentral aliran komoditi dari beberapa wilayah yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual yang mungkin sekaligus sebagai konsumen. Keterkaitan pemasaran dan pasar yang meningkat di dalam suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan jaringan dan pasar yang terintegrasi, memperluas pertukaran komoditi pertanian dan menambah akses yang lebih luas bagi penduduk pedesaan terhadap barang dan pelayanan dasar (Rondinelli, 1985: 144).

Pasar di Kota Bogor yang telah diidentifikasi meliputi Pasar Bogor, Pasar Kebon Kembang (Pasar Anyar) dan Pasar Induk Kemang Secara umum, pasar di Kota Bogor merupakan pasar harian yang aktivitasnya bisa mencapai malam hari terutama untuk perdagangan sayuran, palawija dan buah-buahan. Lokasi pasar Kebon Kembang dan Pasar Bogor berada di pusat kota sedangkan Pasar Induk Kemang berada di luar pusat kota. Keuntungan lokasi pasar ini adalah masing-masing dilayani oleh jalur transportasi ke luar kota meskipun untuk Pasar Induk dilayani angkutan yang lebih sedikit dibandingkan dengan lokasi lainnya. Pasar Kebon Kembang bahkan memiliki keunggulan dalam pelayanan transportasi, disamping menjadi lintasan angkutan luar kota juga berdekatan dengan stasiun kereta api.

Pasar Kebon Kembang merupakan pasar yang memiliki keanekaragaman komoditi yang luas (adanya komoditi pakaian dan barang-barang non hasil bumi lainnya) sementara Pasar Bogor merupakan pasar yang komoditi utamanya merupakan hasil-hasil pertanian. Begitu pula dengan Pasar Induk Bogor yang memiliki spesialisasi di komoditi sayuran, palawija dan buah-buahan dengan penjualan skala besar. Oleh karenanya pasar di Kota Bogor ini menjadi sentral bagi pasar-pasar di wilayah Bogor Barat dalam menyediakan komoditi-komoditinya di samping komoditi dari pasar atau sumber lainnya. Dari kapasitas pedagang berkisar antara 1000 sampai dengan 2000 pedagang, dan retribusi yang dihasilkan antara Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- per hari. Kapasitas lahan pada umumnya masih tersedia tetapi banyak pedagang yang mengisi lahan lainnya untuk menjadi tempat berjualan.

Pasar-pasar di Wilayah Bogor Barat yang telah diidentifikasi meliputi Pasar Leuwiliang, Pasar Jasinga, Pasar Tenjo dan Pasar Parung Panjang, umumnya merupakan pasar harian namun ada beberapa pasar yang memiliki hari pasar seperti Pasar Tenjo (Hari Senin dan Kamis) dan Pasar Parung Panjang (Hari Selasa dan Sabtu) dan mendapatkan komoditinya berasal dari Kota Bogor, seperti Pasar Leuwiliang dan Pasar Jasinga yang secara geografis memiliki hubungan transportasi langsung ke Kota Bogor. Begitu pula dengan Pasar Parung Panjang dalam menyediakan komoditinya, ada yang didatangkan dari Pasar Induk Bogor, meskipun sebagian besar berasal dari Pasar Kota Tangerang. Lain halnya dengan Pasar Tenjo, yang merupakan pasar yang dikelola oleh desa dalam menyediakan komoditinya lebih berorientasi ke wilayah Tangerang. Produk unggulan pasar di

wilayah Bogor Barat adalah sayuran dan sembako (Berdasarkan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 7 Pebruari 1998, sembako terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng dan margarin, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam beryodium). Jumlah pedagang berkisar antara 100 sampai dengan 500 orang dan besarnya retribusi yang terkumpul antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- setiap harinya. Kapasitas lahan umumnya masih memenuhi tetapi pedagang lebih suka berjualan ke luar bangunan pasar.

Dari kondisi tersebut pasar di Kota Bogor yang menjadi pusat pemasaran komoditi merupakan pasar yang memiliki pelayanan ke wilayah Bogor Barat dalam menyediakan komoditi bagi pasar atau penduduk di wilayah Bogor Barat. Pasar yang memiliki keterkaitan dengan pasar Kota Bogor ini adalah Pasar Leuwiliang, Pasar Jasinga dan Pasar Parung Panjang. Pelayanan masing-masing pasar di Wlayah Bogor Barat ini mengikuti pola permukiman, yaitu permukiman di sekitar jalur utama memiliki pasar utamanya adalah Pasar Leuwiliang dan Pasar Jasinga, sedangkan pasar di bagian utara adalah Pasar Parung Panjang. Wilayah pengaruh dari pasar tersebut dapat dilihat berdasarkan asal pedagang dan pembeli yang menuju masing-masing pasar baik permukiman yang memiliki pasar lokal maupun yang tidak memiliki pasar lokal. Mengenai keterkaitan pasar dan wilayah pengaruhnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.

Aliran Bahan Baku dan Setengah Jadi, hasil survei di masing-masing lokasi pasar dapat diidentifikasi aliran asal dan tujuan komoditi baik antar pasar maupun keterkaitan antar wilayah Kota Bogor, wilayah Bogor Barat dan lainnya.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TEKNIK
PENGEMBANGAN WILAYAH BOGOR BARAT
DALAM KONTEKS KETERAMPILAN DESA KOTA

PETA KETERAMPILAN PASAR

LEGENA

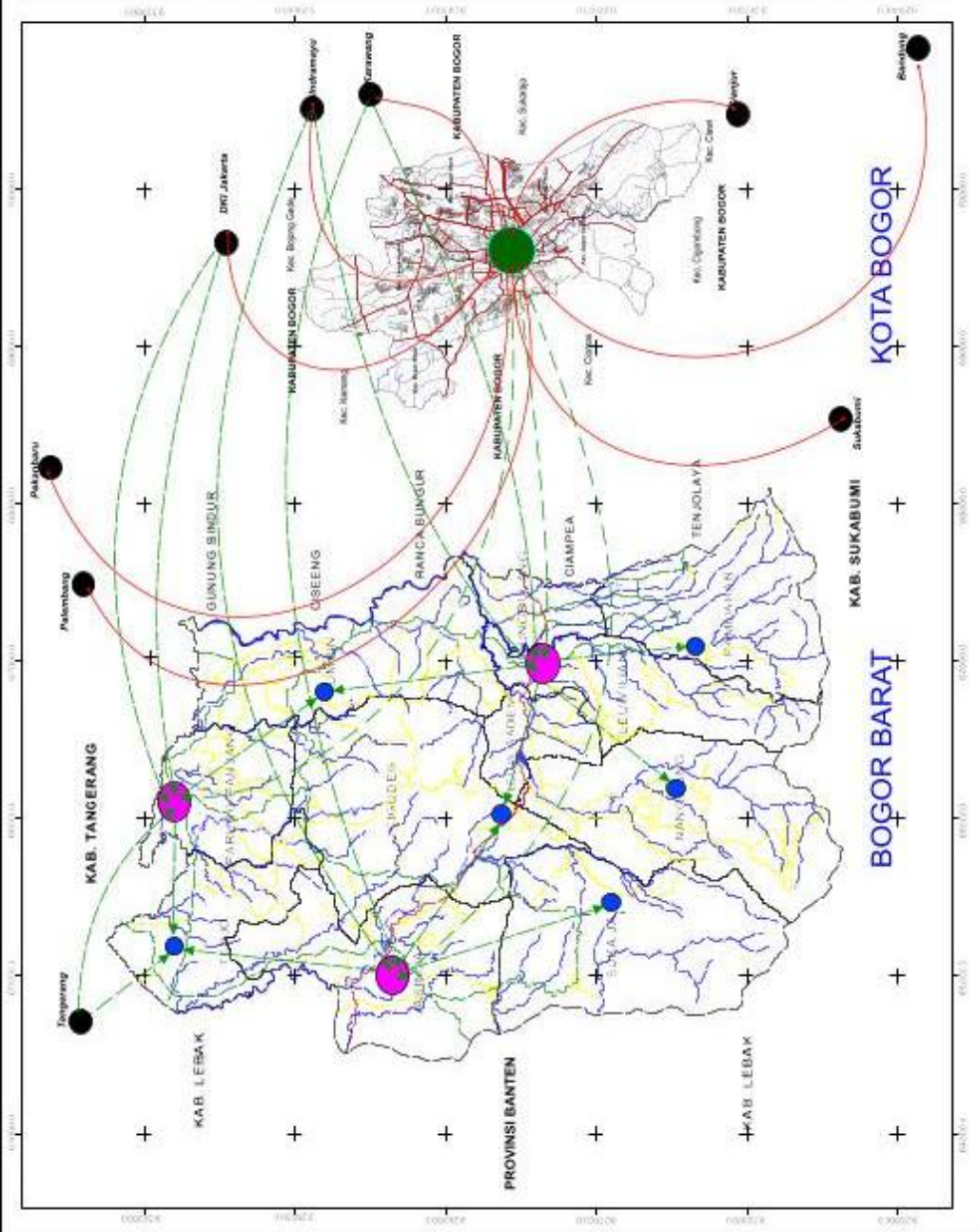
- Batas Administrasi
- Sungai
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

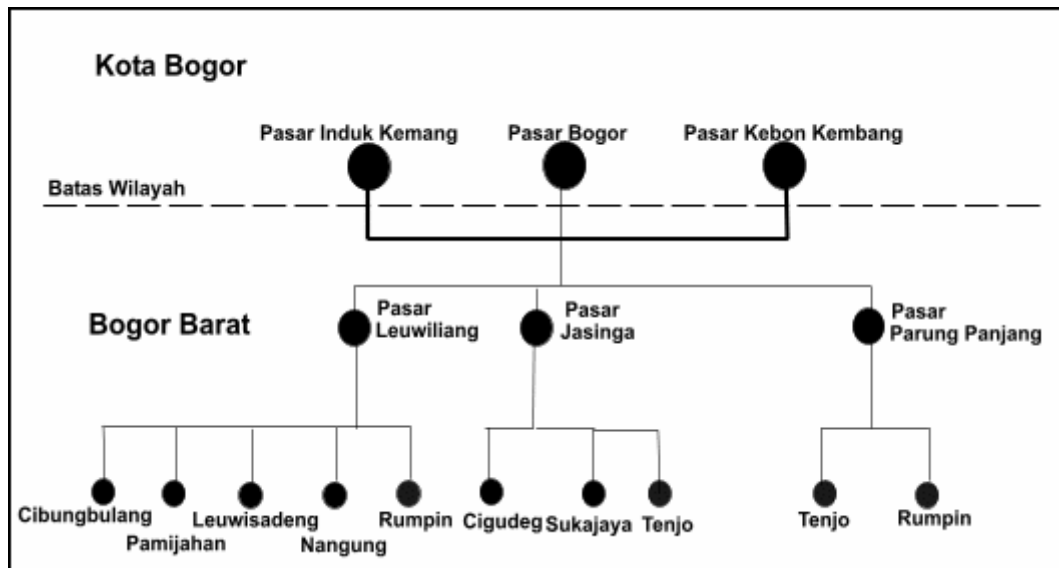
Aliran Bering ke Pasar Kota Bogor
Aliran Bering ke Pasar Bogor Barat

Pasar Kota Bogor
Pasar Regional Bogor Barat
Pasar Lokal Bogor Barat
Pasar/Sumber Produksi di luar Wilayah Studi

NO	SKALA
4.1	
UTARA	

SURvei KAWASAN WILAYAH KOTA 2008
KABUPATEN BOGOR, 2008
HASS, DIAL, SRI, 2007





Sumber : Hasil Analisis, 2007

GAMBAR 4.2
KETERKAITAN PASAR DAN WILAYAH PENGARUNYA

Dari komoditi yang disurvei seperti komoditi beras, palawija, sayuran dan buah-buahan, dapat diketahui asal dan tujuan komoditi tersebut. Jika dilihat berdasarkan aliran barang yang terjadi di pasar Kota Bogor dapat dijelaskan bahwa untuk komoditi beras di masing-masing lokasi pasar berasal dari luar wilayah yang menjadi penghasil beras seperti Karawang, Cianjur, dan Indramayu. Di samping itu asal komoditi ini juga dapat dilihat dari keterkaitan dengan pasar lainnya seperti dengan Pasar Induk Jakarta.

Dari kondisi ini Wilayah Bogor Barat masih mengandalkan beras dari wilayah lainnya, meskipun potensi pertanian komoditi padi cukup besar. Sementara itu untuk komoditi palawija berasal dari Cianjur (Cipanas dan Pacet) yang meliputi jagung dan ubi. Komoditi lainnya juga berasal dari Wilayah Kabupaten Bogor seperti Cijeruk dan Kota Bogor seperti Cimahpar. Di samping itu komoditi ini juga didatangkan dari pasar Induk Bogor untuk dijual kembali di Pasar Anyar dan Pasar Bogor.

Komoditi Sayuran umumnya berasal dari Malang (kentang dan kol), Bandung (wortel dan kol), Cipanas (wortel, kol, kacang panjang), Sukabumi (pet sin). Komoditi sayuran yang berasal dari wilayah Bogor Barat seperti daun singkong dan katuk. Daerah lainnya yang menjadi asal komoditi sayuran adalah Pekanbaru (bawang putih) dan Brebes (bawang merah). Di samping daerah-daerah tersebut, pedagang di Pasar Anyar dan Bogor ini juga mendatangkannya dari Pasar Induk Bogor.

Komoditi buah-buahan umumnya berasal dari produsen buah-buahan unggulan seperti dari Palembang, sedangkan buah-buahan lainnya berasal dari wilayah Bogor Barat seperti manggis, cempedak dan durian dari Leuwiliang. Untuk komoditi buah-buahan lainnya seperti jeruk, apel dan pisang didatangkan dari pasar induk Jakarta yang merupakan mata rantai pedagang buah-buahan.

Di samping produk-produk yang disebutkan di atas, komoditi yang merupakan hasil pengolahan seperti kue, kerupuk dan keripik, umumnya berasal dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Namun demikian daerah lainnya juga mengirim produk seperti ini melalui *sales/distributor* yang membawa berbagai komoditi seperti dari Jakarta.

Dengan melihat asal pembeli dan barang dapat diidentifikasi tujuan dari komoditi-komoditi tersebut sampai kekonsumen atau menjadi bahan yang dapat diperjualbelikan di pasar yang berada di hirarki yang lebih rendah. Dalam hubungannya dengan keterkaitan komoditi antara Pasar di Kota Bogor dengan Pasar di Wilayah Bogor Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komoditi beras umumnya berasal dari luar wilayah seperti Karawang, Indramayu, Labuan (Pandegelang), Jakarta dan Tangerang. Dalam skala yang kecil komoditi ini didatangkan dari Dramaga dan Cibungbulang.
2. Komoditi Palawija berasal dari produk lokal seperti ubi kayu (Leuwiliang), Pasar Induk Kota Bogor dan Serang, Ciawi dan Tangerang.
3. Komoditi Sayuran, umumnya berasal dari Pasar Induk Kota Bogor, ada juga yang berasal dari Jakarta, Tangerang dan wilayah Kabupaten Bogor lainnya seperti Ciawi.
4. Komoditi Buah-buahan didatangkan dari kecamatan-kecamatan di Wilayah Bogor Barat seperti Leuwiliang (manggis, durian), Jasinga (cempedak), dan Cigudeg (pisang). Daerah lainnya yang menjadi asal komoditi ini adalah Pasar Induk Kota Bogor, Jakarta dan Tangerang.

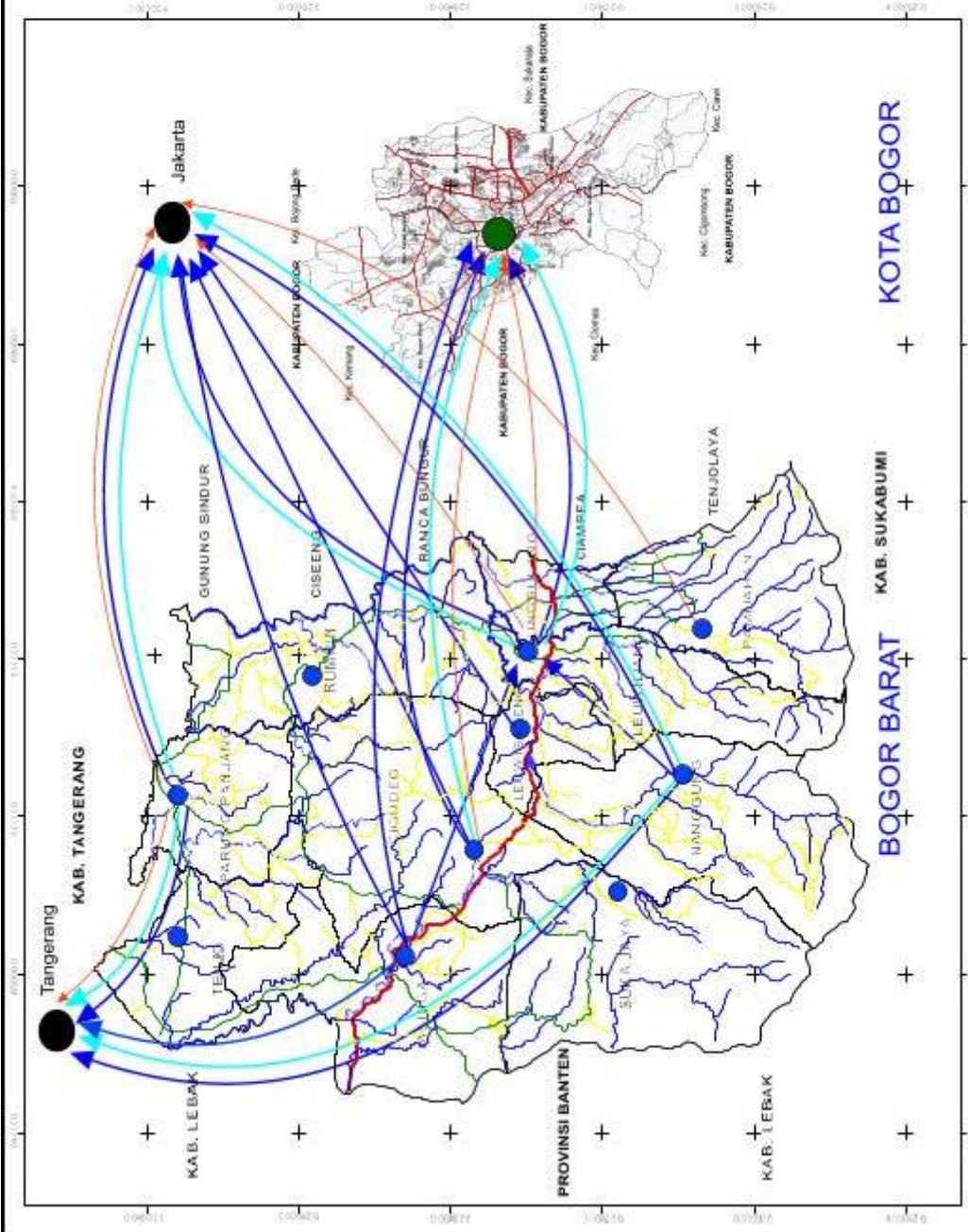
Mengenai aliran komoditi dari Wilayah Bogor Barat dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.

Aliran Modal, sebagai wilayah yang terbuka dimana arus mobilisasi orang dan modal bergerak bebas, maka tidak menutup kemungkinan terjadi aliran modal dari wilayah Kota Bogor dan wilayah lainnya ke Bogor Barat. Indikasi ini dapat dilihat dari pengembangan kegiatan-kegiatan yang dimiliki penduduk luar Bogor Barat seperti pemilikan lahan pertanian, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Begitu pula institusi perbankan dan keuangan lainnya yang berada di wilayah Bogor Barat yang menjadi perpanjangan tangan institusi di Kota Bogor. Hal lainnya juga berkembang di sektor perdagangan dan jasa, yang berada di kota-kota kecamatan atau di sekitar lokasi pasar.

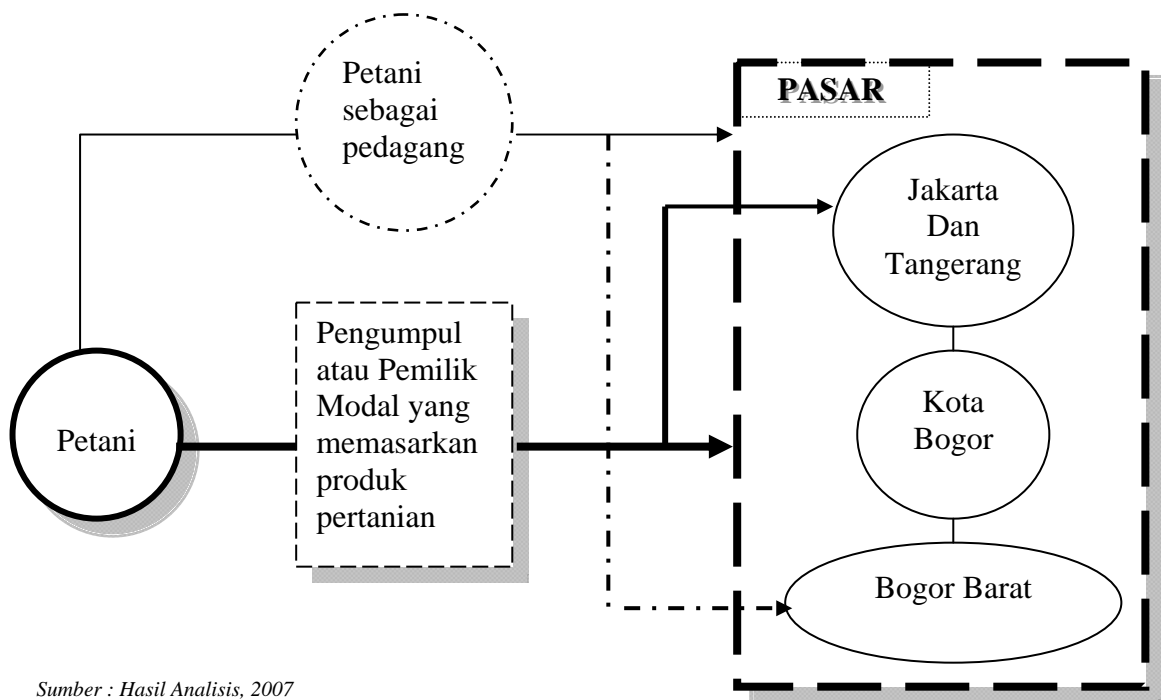
- LEGENDA
- Batas Administrasi
 - Saluran Air
 - Jalan Komoditi
 - Jalan Lokal
 - Rasi Sempit, Ase

- Kota Jakarta/Tangerang
- Kota Bogor
- Kota Kacamatan
- Aliran Komoditi Persepsi
- Aliran Komoditi Sayuran
- Aliran Komoditi Buah-buahan

NO	SKALA
4.3	1 : 100.000
UTARA	SUMBER
	BAGIAN KABUPATEN BOGOR, 2008 BAGIAN KOTA BOGOR, 2008 HSE JAWABDI, 2017



BOGOR BARAT + **KAB. SUKABUMI** + **KOTA BOGOR**



Sumber : Hasil Analisis, 2007

GAMBAR 4.4
SKEMA PEMASARAN KOMODITI DI BOGOR BARAT

Ini menunjukkan bahwa aliran modal ke wilayah Bogor Barat sebetulnya sangat potensial bagi pengembangan wilayahnya. Aliran modal ini jika dilihat kepada kegiatan pertanian menunjukkan masih rendahnya aliran modal yang diterima petani dalam mendukung kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil survei, secara umum dalam usaha taninya menggunakan modal sendiri, sedangkan adanya bantuan dari pemilik lahan atau pemilik modal mencapai 3% – 6%. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pertanian di Bogor Barat.

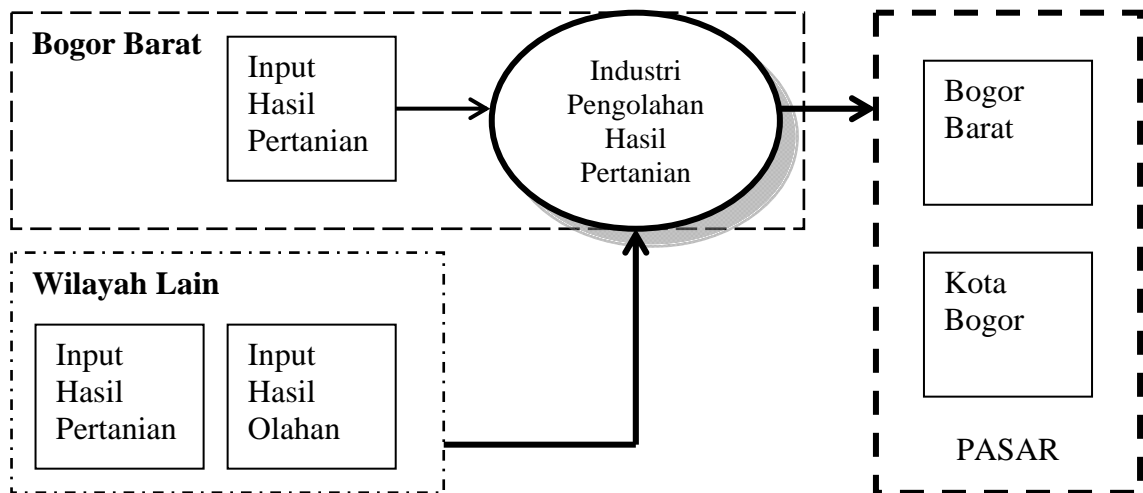
Aliran Belanja, Salah satu elemen interaksi wilayah dapat dilihat dari mobilitas orang dalam hal ini adalah asal pembeli dan penjual. Ketiga Pasar di Kota Bogor ini memiliki total pedagang sebanyak 5.200 orang, dengan asal pedagang datang dari Kota Bogor, Jakarta, Leuwiliang, Ciampea, Cibungbulang,

dan Kabupaten Bogor lainnya seperti Citeureup, Ciawi, Cijeruk dan sebagainya. Begitu pula dengan asal pembelinya, tidak hanya dari Kota Bogor tetapi juga berasal dari Jasinga, Leuwiliang, Ciampea, Cibungbulang dan Kabupaten Bogor lainnya seperti Citeureup, Ciawi, Cijeruk dan sebagainya. Dengan melihat kondisi ini maka kedua wilayah memiliki keterkaitan terutama keterkaitan penduduk dalam belanja atau penjualan, dimana penduduk wilayah Bogor Barat melakukan penjualan dan belanja di wilayah Kota Bogor.

Berdasarkan hasil survei terhadap petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya adalah dengan belanja ke pasar-pasar terdekat atau pasar yang berada di Kecamatannya yakni sebesar 30% – 70%, sedangkan yang pergi ke Kota Bogor hanya sekitar 6%. Pasar-pasar di Wilayah Bogor Barat ini dapat melayani beberapa kecamatan di sekitarnya dilihat dari asal pedagang dan pembeli yang datang dari Kecamatan Leuwiliang, Rumpin, Ciampea, Cibungbulang, Nanggung, Jasinga, Tenjo, Parung Panjang, Tigaraksa (Tangerang) dan Maja (Rangkasbitung). Mengenai asal pembeli dan penjual seperti pada Gambar 4.5.

Keterkaitan Produksi, salah satu yang menjadi aktivitas masyarakat selain pertanian adalah kegiatan industri kecil. Berdasarkan data yang ada keberadaan industri kecil yang mengolah hasil pertanian belum berkembang di semua kecamatan. Beberapa jenis industri yang ada di masyarakat adalah industri dodol, kerupuk dan keripik serta tempe. Hasil wawancara dengan pengusaha industri tersebut, tidak semua industri ini memiliki keterkaitan ke belakang (bahan baku) dengan produksi pertanian wilayah Bogor Barat, dengan demikian kegiatan industri belum optimal terkait dengan sektor pertanian.

Industri dodol misalnya mendapatkan input berupa beras ketan, kelapa, gula merah dan gula putih. Dari bahan baku yang digunakan tersebut berasal dari Rangkasbitung (gula merah dan kelapa) sedangkan ketan dan gula putih didatangkan dari Tangerang. Begitu pula industri kerupuk, bahan baku yang digunakan merupakan tepung tapioka yang didatangkan dari Bojonegoro yang memiliki agen di Kota Bogor atau tapioka yang berasal dari Lampung yang mereka peroleh dari Cilegon. Lain halnya dengan industri keripik, masih menggunakan bahan baku ubi kayu yang didatangkan dari Kecamatan Cigudeg di wilayah Bogor Barat. Skema keterkaitan industri dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Sumber : Hasil Analisis, 2007

GAMBAR 4.6
SKEMA KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

4.2 Analisis Keterkaitan Fisik dan Pelayanan Transportasi

Jaringan transportasi baik alamiah (sungai, laut) maupun hasil perencanaan manusia (jaringan jalan dan rel kereta) yang merupakan elemen keterkaitan secara fisik dapat menjadi sarana integrasi berbagai permukiman.

Penyediaan jaringan jalan atau sarana transportasi lainnya dapat mengurangi waktu tempuh dan biaya, memperluas pemasaran, mendorong kesempatan untuk migrasi dan pergerakan penduduk antar kawasan (komuter), kemudahan untuk tumbuhnya tenaga kerja sektor non pertanian, meningkatkan komunikasi dan perluasan wilayah pelayanan.

Jaringan jalan kawasan pertanian dan pasar telah meningkatkan dan menumbuhkan pasar baru di kawasan pedesaan, meningkatkan interaksi antar desa, menghubungkan wilayah produksi pertanian dengan pusat pengumpul dan distribusi serta menciptakan kesempatan komoditi pertanian menjadi lebih ekonomis. Suatu wilayah yang sulit mendapatkan akses ke pusat aktivitas biasanya dicirikan oleh mobilitas penduduk yang rendah, pertanian subsisten dan bersifat lokal serta rendahnya tingkat perdagangan antar wilayah (Rondinelli, 1985: 144).

Pada dasarnya wilayah Bogor Barat memiliki jalan utama yang menghubungkan wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor yang dikenal dengan jalan lintas Bogor – Jasinga (Jalan Propinsi/regional). Umumnya pergerakan kedua wilayah ini menggunakan jalur ini sebagai jalur pergerakan utama untuk menjangkau beberapa kecamatan di bagian tengah (kecamatan-kecamatan yang di lalui jalan tersebut) untuk selanjutnya menggunakan jalan lokal di masing-masing kecamatan. Berbeda halnya dengan kecamatan di bagian utara (Tenjo, Parung Panjang dan Rumpin) di samping dapat dijangkau dari jalan Bogor – Jasinga tersebut, dapat menggunakan jalur lainnya yaitu jalan yang menghubungkan Bogor – Tangerang melalui kecamatan Kemang, Parung dan Gunung Sindur.

Bahkan di wilayah utara ini terutama Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang memiliki jaringan jalan yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten/Kota Tangerang. Di kedua kecamatan tersebut, juga terdapat jaringan rel kereta api yang menghubungkan wilayah Jakarta dengan Rangkasbitung, sehingga penduduk di wilayah ini dapat juga menggunakan prasarana ini untuk memudahkan pergerakan khususnya ke Tangerang dan Jakarta.

Keterkaitan transportasi ini menjadi sangat penting tidak hanya menghubungkan permukiman di suatu wilayah tetapi memberikan kemudahan terhadap penduduk desa untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kota. Kondisi ini dapat terjadi apabila didukung dengan kualitas jalan yang menjadi prasarana pergerakan penduduk. Jika dilihat kondisi jaringan jalan (lihat Tabel III.11), sebesar 47,86 % jaringan jalan di wilayah Bogor Barat dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Hal ini akan mempengaruhi pergerakan penduduk ke wilayah lainnya. Bahkan jalan di Kecamatan Parung Panjang termasuk dalam rusak berat mengingat kendaraan yang melintasinya merupakan kendaraan yang mengangkut bahan galian. Secara fisik pun jarak ke Kota Bogor cukup jauh (70 km) begitu pula dengan Kecamatan Tenjo, sehingga orientasi penduduknya lebih mudah menjangkau Kota Tangerang dan Jakarta karena jarak dan ketersediaan jalan yang memadai.

Keberadaan jaringan jalan ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas tidak terlepas dari adanya sarana transportasi yang mampu menghubungkan ke beberapa wilayah baik di dalam wilayah Bogor Barat maupun ke wilayah luarnya. Dari sisi jumlah angkutan umum yang terdapat di wilayah

Bogor Barat ada yang melayani antar kecamatan dan ada juga yang menghubungkan desa-desa di wilayah kecamatan.

Angkutan yang menghubungkan wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor yaitu Angkutan Leuwiliang – Dramaga – Terminal Laladon/Bubulak dan Jasinga – Leuwiliang – Terminal Laladon/Bubulak. Kedua trayek angkutan ini sepenuhnya menggunakan jalan arteri Bogor – Jasinga. Di samping kedua trayek ini yang menghubungkan Kota Bogor dengan Wilayah Bogor Barat, ada juga angkutan yang melintasi Wilayah Bogor Barat ini dengan menggunakan jaringan jalan arteri Bogor – Jasinga yaitu angkutan regional Kota Bogor – Rangkasbitung (Kabupaten Lebak). Wilayah Bogor Barat ini juga terutama Kecamatan Jasinga, Tenjo dan Parung Panjang dilayani juga angkutan regional yang menghubungkan dengan Jakarta. Angkutan tersebut adalah Jasinga – Jakarta (Kalideres) melalui Jasinga – Tenjo – Tigaraksa – Tangerang – Jakarta.

Dengan melihat kondisi seperti ini maka wilayah Bogor Barat memiliki keterkaitan transportasi dengan Kota Bogor dengan adanya pelayanan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan keduanya, baik secara langsung maupun secara berjenjang. Di sisi lain keterkaitan transportasi ini juga dapat melihat orientasi pergerakan wilayah, tidak hanya ke Kota Bogor tetapi juga ke wilayah lainnya terutama kecamatan-kecamatan di bagian utara yaitu Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Parung panjang yang pergerakannya diperkirakan lebih mengarah ke Tangerang dan Jakarta, dengan adanya dukungan prasarana kereta api. Beberapa kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan lainnya menjadi pintu keluar wilayah Bogor Barat seperti Kecamatan Jasinga, Kecamatan Tenjo,

Kecamatan Parung Panjang dan Kecamatan Rumpin. Mengenai keterkaitan transportasi ini dapat dilihat pada Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9.

4.3 Analisis Sistem Kota

Perkembangan wilayah Bogor Barat sangat dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing kecamatan dan pusat-pusat pemukiman dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Perkembangan wilayah ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Wilayah yang berada di sekitar koridor sepanjang jalan arteri Kota Bogor – Jasinga (menuju Rangkasbitung) memiliki orientasi perkembangan ke arah Kota Bogor. Dengan kondisi seperti ini terdapat kota-kota kecamatan yang relatif lebih berkembang di wilayah ini serta memiliki kemudahan dalam menjangkau wilayah Kota Bogor seperti Kota Leuwiliang, Cigudeg dan Jasinga, Leuwisadeng dan Cibungbulang.
2. Wilayah yang berada di sekitar perbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang di bagian utara yang memiliki orientasi ke arah Tangerang dan Jakarta dengan adanya kemudahan pelayanan angkutan ke wilayah tersebut dibandingkan ke arah Kota Bogor. Di wilayah ini pengaruh Kabupaten Tangerang dan Jakarta umumnya sangat dominan, baik ketersediaan angkutan maupun aliran komoditinya. Di samping angkutan jalan raya di wilayah ini juga dilayani oleh angkutan rel kereta api yang menghubungkan Merak – Jakarta dan di beberapa wilayah terdapat stasiun yang memungkinkan orang dan barang bergerak lebih cepat.



MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

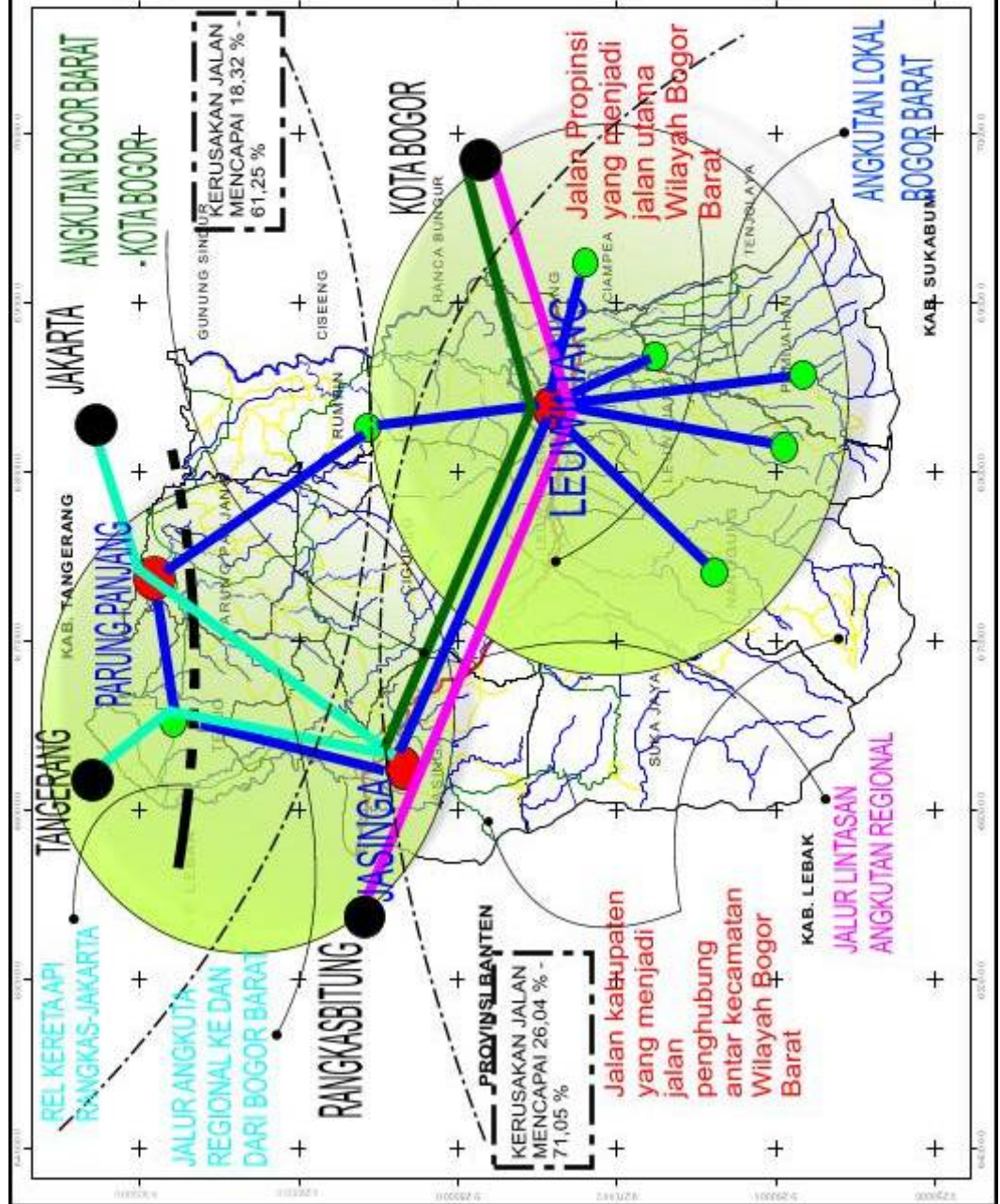
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PENGEMBANGAN DUNIA WILAYAH BOGOR BARAT
DALAM KONTEKS KETERANGAN TERKAIT

PELAJARI
PETA ANALISIS TRANSPORTASI
WILAYAH BOGOR BARAT

- LEGENDA
- Batas Administrasi
 - Sungai
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Kota

- Kota utama tujuan angkutan
- Terminal Bogor Barat
- Lokasi yang dilayani angkutan
- Limasan regional ke Kota Bogor
- Limasan regional ke Tangerang dan Jakarta
- Limasan Angkutan Bogor Barat ke Kota Bogor
- Limasan Angkutan Lokal Bogor Barat

NO	SKALA
4.8	1 : 100.000
UTARA	SUMBER
	BARUCIA ARIANTO/BOGOR, 2008 MABAL/ANALISIS, 2007



REL KERETA API RANGKAS-JAKARTA

JALUR ANGKUTAN REGIONAL KE DAN DARI BOGOR BARAT

JALUR LINTASAN ANGKUTAN REGIONAL

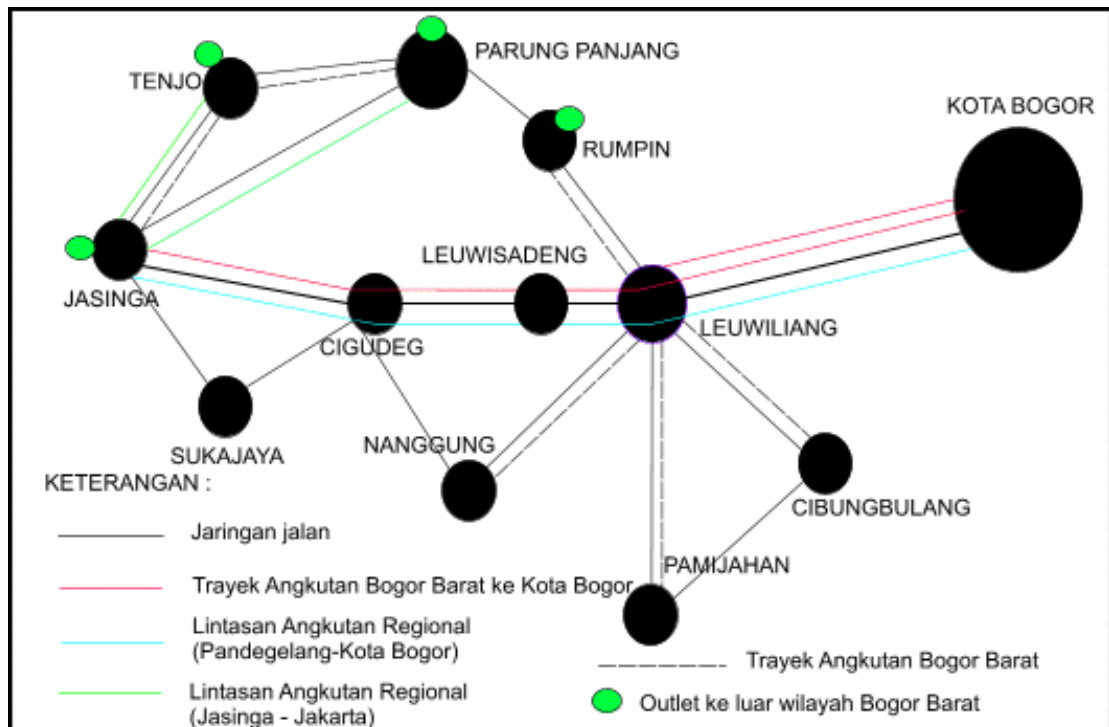
Jalan kabupaten yang menjadi jalan penghubung antar kecamatan Wilayah Bogor Barat

Jalan Propinsi yang menjadi jalan utama Wilayah Bogor Barat

Kerusakan Jalan mencapai 71,05%

Kerusakan Jalan mencapai 18,32%

640000 650000 660000 670000 680000 690000 700000
1000000 1010000 1020000 1030000 1040000 1050000



Sumber : Hasil Analisis, 2007

GAMBAR 4.9
KETERKAITAN JALAN DAN ANGKUTAN DI WILAYAH BOGOR
BARAT DAN KOTA BOGOR

Di wilayah ini, kota kecamatan yang berkembang adalah Kota Tenjo dan Kota Parung Panjang, yang wilayahnya langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang.

3. Wilayah yang berada di antara keduanya baik di bagian utara maupun di bagian selatan jalur utama. Wilayah-wilayah yang berada di bagian selatan memiliki orientasi pergerakannya ke bagian tengah yang menjadi satu-satunya akses ke bagian luar Wilayah Bogor Barat. Sementara wilayah di bagian utara memiliki jaringan jalan yang dapat berhubungan dengan kecamatan di sekitarnya. Wilayah yang berada di utara dan selatan ini memiliki kesamaan dalam ketersediaan jaringan jalan kabupaten dan masih didominasi oleh

kegiatan pertaniannya. Kecamatan-kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Pamijahan dan Rumpin.

Dari ketiga karakter perkembangan wilayah Bogor Barat ini, maka dapat dilihat bagaimana orientasi masing-masing kecamatan baik secara internal di wilayah Bogor Barat maupun ke wilayah di luar Bogor Barat (Kota Bogor, Tangerang, Rangkasbitung dan Jakarta). Kondisi ini juga dapat dilihat tidak hanya sebagai suatu hubungan antar kecamatan tetapi lebih mengarah kepada hubungan fungsional antara kota yang menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan desa sebagai wilayah hinterlandnya, yang menjadi produsen bagi kebutuhan penduduk perkotaan.

Hubungan fungsional antara kota-desa harus diusahakan sebagai hubungan interdependensi. Kebijakan yang mengarah kepada kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan dan berbasis penguatan ekonomi rumah tangga yang diikuti perbaikan infrastruktur, khususnya aksesibilitas antara kota-desa, diharapkan mampu menahan laju proses aglomerasi penduduk di perkotaan dan menciptakan hubungan kota-desa yang serasi (Anwar dan Hadi, 1996: 60).

Pusat dan daerah belakang (*hinterland*) dalam suatu wilayah nodal mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal. Perkembangan suatu pusat sangat tergantung pada perkembangan daerah belakang dan sebaliknya. Fungsi dari suatu pusat adalah pusat permukiman, pusat pelayanan, pusat industri dan perdagangan bahan mentah (Budiharsono, 2005: 150). Sedangkan fungsi daerah

belakang adalah penyedia bahan mentah dan sumberdaya dasar, daerah pemasaran barang-barang industri dan pusat kegiatan pertanian.

Untuk menentukan pusat-pusat pelayanan di wilayah Bogor Barat dilakukan identifikasi berdasarkan pusat-pusat permukiman yang mengacu kepada desa kota di masing-masing kecamatan. Desa kota yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor dan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Bogor. Selanjutnya dapat diidentifikasi mengenai jumlah penduduk, fasilitas dan jenis fasilitas yang dimiliki masing-masing desa kota di kota kecamatan tersebut.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis skalogram terhadap kelengkapan fasilitasnya, terdapat 4 (empat) hirarki kota di wilayah Bogor Barat yang membentuk orde kota, dimana hirarki I menjadi kota orde I dan seterusnya. Orde I yaitu Kota Leuwiliang. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 45.697 jiwa, dan menjadi kota yang relatif dekat (21 km) dengan Kota Bogor dan yang paling berkembang di antara kota-kota kecamatan yang berdekatan dengan Kota Bogor, seperti Kota Cibungbulang dan Pamijahan. Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan pasar regional dan terminal yang memiliki pelayanan angkutan ke wilayah sekitarnya. Dalam hubungannya dengan Kota Bogor, Kota Leuwiliang memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dari pergerakan angkutannya juga hubungan pasar dalam menyediakan komoditinya. Kota Leuwiliang dapat dikatakan sebagai pusat bagi wilayah sekitarnya karena memiliki keunggulan baik terhadap akses maupun fasilitas pelayanannya.

Orde II adalah Parung Panjang yang memiliki jumlah penduduk 80.093 jiwa. Kota Parung Panjang yang berjarak sekitar 70 km dari Kota Bogor. Kota Parung Panjang berada di bagian utara wilayah Bogor Barat dan lebih berorientasi ke wilayah Tangerang dan Jakarta dengan pelayanan transportasi berupa jaringan jalan raya dan kereta api. Dari aspek transportasi ini, Kota Parung Panjang tidak memiliki hubungan langsung dengan Kota Bogor sehingga bisa dikatakan memiliki keterkaitan yang rendah dibandingkan dengan Jasinga dan Leuwiliang. Kota Parung Panjang sudah berkembang dengan fasilitas perkotaan dan perumahan yang disebabkan dekatnya dengan lokasi-lokasi industri di sekitarnya. Fungsi Kota Parung Panjang ini diharapkan menjadi pusat pengembangan wilayah Bogor Barat di bagian utara dan dapat berperan dalam menangkap peluang perkembangan Kota Tangerang, sehingga kecamatan di sekitarnya seperti Tenjo dan Rumpin dapat berkembang secara proporsional.

Orde III terdiri dari Kota Jasinga, Tenjo dan Rumpin. Kota Jasinga dengan penduduk 35.099 jiwa berada di jalur pergerakan regional Kota Jakarta, Kota Bogor, Tangerang dan Rangkasbitung, dengan fasilitas utamanya adalah pasar dan terminal regional. Jarak Kota Jasinga dengan Kota Bogor yaitu 47 km, dan memiliki pelayanan angkutan yang menuju Kota Bogor. Kota Tenjo dengan jumlah penduduk 34.180 jiwa merupakan Kota yang berdekatan dengan Kota Ibukota Kabupaten Tangerang, sehingga orientasi kota ini juga ke arah tersebut. Perkembangan kotanya terkonsentrasi di sekitar pasar dan stasiun Tenjo. Kota Rumpin berada di bagian utara tetapi lebih berorientasi ke Kota Leuwiliang, meskipun tidak tertutup kemungkinan arah pergerakan penduduk dan barang ke

luar Bogor Barat, karena memiliki akses ke kecamatan di sekitarnya seperti Kecamatan Ciseeng dan Rancabungur.

Sementara itu kota-kota yang termasuk pada orde IV merupakan kota-kota yang memiliki orientasi ke pusat-pusat kota hirarki di atasnya. Kota-kota dimaksud adalah kota-kota yang berada di sekitar jalan utama seperti Kota Cibungbulang, Kota Leuwisadeng dan Kota Cigudeg. Kota lainnya berada jauh dari jalur tersebut seperti Kota Nanggung, Sukajaya dan Pamijahan. Melihat kondisi seperti ini maka kota-kota yang memiliki prospek adalah Kota Cibungbulang yang menjadi pintu masuk ke Kota Pamijahan, Kota Leuwisadeng meskipun jaraknya sangat dekat dengan Kota Leuwiliang (sekitar 3 km) dan Kota Cigudeg. Untuk jelasnya mengenai analisis skalogram dan indeks sentralitas sistem kota di Wilayah Bogor Barat seperti pada Tabel IV.1 dan Gambar 4.10.

4.3 Keterkaitan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa *rural-urban linkage* meliputi aliran komoditi pertanian dan produksi lainnya dari wilayah pedesaan ke kota (pasar) dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional. Di sisi lain adanya aliran barang manufaktur dan impor dari pusat kota ke permukiman pedesaan. Keterkaitan ini juga meliputi pergerakan penduduk, informasi dan keuangan (Tacoli, 2004 : 2). Keterkaitan wilayah akan memberikan dampak yang positif dengan adanya peningkatan produksi di masing-masing wilayah yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi wilayah melalui hubungan antar wilayah dan sektor kegiatan sebagai interaksi aliran faktor-faktor produksi.

Dari aspek keterkaitan ekonomi dapat dilihat berdasarkan elemen keterkaitan diantaranya yaitu pola pasar, aliran komoditi, aliran modal, aliran produksi dan aliran belanja (Rondinelli, 1985: 143). Secara ekonomi wilayah, keterkaitan Bogor Barat dengan Kota Bogor berupa hubungan pola pasar.

Di dalam pola pasar ini mencakup aliran komoditi dan pola belanja konsumsi (asal pedagang dan pembeli), yang menempatkan Bogor Barat sebagai pusat pemasaran wilayah, dan wilayah Bogor Barat juga berperan menjadi pemasaran komoditi-komoditi yang berasal dari pasar Kota Bogor. Dengan demikian terjadi aliran komoditi antar pasar Kota Bogor dan Bogor Barat, dan penduduk lainnya dalam memenuhi kebutuhannya melalui aliran pembeli ke pasar Kota Bogor.

Dari aspek aliran komoditi wilayah Bogor Barat meskipun tetap ada keterkaitan dengan pasar di Kota Bogor tetapi kecenderungannya lebih menuju pasar Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari peran pemilik modal/tengkulak, petani yang juga sekaligus pedagang, yang memiliki hubungan dengan pasar-pasar di Kota Jakarta. Dalam interaksi desa-kota, analisis empiris dari sudut pandang pedesaan, bahwa penduduk pedesaan umumnya berinteraksi tidak dengan satu pusat kota utama tetapi dengan sejumlah kota yang berbeda (kota besar, kota kecil, jauh dan dekat) untuk tujuan yang berbeda. Douglas (1998: 10) mengkonsepkan keterkaitan desa-kota sebagai jaringan aktivitas yang multidimensi kompleks, kota bukan merupakan pusat tunggal tetapi merupakan salah satu dari jaringan keterkaitan desa-kota. Wilayah Bogor Barat yang berdekatan dengan Kota Jakarta dan mudahnya akses ke wilayah pemasaran

memungkinkan interaksi tersebut terjadi dengan wilayah-wilayah yang lebih menguntungkan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial (hubungan antar pedagang).

Aliran komoditi ini juga terkait dengan proses produksi atau adanya keterkaitan produksi. Saat ini keterkaitan produksi antara Kota Bogor dan Bogor Barat masih cukup rendah begitu pula keterkaitan produksi di wilayah Bogor Barat sendiri yang belum dapat memanfaatkan potensi produksi pertanian untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini terjadi karena akumulasi persoalan yang terkait dengan modal, *on farm*, produksi pertanian dan pemasarannya. Lemahnya keterkaitan produksi ini menyebabkan hasil produksi pertanian dijual dalam bentuk primer dan pada saat berlebih tidak dapat dilakukan pengolahan mengingat pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian belum dimiliki. Begitu pula dengan aliran modal, masih cukup rendah sehingga belum memberikan efek bagi pertanian untuk lebih berkembang dalam pengelolaan komoditi pertanian.

Keterkaitan ekonomi wilayah tersebut secara regional sudah didukung oleh adanya keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi antara keduanya, dengan adanya jaringan jalan utama yang langsung berhubungan dengan Kota Bogor. Meskipun secara kewilayahan, keterkaitan wilayah Bogor Barat sangat potensial di bagian tengah wilayah sementara di bagian utara memiliki potensi keterkaitan dengan wilayah sekitarnya (Tangerang dan Jakarta). Hal ini disebabkan wilayah bagian utara memiliki jaringan jalan yang terhubung dengan kota-kota tersebut dan memiliki jarak yang relatif dekat dibandingkan jarak ke Kota Bogor. Dari sisi

kualitas jalan, wilayah Bogor Barat bagian tengah memiliki kualitas jalan yang relatif baik terutama jalan utamanya.

Sedangkan di wilayah utara khususnya di Kecamatan Parung Panjang dalam kondisi rusak berat karena kendaraan yang melintasinya merupakan kendaraan pengangkutan bahan tambang dengan tonase yang besar. Tingkat kerusakan jalan di wilayah utara (Kecamatan Tenjo, Parung Panjang dan Rumpin) berkisar antara 18,32% sampai dengan 61,25%, dengan tingkat kerusakan terbesar di Kecamatan Rumpin dan Parung Panjang masing-masing 61,25% dan 45,67% karena kedua wilayah ini memiliki karakteristik yang sama dalam kegiatan pertambangan, yang menggunakan kendaraan berat sebagai alat perangkutannya. Sementara wilayah tengah dan selatan tingkat kerusakan jaringan jalan berkisar antara 26,04% sampai dengan 71,05%, terutama jalan penghubung antar desa.

Keterkaitan transportasi ini memungkinkan penduduk dapat menerima akses ke pelayanan dasar dan fasilitas perkotaan. Pelayanan angkutan wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor dilayani oleh angkutan perkotaan moda kecil (non bus) yang menghubungkan dari terminal di wilayah Bogor Barat (Jasinga dan Leuwiliang) ke terminal Kota Bogor, sedangkan pelayanan di dalam kota dilakukan oleh angkutan dalam Kota Bogor. Saat ini pelayanan angkutan ini hanya terjadi pada wilayah bagian tengah sedangkan wilayah utara belum memiliki hubungan langsung dengan Kota Bogor.

Dari aspek sistem kota, terlihat bahwa wilayah Bogor Barat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kota-kota yang berada di wilayah tengah dan kota-kota

di bagian utara. Di bagian tengah Kota Leuwiliang menjadi kota utama sebagai pusat pelayanan dan menjadi orientasi wilayah bagi kota-kota di sekitarnya, sedangkan di bagian utara Kota Parung Panjang berperan sebagai pusat dan menjadi kota utama wilayah bagian utara. Kedua kota ini memiliki orientasi masing-masing yaitu Kota Leuwiliang ke Kota Bogor sedangkan Kota Parung Panjang ke Kota Tangerang dan Jakarta. Perbedaan ini disebabkan oleh jarak dan ketersediaan jaringan jalan yang melayaninya, yang memudahkan penduduk dan aliran barang lainnya menuju ke pusat-pusat yang secara geografis berdekatan dan didukung oleh prasarananya berupa jaringan jalan dan kereta api. Dalam model jaringan/Kluster wilayah yang dinyatakan oleh Douglass (1998: 11) sistem kota tidak berbentuk hirarki yang mengandalkan satu pusat utama, tetapi berbentuk horizontal yang terdiri dari sejumlah pusat dan daerah hinterlandnya yang masing-masing memiliki spesialisasi dan keuntungan komparatif. Sistem hubungan desa-kota menggambarkan aktivitas desa-kota yang kompleks, dimana pertumbuhan muncul baik dari kota maupun desa yang intensitasnya meningkat sepanjang koridor transportasi antar permukiman. Dalam konteks wilayah Bogor Barat saat ini, Kota Leuwiliang memberikan pelayanan yang dominan mulai dari pasar, terminal dan fasilitas lainnya sedangkan kota-kota kecil lainnya belum berkembang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu sistem kota yang perlu dikembangkan adalah sistem kota berbentuk jaringan dimana kota-kota kecil dikembangkan sesuai dengan sektor lokalnya yang membentuk spesialisasi dan memiliki jaringan dengan kota-kota lainnya. Tujuan program kota-kota kecil adalah memperkuat keterkaitan desa-kota, memajukan pembangunan pertanian di

wilayah pinggiran kota kecil dan mendorong kesempatan bekerja di sektor non pertanian (Gaile dalam Sharp, 2003: 116). Pengembangan kota-kota kecil di wilayah pedesaan ditujukan untuk dapat mendorong dan mendukung dalam mencapai strategi pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas perkotaan (Rustiadi et al, 2006: 102). Mathur ed (1982: 330) menyatakan bahwa fungsi sosial ekonomi kota-kota kecil bagi pelayanan wilayah pedesaan adalah mengembangkan produksi dan pemasaran pertanian, menyediakan pelayanan kepada penduduk pedesaan dan kota kecil, sebagai lokasi bagi industri pengolahan pertanian dan mendorong kesempatan tenaga kerja di non pertanian (*off farm*).

Dengan melihat kondisi keterkaitan wilayah seperti tersebut di atas, maka implikasinya terhadap ekonomi wilayah Bogor Barat dapat dilihat dengan memandang wilayah Bogor Barat sebagai wilayah sistem produksi pertanian (*Agricultural Production System*) dan kawasan pusat pinggiran (*Core-Periphery Area*). Konteksnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aliran produksi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian, hal ini terkait dengan wilayah Bogor Barat dipandang sebagai wilayah pedesaan yang dominasi kegiatannya di sektor pertanian. Dalam wilayah sebagai sistem produksi pertanian, terdapat komponen yang mendukung sistem tersebut diantaranya yaitu usaha tani, regulasi, pasar dan pelayanan sosial ekonomi.
2. Infrastruktur transportasi, di samping sebagai media pergerakan manusia dan barang, juga dapat menjadi alat integrasi wilayah, melalui hubungan fisik infrastruktur dan pelayanan transportasi antar wilayah.

3. Sistem kota, sebagai satuan-satuan permukiman pada dasarnya wilayah tidak berdiri sendiri dan diharapkan terjadi suatu jaringan antar kota yang memiliki spesialisasi dan menjadi pendorong wilayah belakangnya yang umumnya sebagai wilayah pertanian.

Implikasi tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat, baik secara sektoral maupun spasial. Strategi sektoral dalam meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah dengan menciptakan pasar baru bagi barang yang diproduksi wilayah, menggunakan teknologi untuk menghasilkan barang secara efisien, membangun dan memperluas infrastruktur fisik yang secara langsung terkait dengan aktivitas produktif, menciptakan kesempatan tabungan dan investasi lokal, mengembangkan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan penyediaan tenaga kerja serta mengembangkan sumberdaya lokal. Meningkatkan keuntungan lokasi di dalam wilayah untuk menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih efisien dan efektif serta membangun kapasitas institusi untuk menyediakan informasi yang lebih baik dan menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat bagi perencanaan, pengambilan keputusan dan produksi (John Friedman dalam Rondinelli, 1985: 217).

Di samping strategi sektoral di atas yang mengarah pada pengelolaan aktivitas ekonomi masyarakat, maka diperlukan pula strategi spatial yakni usaha-usaha untuk menghubungkan berbagai aktivitas-aktivitas di suatu wilayah. Dalam hal ini tindakan yang mungkin dilakukan adalah untuk memperkuat hirarki pusat wilayah khususnya permukiman berukuran menengah dan kecil yang memiliki beberapa fasilitas serta untuk meningkatkan hubungan dengan wilayah

hinterlandnya ke dalam sistem ekonomi wilayah. Investasi awal fasilitas ini untuk mendukung produksi pertanian dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk pedesaan (Rondinelli, 1985: 222).

Dari implikasi di atas maka dalam perumusan arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat dianalisis dengan metode SWOT sebagai berikut :

TABEL IV.2
FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL WILAYAH BOGOR BARAT

NO.	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	PENJELASAN
1	FAKTOR INTERNAL Kekuatan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi lahan dan produksi komoditi pertanian unggulan 2. Jumlah penduduk petani yang besar 3. Adanya strategi percepatan pengembangan wilayah 4. Adanya institusi/lembaga pemerintah di sektor pertanian. 5. Adanya kawasan agropolitan 6. Potensi pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara fisik wilayah Bogor Barat merupakan wilayah pertanian dengan potensi lahan yang cukup luas (78,3 %) 2. Jumlah penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani (54, 25 %), 3. Rencana Strategis Kabupaten Bogor 2003-2008. 4. Dinas Pertanian dan penyuluhan pertanian dapat memberikan dorongan dan bantuan dalam pengelolaan pertanian 5. Ditetapkannya desa di Kecamatan Leuwiliang sebagai kawasan agropolitan Bogor Barat. 6. Kegiatan pariwisata di beberapa kecamatan seperti Pariwisata Gunung Salak Endah dan sebagainya.
2	Kelemahan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Tradisional dan Subsisten 2. Rendahnya pengetahuan petani dalam usaha tani dan pemasaran 3. Pengelolaan pasca produk masih rendah 4. Infrastruktur transportasi internal yang belum memadai 5. Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak berfungsi dan rusak. 6. Sistem pusat-pusat pelayanan belum berkembang 7. Belum berkembangnya sentra-sentra produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian yang diusahakan merupakan kegiatan yang turun temurun, yang mengandalkan kebiasaan bercocok tanam. 2. Informasi yang kurang tentang pengelolaan dan pemasaran pertanian. 3. Industri yang menggunakan input pertanian rendah. 4. Belum semua wilayah kecamatan dapat dilayani infrastruktur jalan yang memadai. 5. Adanya jaringan irigasi yang rusak ringan 78,98 % dan berat 1,30 %. 6. Kota-kota kecil kecamatan tidak

Lanjutan

NO.	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	PENJELASAN
	8. Rendah dan belum berkembangnya investasi industri pengolahan 9. Belum berkembangnya kelembagaan petani	berkembang secara merata. 7. Pusat-pusat kegiatan pertanian belum berkembang di masing-masing kecamatan. 8. Investasi bagi pengembangan industri pengolahan masih rendah, sehingga produk pertanian tidak berorientasi pada input industri. 9. Kelompok tani atau kelembagaan lainnya dalam pengelolaan pertanian masih kurang, sehingga kurang membantu dalam peningkatan usaha tani.
3	FAKTOR EKSTERNAL Peluang	
	1. Kota sekitar Bogor Barat sebagai pemasaran produk pertanian dan olahannya. 2. Peluang ekspor bagi produk unggulan 3. Adanya permintaan dari supermarket bagi komoditi buah-buahan unggulan 4. Dukungan organisasi non pemerintah dan dunia pendidikan yang fokus di sektor pertanian 5. Berkembangnya angkutan barang pertanian dan industri pengolahan	1. Berkembangnya kota-kota di sekitar wilayah Bogor Barat menjadi lokasi pemasaran bagi produk-produk wilayah (Jakarta, Bogor, Depok dan sebagainya) 2. Adanya eksportir yang memasarkan produk unggulan baik di dalam maupun ke luar negeri seperti komoditi manggis. 3. Meluasnya permintaan bagi pasar supermarket untuk komoditi tertentu. 4. Adanya lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan yang fokus terhadap pengembangan pertanian yang membantu petani dalam usaha tani dan pemasaran melalui kegiatan pelatihan. 5. Meningkatnya pemasaran menumbuhkan jasa angkutan dan berkembangnya kegiatan pertanian dapat mendorong kegiatan pengelolaan hasil pertanian.
4	Ancaman	
	1. Persaingan produk dengan wilayah lain 2. Perubahan kepemilikan aset lahan	1. Perdagangan antar wilayah bahkan negara secara bebas (konteks globalisasi) sering melemahkan produk-produk lokal akibat daya saing yang rendah. 2. Perubahan-perubahan kepemilikan lahan yang cenderung meningkatkan perubahan lahan.

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan matriks di atas, maka disusun matriks SWOT Wilayah

Bogor Barat sebagai berikut :

TABEL IV.3
MATRIKS SWOT WILAYAH BOGOR BARAT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi lahan dan produksi komoditi pertanian unggulan ▪ Jumlah penduduk petani yang besar ▪ Adanya strategi percepatan pengembangan wilayah ▪ Adanya institusi/lembaga pemerintah di sektor pertanian ▪ Adanya kawasan agropolitan ▪ Potensi pariwisata 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tradisional dan Subsisten ▪ Rendahnya pengetahuan petani dalam usaha tani dan pemasaran ▪ Pengelolaan pasca produk masih rendah ▪ Infrastruktur transportasi internal yang belum memadai ▪ Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak berfungsi dan rusak. ▪ Sistem pusat-pusat pelayanan belum berkembang ▪ Belum berkembangnya sentra-sentra produksi ▪ Rendah dan belum berkembangnya investasi industri pengolahan ▪ Belum berkembangnya kelembagaan petani
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kota sekitar Bogor Barat sebagai pemasaran produk pertanian dan olahannya. ▪ Peluang ekspor bagi produk unggulan ▪ Adanya permintaan dari supermarket bagi komoditi buah-buahan unggulan ▪ Dukungan organisasi non pemerintah yang fokus di sektor pertanian ▪ Berkembangnya angkutan barang pertanian dan industri pengolahan 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan potensi lahan dan komoditas unggulan ✓ Memperluas pemasaran dengan meningkatkan kualitas komoditas ✓ Melakukan pemberdayaan petani dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan/organisasi lain ✓ Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi kegiatan ✓ Mengembangkan pariwisata sebagai sektor pendorong dan pemasaran produk-produk unggulan ✓ Mengembangkan keterkaitan dengan sektor transportasi angkutan barang 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendorong kemampuan dan pengetahuan petani dalam kegiatannya untuk menghasilkan produk yang mampu dipasarkan secara luas. ✓ Menciptakan kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan hasil pertanian ✓ Mendorong infrastruktur pedesaan yang mendukung produksi dan pemasaran sehingga tumbuh aktivitas jasa pengangkutan. ✓ Menumbuhkan pusat-pusat pelayanan dan sentra produksi ✓ Mengembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kapasitas petani
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persaingan produk dengan wilayah lain ▪ Perubahan kepemilikan aset lahan 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan produk-produk wilayah yang berkaulitas serta memperluas jaringan pemasaran. ✓ Mengarahkan rencana tata ruang dan pengendalian perubahan fungsi lahan ✓ Meningkatkan kemitraan dalam memperluas pemasaran komoditi wilayah. 	<p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperkuat posisi petani melalui peningkatan kemampuan dan kapasitasnya dalam pengelolaan pertanian. ✓ Menghasilkan produk dengan standar mutu yang ditentukan dan berupaya mempertahankannya dan meningkatkannya untuk menciptakan daya saing. ✓ Mengembangkan lahan pertanian secara produktif dengan infastruktur yang mendukungnya.

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Dengan melihat keterkaitan wilayah, implikasi terhadap ekonomi wilayah dan strategi pengembangan ekonomi sektoral dan spasial, maka arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat adalah sebagai berikut :

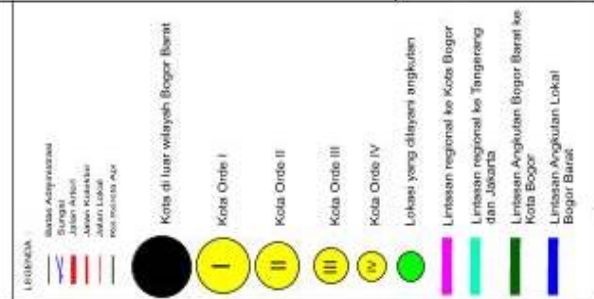
1. Mengembangkan potensi lahan dan komoditas unggulan pertanian yang menjadi basis kegiatan. Potensi lahan yang cukup luas ini sesuai dengan potensinya perlu dikembangkan secara intensif, baik lahan kering yang cukup dominan maupun lahan basah yang umumnya dimanfaatkan untuk tanaman padi. Dengan mengembangkan lahan pertanian secara produktif dengan infrastruktur yang mendukungnya, maka ketersediaan lahan dan kecenderungan perubahan lahan (pemilikan dan penggunaannya ke fungsi lainnya) dapat diminimalkan. Penggunaan lahan untuk pertanian secara intensif ini pada akhirnya akan meningkatkan luas dan hasil produksi serta penyerapan tenaga kerja pertanian. Luas lahan pertanian ini juga diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk-produk pertanian yang akan menjadi komoditi unggulan wilayah.
2. Melakukan pemberdayaan petani dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan/organisasi lain melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuan petani dalam kegiatannya untuk menghasilkan produk yang mampu dipasarkan secara luas. Pemberdayaan ini juga dilakukan dengan mengembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kapasitas petani, memperkuat posisi petani dalam mengembangkan produk-produk pertanian dan memasarkannya sesuai dengan potensi pasar.

3. Memperluas pemasaran dengan meningkatkan kualitas komoditas melalui pengembangan produk-produk wilayah yang berkualitas serta memperluas jaringan pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas ini maka diperlukan standar mutu yang akan menjadi standar produk pertanian wilayah Bogor Barat dan berupaya mempertahankan dan meningkatkannya untuk menciptakan daya saing. Pola kemitraan dalam memperluas pemasaran produk harus dikembangkan baik di wilayah Bogor Barat maupun dengan pasar lain yang lebih luas seperti dengan eksportir dan distributor lainnya.
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi kegiatan di suatu wilayah yang juga dapat berfungsi sebagai sentra produksi maupun pusat-pusat pelayanan lokal. Pengembangan kota-kota kecil dalam konteks keterkaitan desa-kota menjadi relevan dalam menyediakan aksesibilitas menjadi pendorong wilayah belakangnya. Dalam sistem kota yang terbentuk bahwa orde I (Kota Leuwiliang) dapat menjadi pusat bagi wilayah Bogor Barat terutama di koridor bagian tengah. Fungsi Kota Leuwiliang ini diarahkan pada penyediaan fasilitas yang melayani regional Bogor Barat seperti kota-kota kecil orde IV di bagian selatan yang memang berorientasi ke Kota Leuwiliang. Kota-kota orde IV ini dikembangkan sebagai sentra produksi pertanian wilayah belakangnya yang menghasilkan komoditi palawija, sayuran dan buah-buahan. Sementara itu kota Orde II (Kota Parung Panjang) diarahkan sebagai pusat kegiatan perkotaan di bagian utara yang berorientasi ke Jakarta dan Tangerang. Sebagai lokasi pemasaran di bagian utara ini maka dapat melayani kota-kota kecil orde III di

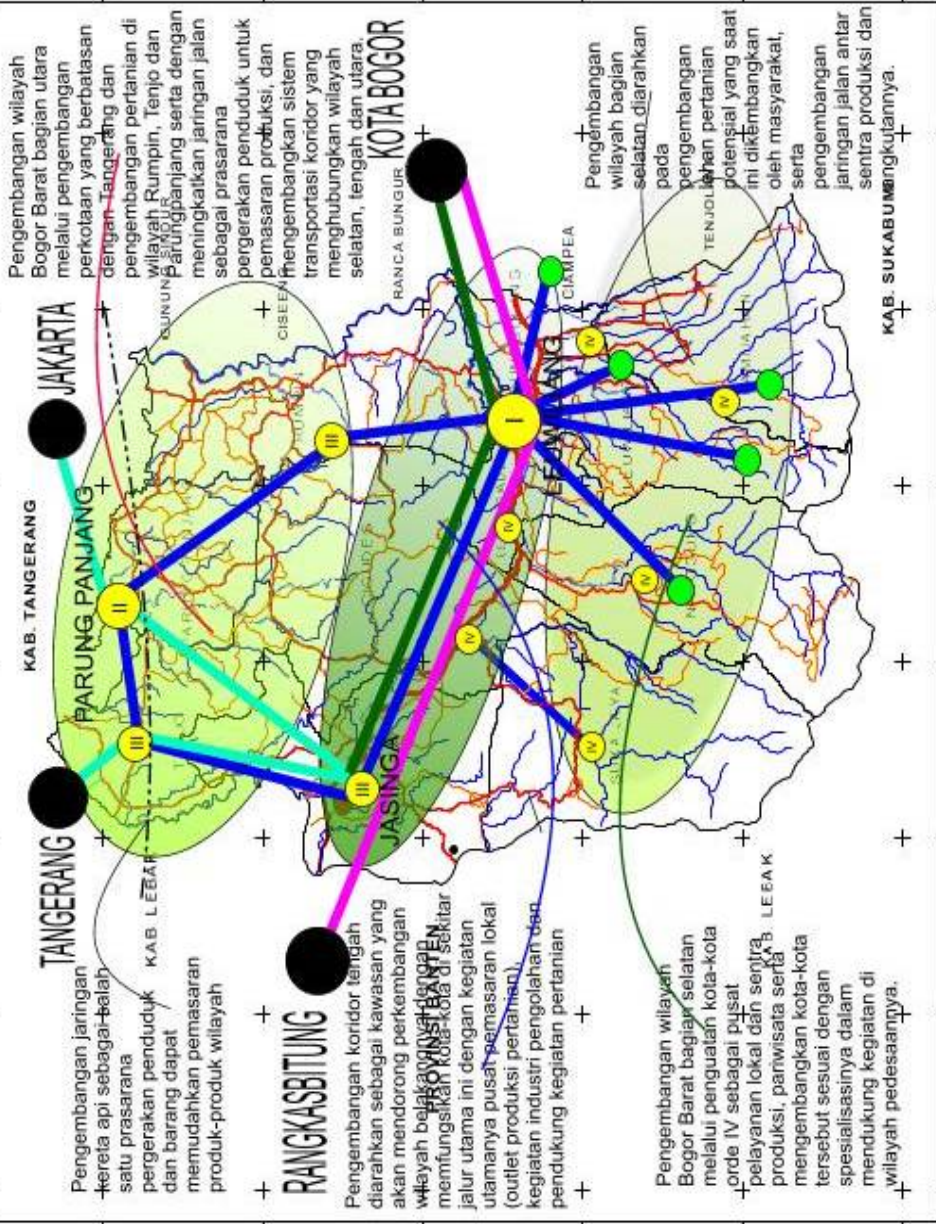
sekitarnya yaitu Kota Rumpin, Tenjo dan Jasinga yang juga memiliki kemudahan ke Kota Leuwiliang. Dengan melihat fungsi-fungsi kota tersebut dibuat sistem jaringan antar kota dengan mengembangkan transportasi koridor antar kota sehingga membentuk jaringan kota dengan spesialisasi dan multi aktivitas. Hal ini sesuai dengan model jaringan wilayah dalam konteks keterkaitan desa-kota, dengan menyebarkan fungsi-fungsi kota yang saling berhubungan melalui koridor transportasi antar permukiman, sehingga berkembang kegiatan-kegiatan jasa angkutan dan infrastruktur pendukungnya. Hal lainnya yang perlu dilakukan untuk mengarahkan dan memfungsikan kota-kota dan sentra produksi diperlukan penyusunan rencana tata ruangnya sehingga lebih terarah dan memudahkan pengendaliannya.

5. Mengembangkan keterkaitan sektor industri pengolahan hasil pertanian. Secara geografis kegiatan-kegiatan industri ini dapat dikembangkan di kota-kota kecil (orde III dan IV) yang langsung terkait dengan sentra produksi pertanian. Sektor lainnya yang juga perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata yang lokasinya berada di bagian selatan wilayah Bogor Barat, yang perlu dukungan transportasi ke lokasi objek wisata. Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata ini maka akan tumbuh keterkaitan dengan kegiatan basisnya melalui pengembangan outlet-outlet produksi pertanian yang mudah dijangkau oleh penduduk dan memberikan daya tarik untuk berkembangnya pemasaran lokal di wilayah Bogor Barat.

Arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat seperti pada Gambar 4.11.



NO	SKALA
4.11	
LITABRA	
BARUDA AGENSI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA BOGOR, 2008 FAKTA DAN ANALISIS 2007	



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan dan rekomendasi untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat.

5.1 Kesimpulan

1. Keterkaitan pola pasar, aliran komoditi dan aliran belanja menunjukkan adanya keterkaitan antara wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor. Pola pasar merupakan hubungan fungsional antar pasar kedua wilayah dalam memenuhi komoditi yang diperdagangkan di masing-masing pasar, yang dilihat berdasarkan asal komoditi yang menunjukkan komoditi di pasar-pasar Bogor Barat berasal dari pasar Kota Bogor. Begitu pula dengan aliran komoditi yang berasal dari wilayah Bogor terutama palawija, sayuran dan buah-buahan, meskipun kecenderungan pemasarannya ke wilayah Jakarta dan Tangerang serta asal pedagang dan pembeli dari kedua wilayah. Kecenderungan pemasaran ke wilayah selain Kota Bogor merupakan kondisi adanya hubungan suatu wilayah tidak pada satu pusat tetapi berinteraksi dengan sejumlah kota lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keuntungan yang diharapkan. Sementara itu aliran modal dan produksi belum berkembang yang dapat dilihat berdasarkan sumber modal yang digunakan oleh petani dan keterkaitan

produksi dimana produk pertanian digunakan input oleh industri pengolahan sangat kecil.

2. Keterkaitan fisik dan pelayanan transportasi kedua wilayah memiliki keterkaitan yang berarti, hal ini dapat dilihat dari jaringan jalan dan pelayanan angkutan penumpang terutama pada koridor tengah wilayah Bogor Barat. Sedangkan wilayah lainnya dilayani oleh angkutan yang menuju kota-kota di sepanjang jalan utama. Sementara itu untuk kecamatan Tenjo dan Parung Panjang, pelayanan angkutan lebih berorientasi ke Tangerang dan Jakarta. Angkutan yang melayani kedua wilayah berupa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan kecil, namun demikian dalam jumlah yang cukup banyak, hal ini mengindikasikan pergerakan orang antara kedua wilayah ini cukup besar, mengingat Kota Bogor sebagai pusat koleksi dan distribusi orang dan barang dari dan ke wilayah lainnya. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hal dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dari ketersediaan jaringan transportasi yaitu aksesibilitas yang berskala lokal yang menghubungkan sentra-sentra produksi atau desa-desa produsen, jaringan koridor bagian tengah yang merupakan urat nadi ke wilayah Kota Bogor dan jaringan yang menuju bagian utara yang berperan dalam memberikan kemudahan pergerakan ke Tangerang dan Jakarta.
3. Pusat-pusat pelayanan wilayah masih bertumpu di Kota Leuwiliang sebagai kota orde I, Parung Panjang sebagai orde II, Jasinga, Tenjo dan

Rumpin sebagai orde III serta kota-kota lainnya sebagai orde IV (Kota Cibungbulang, Pamijahan, Leuwisadeng, Nangung, Sukajaya dan Cigudeg). Di wilayah tengah, orientasi kota-kota orde IV mengarah langsung ke Kota Leuwiliang yang disebabkan mudahnya akses ke wilayah Leuwiliang dengan dukungan kelengkapan fasilitas yang dimilikinya. Sementara itu wilayah utara kota yang berkembang adalah Kota Parung Panjang yang lebih berorientasi ke wilayah Tangerang dan Jakarta. Pengembangan kota-kota orde IV melalui pengembangan sentra produksi pertanian yang dihubungkan oleh jaringan ke masing-masing kota orde IV maupun ke orde di atasnya sehingga fungsi-fungsi kota tersebut dapat saling sinergis antar orde yang sama maupun dengan orde yang di atasnya yang mengandalkan aktivitas lokalnya dan berorientasi pasar ke luar wilayah.

4. Implikasi keterkaitan desa-kota terhadap wilayah Bogor Barat dapat dilihat secara sektoral yang terkait dengan aliran komoditi yaitu pada kegiatan pertanian dan industri pengolahannya, sistem transportasi wilayah antar permukiman dan sistem kota sebagai pusat-pusat pengembangan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayah belakangnya. Kondisi ini mempengaruhi arahan pengembangan ekonomi wilayah Bogor Barat yang meliputi pengembangan potensi lahan dan komoditas unggulan, pemberdayaan petani yang menjadi salah satu pelaku pembangunan pertanian, memperluas jaringan pemasaran dengan meningkatkan daya saing, mengembangkan agropolitan dan

kota-kota kecil sebagai stimulan perkembangan wilayah sentra produksi, mengembangkan keterkaitan sektor pertanian dan industri pengolahan serta kegiatan pariwisata.

Jadi kesimpulan dari studi ini adalah adanya keterkaitan wilayah Bogor Barat dengan Kota Bogor dari aspek pola pasar, pola belanja konsumsi yang dilihat dari asal pedagang dan pembeli, dan aliran komoditi, meskipun cenderung mengalir ke Jakarta. Sedangkan aliran modal dan produksi belum berkembang. Keterkaitan yang paling menonjol adalah keterkaitan transportasi dimana kedua wilayah dihubungkan dengan prasarana jalan dan sarana angkutan yang cukup banyak, yang mengindikasikan pergerakan orang untuk tujuan tertentu sangat besar. Dari keterkaitan ini berimplikasi kepada arahan pengembangan wilayah yaitu pengembangan lahan pertanian dan komoditasnya, penguatan petani, perluasan jaringan pemasaran, pengembangan kota-kota kecil dan prasarana transportasi serta mengembangkan keterkaitan antar sektor.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah baik upaya yang langsung terkait dengan kajian yang sudah dilakukan maupun pengaruh unsur-unsur lainnya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah Bogor Barat. Dengan demikian rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan maksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan program pertanian hendaknya diarahkan kepada pengembangan kapasitas petani, sehingga terjadi perubahan di dalam diri petani dalam melihat peluang sektor pertanian di masa datang. Pengembangan kapasitas ini meliputi modal, informasi, pemasaran dan kemampuan pengelolaan pertanian.
2. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah yang dapat dihasilkan dari kondisi yang ada sekarang ini, dengan menciptakan usaha yang terkait dengan proses produksi dengan input dari sektor pertanian. Hubungan yang erat antara sektor pertanian dengan pengolahannya diharapkan dapat mewujudkan strategi percepatan pembangunan di Wilayah Bogor Barat.
3. Mengembangkan jalan dan infrastruktur permukiman ke wilayah-wilayah sentra pertanian yang dapat menggairahkan usaha-usaha pertanian dengan adanya kemudahan pelayanan infrastruktur. Pengembangan jaringan jalan mengacu kepada sentra-sentra produksi yang sudah ada dan menambah fasilitas terminal pengumpul komoditi sehingga tidak hanya memudahkan perangkutan hasil-hasil pertanian tetapi juga menggairahkan usaha perangkutannya.
4. Mengembangkan hirarki kota-kota di bawahnya untuk langsung berperan menjadi pusat-pusat sentra dan pengumpul aktivitas pertanian. Pengembangan kota-kota kecil ini diawali dengan identifikasi sentra-sentra pertanian dan permukiman sehingga keberadaannya akan membantu dalam memperkuat keterkaitan desa-kota di wilayah Bogor Barat dan kota sekitarnya, dengan mengembangkan jaringan sistem kota yang berbasis spesialisasi.

5. Di samping itu, pada dasarnya pengembangan ekonomi wilayah merupakan sinergi dari berbagai sektor dan sumberdaya yang mendukungnya, oleh karenanya diperlukan kajian sektor lainnya seperti sektor pariwisata yang juga menjadi potensi bagi wilayah Bogor Barat.
6. Sejalan dengan hasil studi ini, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam terutama yang terkait dengan besaran atau jumlah komoditi yang dibutuhkan dan yang beredar sehingga lebih mudah untuk melakukan penanganan secara tepat sasaran. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah tipe keterkaitan lainnya seperti keterkaitan penduduk dan produksi wilayah sehingga dapat menggambarkan keterkaitan wilayah secara lebih detail. Begitu pula analisis *input output* antar sektor dan antar wilayah mungkin akan lebih terarah dalam mengetahui keterkaitan ke belakang dan ke depan, serta efek ganda dari adanya keterkaitan desa-kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alisjahbana. AS, Effendi. N, Boediono, 2002, *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, BPFE-Yogyakarta.
- Abdurahman, Benjamin, 2005, *Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing*, IAP Jawa Tengah dan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Akil, Syarifudin, 2006, *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia Tinjauan Teoritis dan Prakti*, Makalah Kuliah Terbuka Program Magister KAPET, Universitas Hasanudin Makasar, <http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Paper/UNHAS-APET.pdf>, diakses tanggal 1 November 2006.
- Alkadri dan Djajadiningrat. 2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Bagaimana Menganalisis Potensi Daerah*, Penerbit : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Alkadri, Riyadi. DS, Muchdie, Siswanto. S, Fathoni. M, 2001, *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT, Jakarta.
- Ambardi. Urbanus, M, Prihawantoro. S, (eds), 2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT, Jakarta.
- Anwar, Affendi.Hadi, Setia, 1996, *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Prisma, Edisi 25 Tahun 96, halaman 60, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Arifin, Bustanul. 2004, *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Baiquni, M. 2004, *Membangun Pusat-pusat di Pinggiran, Otonomi di Negara Kepulauan*, Penerbit ideAs dan PKPEK, Yogyakarta.
- Beer. Andrew, Haughton. Graham, Maude. Alavie, 2003, *Developing Locally, An international Comparison of Local and Regional Economic Development*, The Policy Press, University of Bristol, UK.
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Bendavid-Val, A. 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Preager.4th.ed.
- Blakely. Edward J, 1994, *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, Sage Publication, California
- Budiharsono, Sugeng, 2005, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Cook. Paul, Kirkpatrick. Colin, 1997, *Globalization, Regionalization and Third World Development*, Regional Studies, Vol. 31.
- Dikun, Suyono, 2003, *Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama dan Pasca Krisis*, Bappenas, Jakarta
- Douglas, Mike, 1998, *A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages : An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia*, Third World Planning Review, Vol 20 No.1
- Dawkins. Casey J, 2003, *Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments*, Journal of Planning Literature, Vol. 18, No. 2 (November 2003), Sage Publications
- Gaspersz. Vincent, 1990, *Analisis Kuantitatif Untuk Perencanaan*, Penerbit Tarsito Bandung.
- Glasson. John, 1978, *Introduction to Regional Planning, Concept, Theory and Practice*, Hutchinson, London
- Guimaraes. De Campos. PJ, 1998, *Planning For Resources-Poor Regions In A Globalization World: Implication For Practice and Training*, Regional Development Dialogue, Vol 1, UNCRD, Nagoya Japan.
- Hoshino. Claudia, Rodriguez. Maria Helena, 2001, *Decentralization, Globalization, and Regional Development in Latin America-Trends, Challenge, and Opportunities*, New Regional Development Paradigms, Volume 2, Greenwood Press, London
- Kumssa. Asfaw, 2001, *The Policy Challenges of Globalization for Developing Countries*, New Regional Development Paradigms, Volume 1, Greenwood Press, London
- Kuncoro. Mudrajad, 2006, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Marimin, 2004, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Grasindo, Jakarta.
- Okpala,. Don C.I, 2003, *Promoting the Positive Rural-Urban Linkages Approach to Sustainable Development and Employment Creation : The Role of UN-HABITAT*, The International Federation of Surveyors (FIG) 2nd Regional Conference on Urban-Rural Interrelationship for Sustainable Development, December 2-5, 2003, Marokko.
- Nazir. Mohammad, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rangkuti. Freddy, 2001, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Richardson. Hary W, 1979, *Regional Economics*, University of Illinois Press, Urbana
- Riyadi, Bratakusumah. DS, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riyadi, Dodi. Slamet, 2002, *Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah di Indonesia dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan*, Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT, Jakarta.
- Rondinelli, Denis A. 1985, *Applied Methods of Regional Analysis*, Westview Press, Colorado, United States of Amerika.
- Rustiadi.Ernani, Hadi. Setia, 2006, *Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Pedesaan dan Pembangunan Berimbang, dalam Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa Kota Berimbang*, edisi Buku Kawasan Agropolitan : Konsep Pembangunan Desa Kota Berimbang, Crestpent Press, P4W-LPPM IPB, Bogor
- Rustiadi. Ernani, Saefulhakim. Sunsun, Panuju. R Dyah, 2004, *Diktat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Institut Pertanian Bogor
- Saragih, Juli P, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sharp. Kay, Devereux. Stephen, Amare. Yared, 2003, *Destitution In Ethiopia's Northeastern Highlands (Amhara National Regional State)*, Institute of Development Studies at The University of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK

- Soegijoko. Budhy Thahjati S (ed). 1997, ***Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia***, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sugiarto, Siagian D, Sunaryanto. LT, Oetomo.DS, 2003, ***Teknik Sampling***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syaukani, Gaffar. Afan, Rasyid. Ryaas, 2002, ***Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan***, Penerbit Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Tacoli, Cecilia. IIED, 2004, ***Rural-Urban Linkages and Pro-Poor Agricultural Growth: An Overview***, Makalah dipersiapkan untuk OECD DAC POVNET, Helsinki Workshop, tanggal 17-18 Juni 2004.
- Tarigan,Robinson, 2005, ***Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi***, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang Undang No. 34 Tahun 2004, tentang ***Pemerintahan Daerah***. Penerbit BP. Cipta Karya, Jakarta.
- Undang Undang No. 24 Tahun 1992, tentang ***Penataan Ruang*** Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Warpani, Suwardjoko, 1984, ***Analisis Kota dan Daerah***, Penerbit ITB, Bandung.